



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN RADIO KOMUNITAS DI DAERAH  
BENCANA SEBAGAI MEDIA TANGGAP DARURAT**

**(Studi Kasus di Radio Komunitas Samudera FM Dalam Masa Tanggap  
Darurat Pasca Gempa dan Tsunami Aceh )**

**TESIS**

**Oleh:  
DEDDY SATRIA MANGKUWINATA  
NPM : 0606016086**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
JAKARTA  
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN RADIO KOMUNITAS DI DAERAH  
BENCANA SEBAGAI MEDIA TANGGAP DARURAT**

**(Studi Kasus di Radio Komunitas Samudera FM Dalam Masa Tanggap  
Darurat Pasca Gempa dan Tsunami Aceh )**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains dalam Ilmu Komunikasi**

**Oleh :  
DEDDY SATRIA MANGKUWINATA  
NPM : 0606016086**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI  
JAKARTA  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber-sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deddy Satria Mangkuwinata

NPM : 0606016086

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2009

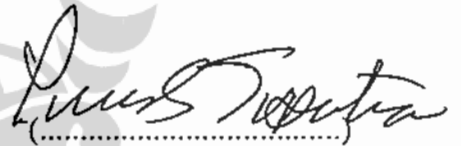
**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Deddy Satria Mangkuwinata  
NPM : 0606016086  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Kekhususan : Manajemen Komunikasi  
Judul Tesis : Perkembangan Radio Komunitas Di Daerah  
Bencana Sebagai Media Tanggap Darurat (Studi  
Kasus di Radio Komunitas Samudera FM Dalam  
Masa Tanggap Darurat Pasca Gempa Dan  
Tsunami Aceh)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Pinkey Triputra, M.Sc



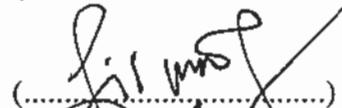
(.....)

Pembimbing : Drs. Eduard Lukman, MA



(.....)

Penguji Ahli : Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang : Irwansyah, S.Sos., MA



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta manusia dan yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa menikmati syafaatnya kelak di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, menjadi kebagian sendiri bagi penulis karena menyelesaikan tesis ini ditengah berbagai kesibukan tugas sehari-hari. Sebahagian yang tertuang dalam tesis ini adalah pengalaman penulis sendiri sebagai penggiat radio komunitas di Aceh dan terlibat secara langsung dalam mengembangkan radio komunitas di Aceh pasca tsunami. Sehingga pengalaman ini, coba penulis tuangkan dalam bentuk penelitian tesis.

Terima kasih kepada bapak Drs. Eduard Lukman, MA yang telah bersedia membimbing dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih pula kepada seluruh narasumber serta teman-teman penggiat radio komunitas di Aceh dari relawan *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet) dan *Aceh Reconstruction Radio Network* (ARRNet), terutama pihak *Combine Resource Institution* (CRI) Yogyakarta yang telah ikut membantu dan memberikan data untuk kepentingan tesis ini.

Secara khusus penulis mempersembahkan tesis ini kepada ibunda Hajjah Zuraini Ismail dan almarhum ayahanda Teungku Haji Muhammad Nur Ismail yang tiada bosan mendorong penulis untuk segera dapat menyelesaikannya. Tak lupa penulis persembahkan tesis ini kepada almarhumah istri tercinta Anisah Hanum binti Teuku Muhammad Saleh yang seharusnya mendampingi penulis selama menempuh pendidikan ini di Jakarta dan satu-satunya buah hati kami yakni Ilham Noorhady, yang sering penulis tinggal sejak usia dua bulan.

Akhir kata, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tesis ini, semoga Allah SWT akan membalas semua amal baik yang telah diberikan. Amin.

Jakarta, 7 Juli 2009

Penulis,

Deddy Satria Mangkuwinata

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deddy Satria Mangkuwinata  
NPM : 0606016086  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Departemen : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perkembangan Radio Komunitas Di Daerah Bencana Sebagai Media Tanggap Darurat (Studi Kasus di Radio Komunitas Samudera FM Dalam Masa Tanggap Darurat Pasca Gempa Dan Tsunami Aceh).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan



Deddy Satria Mangkuwinata

## ABSTRAK

Nama : Deddy Satria Mangkuwinata  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Kekhususan : Manajemen Komunikasi  
Judul : Perkembangan Radio Komunitas Di Daerah Bencana  
Sebagai Media Tanggap Darurat (Studi Kasus di Radio  
Komunitas Samudera FM Dalam Masa Tanggap  
Darurat Pasca Gempa Dan Tsunami Aceh)

Tesis ini membahas tentang perkembangan radio komunitas di Aceh pasca tsunami yang berlangsung dalam masa tanggap darurat. Titik fokus penelitian ini pada program *Atjeh Emergency Radio Network (AERNet)*, dimana radio komunitas Samudera FM adalah salah satu dari lima radio yang didirikan dalam masa tanggap darurat tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kasus dan bersifat *longitudinal* (waktu tertentu). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta atau informasi tentang perkembangan radio komunitas di masa tanggap darurat bencana. Tipe dari penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggunakan variabel masa lalu dan masa kini berupa penjelasan dari responden sebagai *key infoman*.

Dari hasil temuan penelitian bahwa kehadiran radio komunitas di Aceh pasca tsunami bukan atas inisiatif warga komunitas melainkan berkat bantuan dari lembaga diluar komunitas itu sendiri yang bergerak dalam pengembangan media komunitas, khususnya radio. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat prospek dan kendala perkembangan radio komunitas dalam mendukung proses penanggulangan bencana terutama peran dan fungsi radio komunitas dalam mengisi kekosongan informasi ditengah situasi tanggap darurat.

Hasil yang diperoleh bahwa radio komunitas di Aceh walaupun berperan dalam masa tanggap darurat namun memiliki kelemahan dalam hal partisipasi warga. Disamping itu secara kelembagaan masih harus diberi pendampingan. Radio komunitas juga ikut memainkan peran sebagai media tanggap darurat untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi antara sesama korban tsunami, baik tentang lingkungannya maupun di luar lingkungannya. Dengan demikian lingkunganlah yang membawa informasi yang kemudian diterima media massa. Sehingga radio komunitas di daerah bencana dapat berfungsi sebagai media *early warning system* terhadap suatu peristiwa.

Kata Kunci :  
Radio Komunitas, Media Tanggap Darurat, Informasi Bencana

## ABSTRACT

Name : Deddy Satria Mangkuwinata  
Study Program: Communication Sciences  
Specificity : Communication Management  
Title : Development of Community Radio in the Media As a Regional  
Disaster Emergency Response (Case Studies in Community Radio  
Samudera FM Emergency Respon in The Post-Earhquake and  
Tsunami in Aceh

The thesis discusses about community radio development in Aceh during emergency response period after the tsunami. The focus of the research was on the program of *Atjeh Emergency Radio Network (AERNet)*, in which the Samudera FM community radio was one of the five radios founded over the emergency response period.

The research used qualitative approach that applied case study and had longitudinal characteristic (at a particular time). It was done in order to gather facts or information on the community radio development during the disaster emergency response period. Type of the research is descriptive in which the research uses the past and future variable collected from the respondents' explanation as key informants.

From the result of the research, it was found that the radio community in Aceh after the tsunami was not founded based on the initiative of the people in the community, but it was an aid from an institution beyond the community itself that focused on the community media development, especially radio. That was why the research was aimed to find the prospect and obstacles of the community radio development in order to support the process on overcoming disaster, especially its role and function as the community radio in filling the lack of information in the middle of emergency situation.

The gathered result showed that even though the community radio in Aceh played its role in the emergency response period, it still had a weakness in people's participation. Besides, as an institution, it still needed a support. The community radio played its role as an emergency response media as well, that was used to communicate each other and share information among the victims of the tsunami, whether it was about the circumstances in their own area or beyond. So that the people in the spot area became the ones who carried out the information received by the mass media. That is why the radio community in the disaster area can have its function as a media of the early warning system towards a particular event.

Key word :  
Community Radio, Emergency Response Media, Disaster Information



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTARCT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latarbelakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Pembatasan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Signifikansi Penelitian	
1.5.1. Signifikansi Akademis .....	5
1.5.2. Signifikansi Praktis .....	6
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1. Komunikasi Massa .....	7
2.1.1. Fungsi Komunikasi Massa .....	10
2.2. Penyiaran Radio Sebagai Media Komunikasi Massa .....	12
2.2.1. Fungsi Informasi Penyiaran Radio .....	16
2.2.2. Model Komunikasi Pembangunan .....	18
2.2.3. Penyiaran Radio Dalam Teori Komunikasi .....	21
2.3. Konsep Komunitas .....	23
2.3.1. Komunitas Pedesaan .....	26
2.4. Media Penyiaran Komunitas .....	30
2.5. Radio Komunitas .....	34
2.5.1. Definisi Radio Komunitas .....	36
2.5.2. Karakter Radio Komunitas .....	39
2.5.3. Jenis-Jenis Radio Komunitas .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	43
3.2. Lokasi Penelitian .....	44
3.3. Subjek Penelitian .....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5. Teknik Analisis Data .....	46
3.6. Keterbasan Penelitian .....	47

3.6.1. Keterbatasan yang berkaitan dengan Pengumpulan data .....	47
3.6.2. Keterbatasan yang berkaitan dengan lokasi penelitian ` .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA</b>	
4.1. Sekilas Tentang Radio Komunitas Samudera FM .....	48
4.1.1. Sajian Informasi Radio Komunitas Samudera FM.....	51
4.2. Dinamika Perkembangan Radio Komunitas di Aceh Pasca Gempa dan Tsunami .....	53
4.2.1. Radio Komunitas Pasca Tanggap Darurat.....	58
4.3. Implementasi Perkembangan Radio Komunitas Dalam Penanggulangan Bencana .....	62
4.3.1. Mengelola Komunikasi dan Informasi Dalam Bencana .....	71
4.4. Prospek dan Kendala Radio Komunitas di Aceh Pasca Gempa dan Tsunami .....	82
4.4.1. Kesiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana.....	82
4.4.2. Prospek Radio Komunitas di Aceh .....	89
4.4.3. Kendala Radio Komunitas di Aceh .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Diskusi .....	95
5.2. Kesimpulan .....	99
5.3. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Media Konvensional Dengan Media Komunitas ...	32
Tabel 2.2. Indikator yang Membedakan Antara Radio Swasta, Publik dan Komunitas.....	38
Tabel 4.1. Data Radio Komunitas Samudera FM .....	48
Tabel 4.2. Lokasi dan Jumlah Radio Program AERNet/ARRNet Dalam Tahun 2006-2008 di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam .....	61
Tabel 4.3. Peran radio Komunitas Dalam Penanggulangan Bencana .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.Lokasi Simpul Radio Komunitas AERNet Dalam Masa Tanggap Darurat .....	56
---	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa memiliki peran penting dalam penyebaran informasi yang dikehendaki masyarakat. Berkembangnya media massa saat ini tak lepas dari peran serta pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut tentu saja memberi kontribusi yang cukup besar dalam terciptanya suatu keadaan yang kondusif.

Kelahiran dan perkembangan radio komunitas di Aceh setelah tsunami membuktikan bahwa radio komunitas sebagai salah satu bagian dari media massa yang memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat untuk bangkit dari keterisolasian informasi, sebagai media tanggap darurat dan sebagai media monitoring dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus di Aceh, tentunya komunitas yang dimaksud adalah korban tsunami yang berada di barak-barak pengungsian atau desa yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari gempa dan tsunami itu sendiri.

Menyadari keadaan semacam ini keberadaan radio komunitas di Aceh tidak sepenuhnya dibangun oleh komunitas sendiri tetapi dibantu oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat, mulai dari bantuan peralatan hingga pelatihan manajemen siaran radio komunitas. Lembaga ini bernama *Combine Resource Institution* (CRI) asal Yogyakarta yang fokus pada gerakan pengembangan media berbasis komunitas terutama radio komunitas di seluruh Indonesia. CRI mengelola dana hibah dari *Japan Social Development Fund* (JSDF) yang disalurkan melalui Bank Dunia (The World Bank).

Untuk mematangkan pendirian radio komunitas pada masa tanggap darurat, CRI merancang sebuah konsep media informasi tanggap darurat dalam sebuah

program yang diberi nama *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet). Dalam program ini berhasil didirikan beberapa radio komunitas yang terdapat di lima simpul dalam wilayah yang terkena gempa dan tsunami. Radio komunitas Samudera 107.7 FM adalah salah satu diantara kelima simpul itu. Radio komunitas ini berada di Desa Mancang Geudong Kecamatan Samudera wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Praktis setelah kehadiran radio komunitas Samudera FM di wilayah tersebut memberi harapan baru bagi korban tsunami yang berada disekitar lokasi pengungsian. Hal ini karena lokasi radio komunitas Samudera FM sengaja didirikan berdekatan dengan korban tsunami sehingga bisa digunakan sebagai media informasi tanggap darurat. Mengingat ketika itu pasca tsunami, para korban dan masyarakat kesulitan memperoleh akses informasi tentang kondisi kebutuhan mereka.

Apalagi setelah musibah gempa dan tsunami begitu banyak lembaga pemberi bantuan datang menyalurkan bantuan namun dalam penyaluran tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan korban karena koordinasi yang lemah. Sehingga tidak mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan kepentingan komunitas korban tsunami atas hal-hal yang konkrit, seperti sarana air bersih, layanan kesehatan, sarana pendidikan ataupun informasi keluarga yang hilang. Dengan perkataan lain, ketika itu dengan adanya media radio komunitas korban tsunami mampu mendorong agar kepentingan-kepentingan mereka masuk dalam kebijakan/keputusan publik di tingkat lokal.

Radio Komunitas di Aceh sekarang menjadi bagian dari proses pemulihan pasca tsunami. Walaupun pada tahap awal pendirian dibantu namun dalam prakteknya tidak tergantung kepada kepentingan yang memberi bantuan. Sesuai dengan prinsip radio komunitas bahwa yang lebih banyak berperan adalah partisipasi komunitasnya, baik dari sisi biaya operasional, maupun manajemen siaran. Radio komunitas dapat menjadi alat untuk merumuskan dan menyampaikan secara luas berbagai kepentingan-kepentingan komunitasnya.

Saat ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), jumlah radio komunitas terus bertambah. Setidaknya sampai penghujung tahun 2008 terdapat kurang lebih 30 lembaga penyiaran radio komunitas yang pengembangannya difasilitasi *Combine Resource Institution* (CRI). Radio komunitas di Aceh memang berkembang dengan kondisi dan dinamika yang berbeda sesuai dengan karakteristik, budaya dan adat kebiasaan setempat. Apalagi radio komunitas di Aceh tumbuh karena kondisi bencana alam. Sebagian besar radio komunitas berada di wilayah atau desa-desa yang terkena dampak tsunami. Oleh sebab itu karakteristik radio komunitas di Aceh sebagai radio komunitas berbasis desa dan mengambil peran untuk pemulihan pasca bencana. Meski demikian, dalam perkembangannya sekarang terdapat beberapa radio komunitas di wilayah yang tidak terkena tsunami. Hal ini dapat dimaklumi karena keberadaan radio komunitas di Aceh sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

## 1.2. Perumusan Masalah

Legalisasi radio komunitas sebagai lembaga penyiaran tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di Indonesia radio komunitas mulai menggeliat diawal tahun 2000 dan kini keberadaannya sudah semakin banyak. Khusus di Aceh, keberadaan radio komunitas baru muncul pasca gempa dan tsunami. Berdirinya radio komunitas di Aceh tidak terlepas dari peran lembaga pemberi bantuan setelah melihat lemahnya koordinasi dibidang komunikasi dan informasi dalam membantu korban. Oleh karena itu, paling tidak hasil penelitian ini dapat memberi gambaran tentang sejauhmana peran radio komunitas di Aceh sebagai media siaran radio yang kompeten dalam menyampaikan informasi tanggap darurat.

Seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, keberadaan radio komunitas di sana sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam memberikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pengungsian. Informasi seputar distribusi bantuan, kesehatan, informasi korban hilang dan selamat, pendidikan, *trauma healing* dan lain sebagainya dikemas dalam program yang sederhana dan seadanya.

Partisipasi masyarakat juga terlihat cukup tinggi, baik itu dalam pengelolaan maupun pemanfaatan radio komunitas sebagai media pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi ditingkatkan komunitas setempat. Terutama tentang peran dan partisipasi kaum perempuan dalam mengelola media informasi mereka ini. Kehadiran radio komunitas telah memberikan ruang dan wadah bagi korban gempa dan tsunami dalam mengaktualisasikan segala bentuk gagasan, semangat, kreatifitas yang selama masa konflik mengendap dan terabaikan.

Sejak kehadiran radio komunitas di Aceh, media jenis ini dapat menjadi sarana dalam pelestarian budaya lokal sehingga tidak berlebihan apabila radio komunitas dapat menunjukkan eksistensinya sebagai media informasi dan hiburan komunitas yang lebih kental mengangkat budaya-budaya lokal dalam banyak program acaranya. Dimana program-program budaya lebih menonjolkan karena mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang disusun dan dirancang dengan melibatkan partisipasi kelompok-kelompok kesenian dalam siaran radio komunitas.

Kini, radio komunitas sudah ada di Aceh dan menjadi media komunikasi, informasi, hiburan, pendidikan, syiar agama dan pengembangan serta pelestarian budaya lokal. Dalam konteks masa damai saat ini setelah penandatanganan MoU RI-GAM di Helsinki, diharapkan radio komunitas juga dapat berperan sebagai media monitoring dan media komunitas akar rumput dalam mensosialiasi dan terus mempertahankan perdamaian yang hakiki di Aceh.

Masalah penelitian ini dirumuskan dan dinyatakan ke dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan radio komunitas di daerah bencana selama masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami di Aceh
2. Bagaimana dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam perkembangan radio komunitas pasca gempa dan tsunami di Aceh



### 1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini dibatasi pada perkembangan radio komunitas Samudera 107.7 FM dalam masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami Aceh dengan menfokuskan pada teori-teori komunikasi massa. Bila hendak melihat radio komunitas dapat berperan dalam menghadapi bencana ataupun dalam situasi tanggap darurat, maka fungsi *surveillance* dalam teori komunikasi massa menjadi medium dalam menyebarkan dan menyampaikan peristiwa (*early warning system*).

Batasan yang perlu dipertegas bahwa keberadaan radio komunitas Samudera 107.7 FM didirikan untuk kepentingan media informasi tanggap darurat bagi korban gempa dan tsunami dilokasi pengungsian di desa Mancang Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu data dan jawaban yang dikumpulkan oleh peneliti dilapangan akan direpresentasikan sebagai hasil penelitian.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka terdapat dua tujuan pokok yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan radio komunitas dalam masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami di Aceh
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam perkembangan radio komunitas pasca gempa dan tsunami di Aceh

### 1.5 Signifikansi Penelitian

#### 1.5.1. Signifikansi Akademis

Studi-studi tentang radio komunitas, apalagi menyangkut aspek media tanggap darurat di daerah bencana belum ada. Menurut penelusuran penulis, sampai saat ini informasi seputar radio komunitas di Indonesia lebih banyak hasil pengamatan penggiat radio komunitas itu sendiri yang muncul di media massa. Meskipun ada beberapa hasil kajian penelitian tentang keberadaan radio

komunitas tapi jarang dipublikasikan, seperti studi yang dilakukan Imam Prakoso dan Nick Nugent. Mereka ini melakukan penelitian kecil-kecilan mengenai kondisi radio komunitas di Indonesia pada tahun 2005. Namun sayang dokumen resmi belum diterbitkan oleh *World Bank Institute* di Washington.

Namun demikian, penulis menemukan hasil studi mengenai radio komunitas diluar aspek media tanggap darurat seperti yang dilakukan oleh Afrizal (2004) tentang "Fungsi radio komunitas untuk pemberdayaan masyarakat desa". Atau Suryandaru (2004) tentang "Resistensi komunitas atas regulasi hegemoni regulasi negara dan media massa komersial".

Dengan demikian dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman mengenai peran serta sebuah lembaga penyiaran komunitas sebagai media informasi dalam kondisi pasca bencana, terutama ketika ia memainkan peran sebagai media tanggap darurat dengan berpedoman pada karakteristik radio komunitas.

#### **1.5.2. Signifikansi Praktis**

Dari segi praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan radio komunitas di Aceh. Seperti sudah dijelaskan pada awal penulisan penelitian ini bahwa keberadaan radio komunitas di Aceh baru terdengar ada setelah bencana gempa dan tsunami. Oleh karena itu, dinamika keberadaan radio komunitas di Aceh ini diharapkan menjadi pendorong bagi pengembangan radio komunitas lainnya di seluruh Indonesia.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Komunikasi Massa

Komunikasi massa diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan media massa. Alasan penggunaan media karena penyebaran pesan kepada masyarakat luas yang bersifat anonim dan heterogen. Komunikasi massa sebenarnya merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan media sebagai medium komunikasi dalam menyebarkan pengalamannya untuk mempengaruhi khalayak.

Dari berbagai cara berkomunikasi yang dilakukan dalam masyarakat, komunikasi massa merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting. Kegiatan komunikasi massa jauh lebih sukar dibandingkan bentuk komunikasi lainnya. Letak perbedaannya terutama pada kedudukan komunikator dan efektifitas penggunaan pesan kepada khalayak yang bersifat heterogen. Demikian pula dengan jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi massa tidak terbatas, sehingga kedekatan dalam berinteraksi jauh melintasi batas-batas geografis, demografis dan psikologis.

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah komunikasi yang menggunakan media massa seperti, surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Media ini memungkinkan menjangkau khalayak (komunikan) yang lebih luas dalam waktu serempak. Media tersebut ditujukan kepada massa, sehingga disebut media massa. Artinya, media yang digunakan dalam komunikasi massa.

River, Jensen dan Peterson (2003:18) mengatakan komunikasi massa dapat diartikan dalam dua cara, yakni, pertama komunikasi oleh media, dan kedua komunikasi untuk massa. Namun hal ini tidak berarti komunikasi massa adalah komunikasi untuk setiap orang. Media tetap cenderung memilih khalayak dan demikian sebaliknya khalayakpun memilih-milih media.

Sebenarnya jauh sebelum pendapat River, Jensen dan Peterson di atas muncul, telah ada definisi komunikasi massa yang sudah cukup jelas. Dimana Wright (1959) mendefinisikan komunikasi massa dalam tiga ciri, yaitu :

- a. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang lebih besar, heterogen dan anonim.
- b. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya sementara.
- c. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks dan mungkin membutuhkan biaya yang besar (Severin & Tankard, 2001:4)

Sementara itu Devito (1997:505-507) mengatakan, komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada lima variabel yang terkandung dalam setiap tindakan komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel tersebut bekerja pada media massa. Berikut variabel yang di maksud :

- a. Sumber.

Komunikator masa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. Walaupun biaya komunikasi massa sangat tinggi, sedikit sekali biaya yang dipikul penerima, setidak-tidaknya biaya yang bersifat langsung.

- b. Khalayak

Komunikasi massa ditujukan pada massa yang berjumlah sangat besar. Karena banyaknya jumlah khalayak dan karena sangat penting bagi media untuk memberikan apa yang diinginkan khalayak, pesan dari komunikasi massa harus difokuskan pada khalayak rata-rata. Dengan cara ini, media dapat merangkul khalayak sebanyak mungkin

c. Pesan.

Komunikasi massa merupakan milik umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dimedia-media massa oleh siapa saja.

d. Proses.

Ada dua proses dalam komunikasi massa. Pertama, proses mengalirnya pesan yang pada dasarnya proses satu arah. Kedua, proses seleksi yaitu proses dua arah.

e. Konteks.

Komunikasi massa berlangsung dalam konteks sosial. Media mempengaruhi konteks sosial dan konteks sosial mempengaruhi media. Dengan kata lain terjadi hubungan transaksional antara media dan masyarakat.

Salah satu definisi komunikasi massa yang paling sederhana dari Bittner (1980:10). Ia mengatakan bahwa komunikasi massa adalah sejumlah pesan yang dikomunikasikan/disampaikan melalui sebuah media massa kepada sejumlah besar orang. Kata sebuah media massa pada dasarnya mengandung arti yang cukup luas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendy (2003:79), bahwa komunikasi masa adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop.

Everett M. Rogers menyatakan bahwa selain media massa modern (surat kabar, majalah, radio dan televisi) terdapat juga media massa tradisional, seperti teater rakyat, juru dongeng keliling dan juru pantun. Umumnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem dimana pesan-pesan diproduksi, dipilih, disiarkan, diterima dan ditanggapi (Effendy, 2003).

Dari penjelasan diatas, bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media surat kabar, majalah, radio, televisi. Namun apapun bentuknya komunikasi massa akan terus berperan penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi massa menjadi mata dan teliga bagi masyarakat. Selain itu komunikasi massa juga memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang digunakan untuk dapat lebih memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat.

### 2.1.1. Fungsi Komunikasi Massa

Joseph A. Devito (1997) dalam bukunya *Komunikasi Antar Manusia*, menyebutkan tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam memahami fungsi-fungsi media massa. Pertama, setiap kali kita menghidupkan televisi, mendengarkan siaran radio, maupun membaca surat kabar, kita melakukannya karena alasan tertentu yang unik. Kedua, komunikasi massa menjalankan fungsi yang berbeda bagi setiap khalayak secara individual. Ketiga, fungsi yang dijalankan komunikasi massa bagi sembarang orang yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain.

Menurut Devito, meskipun fungsi media yang paling jelas adalah menghibur, akan tetapi fungsinya yang terpenting adalah meyakinkan (*to persuade*). Persuasi bisa datang dalam bentuk: (1) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; (2) mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; (3) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan (4) Memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu.

Fungsi komunikasi massa yang dicetuskan oleh Harold D. Laswell (1948), secara umum berfungsi untuk: (1) Pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*); (2) Pertalian dan; (3) Transmisi warisan sosial/budaya. Sedangkan Joseph R. Dominick (1981) dalam bukunya *The Dynamics of Mass Communication* mendefinisikan fungsi komunikasi massa sebagai berikut: (1) *surveillance* (pengawasan); (2) *interpretation* (interpretasi); (3) *linkage* (hubungan); (4) *socialitation* (sosialisasi); dan (5) *entertainment* (hiburan).

Walaupun fungsi komunikasi massa antara Laswell dan Dominick secara tersurat berbeda-beda, namun pada hakekatnya mempunyai kesamaan dan bersifat melengkapi antara keduanya. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh fungsi komunikasi massa dari Dominick. Dimana fungsi pengawasan dan interpretasi dari Dominick hakekatnya sama dengan fungsi pengawasan sosial dari Lasswell. Lalu fungsi hubungan dari Dominick pada hakekatnya juga mempunyai kesamaan dengan fungsi korelasi sosial dari Lasswell. Sedangkan fungsi hiburan dari Dominick merupakan fungsi tambahan dari ketiga fungsi komunikasi massanya Lasswell.

Bila hendak melihat fungsi komunikasi massa dapat berperan dalam menghadapi bencana ataupun dalam situasi tanggap darurat, maka *surveillance* merupakan fungsi pengawasan lingkungan yang berupaya untuk pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai berbagai peristiwa terjadi di dalam dan di luar lingkungan masyarakat. Asumsi dari *surveillance* media massa, apakah itu surat kabar, televisi, radio menjadi medium untuk menyebarkan dan menyampaikan segala peristiwa dan pengaruhnya, sehingga dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat luas luas.

Dari pandangan Lasswell dan Dominick ini sangat jelas melihat bahwa peran komunikasi massa juga berfungsi sebagai *early warning system* (tanggap darurat) terhadap suatu peristiwa, termasuk peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami. Fungsi pengawasan lingkungan ini menjadi tanggung jawab media massa untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai institusi sosial. Sementara itu, fungsi pengawasan instrumental adalah menyampaikan atau menyebarkan informasi yang mempunyai kegunaan atau dapat membantu masyarakat korban bencana alam dalam kehidupan sehari-hari.

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan penafsiran media ingin mengajak khalayak untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersona atau komunikasi kelompok. Sehingga media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang yang tertimpa musibah dalam

membentuk *linkage* (pertalian) berdasarkan kepentingan dan nasib yang sama tentang sesuatu.

Fungsi *socialitation* (sosialisasi) mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya hampir semua media menjalankan fungsi *entertainment* (hiburan). Fungsi media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan mendengarkan siaran radio, membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran khalayak segar kembali ditengah situasi pemulihan pasca bencana.

Seperti dikatakan Devito (1997) fungsi komunikasi massa yang tidak banyak disadari oleh kita semua adalah terciptanya rasa kebersatuan, dimana kemampuan untuk membuat kita merasa menjadi anggota suatu kelompok. Lebih-lebih tayangan media massa membuat seseorang yang kesepian merasa menjadi anggota sebuah kelompok yang lebih besar setelah menerima pesan dari media massa.

## **2.2. Penyiaran Radio Sebagai Media Komunikasi Massa.**

Tentu saja komunikasi massa membutuhkan medium dalam mengirimkan pesan. Seperti radio sebagai salah bentuk komunikasi massa yang menggunakan gelombang siaran untuk mengirimkan pesannya pada khalayak. Namun komunikasi massa merujuk pada keseluruhan institusinya yang merupakan pembawa pesan, yang mampu menyampaikan pesan-pesan tersebut nyaris secara serentak. Kemampuan untuk menjangkau ribuan atau bahkan jutaan orang merupakan ciri dari komunikasi massa

Lent dalam Jahi (1998) mengatakan, radio sebagai media modern yang banyak dimiliki oleh warga masyarakat negara negara berkembang ternyata merupakan media yang paling sering menyiarkan kesenian rakyat keseluruh



penjuru negeri. Dukungan media massa diperlukan oleh karena media massa dapat menumbuhkan suasana yang kondusif terhadap pembangunan.

Oleh karenanya, dalam masyarakat modern, gambaran tentang lingkungan yang jauh diperoleh dari media massa. Masyarakat tradisional yang bergerak kearah modernisasi juga mulai menggantungkan pengetahuannya pada media massa. Terpusatnya industri media massa modern pada dikota kota besar menyebabkan informasi yang disampaikan melupakan desa. Masyarakat membutuhkan informasi sesuai dengan kebutuhan dan berguna bagi kehidupan kesehariannya.

Radio sebagai media komunikasi massa mempunyai beberapa fungsi yang esensial, yaitu :

- a. Melayani suatu informasi atau fungsi pengawasan
- b. Melayani suatu *agenda-setting* dan fungsi interpretasi
- c. Membantu kita untuk membuat kreasi dan mempertahankan hubungan dengan berbagai kelompok dalam masyarakat
- d. Membantu proses sosialisasi dan pendidikan kita
- e. Membujuk kita untuk memperoleh atau mendapatkan item-item khusus atau menerima ide-ide khusus
- f. Menghibur kita (Gamble, 1986:15).

Dari semua media yang ada saat ini radio dapat dikatakan sebagai saluran informasi dan komunikasi yang efektif karena televisi belum tersebar luas di seluruh pelosok dunia, pada kenyataannya masih ada penduduk desa belum memiliki televisi, sedangkan gelombang radio dapat mencapai hampir setiap sudut planet kita (Fraser & Estrada, 2001). Sedangkan media cetak seperti koran dan majalah belum dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang karena masalah *illiteracy* (buta huruf).

Pengetahuan pada *illiterates* mengenai apa yang terjadi disekelilingnya, dinegaranya dan diluar negaranya didengarnya melalui berita yang ada di radio. Oleh karena itu, radio merupakan penghubung manusia dengan dunia luar. Radio

merupakan satu-satunya saluran untuk menyampaikan informasi, pendidikan dan hiburan tanpa mengenal jarak dan *illiteracy*. Radio juga merupakan medium elektronik utama milik masyarakat tak mampu karena radio melampaui batas-batas keterasingan wilayah dan dapat di akses oleh mereka yang buta huruf serta merupakan media yang paling terjangkau untuk disiarkan dan diterima (Fraser & Estrada, 2001).

Radio sebagai salah satu bagian dari komunikasi massa pada perkembangannya telah mendapat tempat tersendiri, baik bagi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Ini karena radio memiliki sifat yang sangat pribadi di antara semua media massa. Komunikan dapat mendengarkan radio siaran di manapun ia berada tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu.

Tapi penyiaran radio memiliki kelemahan, seperti yang dikatakan Meeske (2003), bahwa :

a. *Radio is aural only.*

Satu-satunya cara yang diandalkan radio untuk menyimpan pesan adalah bunyi (*sound*). Radio tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat gambar. Untuk membayangkan kejadian sesungguhnya, pendengar akan menggukannya imajinasinya sendiri.

b. *Radio message are short lived.*

Yang namanya pesan radio hidupnya hanya sebentar (*shord lived*). Pesan radio bersifat satu arah, sekilas dan tak dapat ditarik lagi begitu diudarakan. Karena itu, menyampaikan pesan melalui radio bukan pekerjaan main-main. Tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab.

c. *Radio listening is prone to distraction.*

Mendengarkan radio itu rentan dengan gangguan. Radio hanya berurusan dengan satu indra saja, yaitu pendengaran. Begitu pendengaran terganggu maka tak ada lagi cerita radio dalam kehidupan seseorang.

Memang kelemahan lain terdapat pada media radio, seperti komunikasi berlangsung satu arah dan pesan yang sampai sekilas, tetapi tetap saja radio banyak dipakai oleh masyarakat luas di seluruh dunia. Selain mudah di dapat dan murah, siaran radio lebih bebas dinikmati. Asumsi ini ada benarnya seperti dikatakan Effendy (1991:14) bahwa seseorang dapat mendengarkan radio sambil berjalan, membaca, mencuci dan lain sebagainya. Keuntungan lain dari radio siaran dilihat dari sasarannya yang bersifat santai. Orang dapat mendengarkan radio sambil makan, tidur-tiduran, bekerja dan tidak demikian dengan media massa lainnya.

Sedangkan aktor-faktor yang menjadi kekuatan radio menurut Ardianto (2005), antara lain:

a. *Daya Langsung.*

Yang dimaksud dengan daya langsung radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan dan penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat. Sebuah pesan yang disampaikan melalui surat kabar akan membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu lama. Pemberitaan dengan surat kabar harus disusun secara panjang, diset, dikoreksi, dicetak, dan diangkut kepada para agen, kemudian dari agen disebarkan pada para pelanggan. Sedangkan dalam radio siaran, berita yang sudah dikoreksi dan sudah dicek kebenarannya dapat langsung disiarkan, bahkan radio siaran dapat menyiarkan suatu peristiwa yang tengah berlangsung melalui siaran reportase atau siaran pandangan mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa radio siaran seharusnya lebih aktual daripada surat

kabar, sekalipun surat kabar saat ini sudah mengalami kemajuan dengan ditemukannya teknik cetak jarak jauh.

b. Daya tembus.

Melalui radio siaran, orang dapat mendengarkan siaran berita dari BBC di London, atau ABC di Australia. Dengan mudah kita dapat memindahkan channel dari stasiun radio siaran satu kepada stasiun radio siaran lainnya, padahal jarak Indonesia dengan Inggris atau Australia sangat jauh. Oleh karena itu radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan.

c. Daya tarik.

Yang dimaksud dengan daya tarik karena disebabkan oleh sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya, yaitu musik, kata-kata dan efek suara.

Radio siaran dirasakan begitu besar manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fungsi radio itu sendiri yang dapat memberikan informasi, hiburan dan pendidikan bagi individu ataupun masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya, radio siaran sangat bertumpu pada program-program yang telah disusun. Program-program tersebut merupakan pencampuran dari fungsi-fungsi radio siaran sebagai media hiburan, informasi dan pendidikan. Oleh karena itu dalam proses komunikasi massa unsur pendengar banyak diteliti karena sasaran yang kompleks ini menyangkut berbagai segi sosiologi, psikologis, edukatif dan kultural.

### 2.2.1. Fungsi Informasi Penyiaran Radio

Salah satu fungsi radio yang erat kaitannya dengan masalah yang penulis bahas adalah bahwa radio memiliki fungsi sebagai media informasi bagi pendengarnya. Effendy (1989) mengemukakan pendapatnya mengenai informasi sebagai berikut :

- a. Suatu pesan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang yang baginya merupakan hal-hal baru yang dikatakannya.
- b. Data yang telah di olah untuk disampaikan kepada yang memerlukan atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal.
- c. Kegiatan menyebarkan suatu pesan yang disertai penjelasan, baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi.

Sedangkan menurut D. Lawrence dan Wilbur Schramm mengatakan bahwa pada hakekatnya informasi sebagai mempengaruhi ketidakpastian dalam suatu informasi dimana terdapat pilihan antara berbagai kemungkinan (Setiadi, 1977).

Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa informasi dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan di mana seseorang dihadapkan kepada berbagai pilihan yang memerlukan suatu tindakan. Dengan demikian dari penjelasan di atas informasi adalah untuk mengurangi keragu-raguan dalam situasi tertentu. Ini berarti informasi dapat menolong atau menunjang seseorang, kelompok, masyarakat dan suatu lembaga dalam melihat situasi yang dihadapi tentang suatu masalah.

Menurut Y. Joko Suratmo dalam Munthe (1996) menjelaskan tentang informasi sebagai suatu istilah yang tidak asing dalam segala bidang kegiatan, termasuk dalam kegiatan komunikasi. Kata informasi merupakan unsur yang amat berperan, sebab informasi merupakan menu, kegiatan utama dalam kegiatan komunikasi. Pesan-pesan yang diterima seseorang melalui media radio yang dikemas pada setiap acaranya dapat merupakan informasi baginya. Sejak kemunculannya, radio sudah diyakini akan menjadi media informasi yang bersifat massal. Berkat kemajuan teknologi selama betahun-tahun, radio dengan cepat memberikan daya tarik bagi pendengarnya.

Daya serap informasi dari radio pernah diteliti oleh Alfred Mehrabian (1966). Dalam eksperimen psikologis ini ia berusaha memetakan kadar makna

atau keterserapan informasi yang bisa diperoleh dari sekian banyak media. Berdasarkan data yang dihasilkan dari sampel yang luas diperoleh hasil rumusan bahwa 38 % makna berasal dari faktor audio. Radio adalah media yang menyampaikan pesan menggunakan sarana audio. Maka keterserapan informasi atau kemampuan pendengar memaknai pesan radio tidak lebih 38%. Rumusan Mehrabian ini dapat menjelaskan mengapa informasi melalui radio mesti dikemas ringan dan padat. Dengan demikian pengemasan pesan melalui radio harus diupayakan agar bisa memaksimalkan faktor 38 % tersebut (Astuti, 2008).

### 2.2.2. Model Komunikasi Pembangunan

Pada waktu lalu beberapa pakar komunikasi berpendapat bahwa radio memiliki peran penting dalam pembangunan. Radio dianggap mampu berperan sebagai kekuatan pengganda atau *magic multipliers* yang mampu mengubah anggota masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang mobile. Menurut Pye (1967) radio sebagai salah satu media massa juga diharapkan mampu berperan sebagai pengawas umum (*inspector general*) bagi kebijaksanaan dan tindakan pemerintah. Dalam masyarakat yang sedang membangun, informasi dianggap mampu memainkan tiga macam peranan, yaitu untuk mengawasi dan melaporkan kembali (*the watchman role*), membantu dalam memutuskan kebijaksanaan, mengarahkan dan mengatur (*the policy role*) dan mendidik anggota-anggota baru dalam masyarakat membawa dan membekali mereka dengan keahlian dan kepercayaan yang sesuai dengan masyarakat tersebut (*the teacher role*).

Hal tersebut diatas secara empiris dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi massa mampu menciptakan suatu iklim bagi perubahan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai baru dan membantu masyarakat dalam menemukan norma-norma baru dan kesenangan dalam periode transisi (Schramm, 1964).

Ketika berbicara peran media radio dalam pemberdayaan masyarakat, maka dapat dilihat dalam paradigma pendekatan komunikasi dalam proses pembangunan. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi sejauhmana media massa berperan dalam proses pembangunan dapat ditelusuri dalam kerangka

model-model komunikasi pembangunan. Menurut Srinivas R. Melkote (1991) ada 3 model komunikasi yang bisa dijadikan rujukan dalam melihat peran media massa dalam proses pembangunan itu, yaitu:

*a. Pendekatan Efek Komunikasi*

Inilah model awal tentang efek media massa, dinyatakan bahwa efek media massa bersifat langsung, kuat (*power full*) dan seragam terhadap sasarannya. Model ini dikenal dengan nama *The Bullet Theory* atau dengan lain. *The Hypodermic Needle*. Lasswell, Shanon dan Weaver, Berlo, Schram dsb adalah pakar komunikasi model ini. Di dalam model seperti ini, komunikasi berjalan linier dan satu arah dari sumber yang kuat kepada khalayak yang pasif. Terlepas dari kritik yang muncul dalam model komunikasi ini, paling tidak didapat gambaran bahwa radio mempunyai pengaruh atas khalayak sasarannya. Schram (1964) mengatakan media massa sebagai "*bridge to a wider world*".

Laksmana Rao (1963) dalam kajian klasiknya menyatakan media massa merupakan penggerak utama dalam proses pembangunan. Kesimpulan ini didapat setelah ia melakukan penelitian eksperimental terhadap dua desa di India. Rao memilih desa Kathooru yakni sebuah desa yang akan dikembangkan menjadi desa modern dan desa Pathooru sebuah desa yang terisolasi dan dibiarkan tetap berada dalam budaya dan nilai-nilai tradisionalnya.

*b. Pendekatan Difusi Inovasi*

Model ini masih berkaitan dengan model efek media massa. Bagaimana kemampuan pesan media massa dan pemuka pendapat (*opinion leader*) yang menciptakan pengetahuan tentang ide dan praktek-praktek kehidupan baru (*inovasi*) dapat mempengaruhi agar khalayak sasarannya bersedia mengadopsinya. Model ini dipercayai sebagai jalur penting pembangunan individu dari tradisional menjadi individu yang modern dengan menerima dan mempraktekkan ide-ide baru yang berasal dari sumber eksternal ke dalam sistem sosial mereka.

Evert Rogers (1971), perintis model ini mengidentifikasi elemen-elemen difusi dengan menyatakan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan dikomunikasikan melalui saluran tertentu kepada anggota sistem sosial dalam jangka waktu tertentu. Penelitian difusi-inovasi menegaskan pentingnya komunikasi dalam proses modernisasi dalam lingkup masyarakat lokal. Media massa berperan sebagai fasilitator dan deseminator inovasi.

Model *the bullet, hypodermic needle* maupun difusi-inovasi arus informasinya bersifat *topdown* dari pejabat pemerintah kepada masyarakat. Dengan arus seperti itu, tidak jarang terjadi penolakan terhadap pesan-pesan pembaharuan oleh masyarakat karena dinilai oleh masyarakat pesan-pesan tersebut dapat merugikan mereka. Masyarakat dalam model komunikasi difusi-inovasi hanya dijadikan obyek pembangunan tanpa mereka diberi kesempatan untuk turut serta menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka sendiri.

#### d. *Communication Support Development*

Upaya menyempurnakan kelemahan model-model komunikasi pembangunan sebelumnya pada dekade tahun 80-an, lahir sebuah pendekatan baru dalam komunikasi pembangunan yang dikenal dengan *Communication Support Development (CsD)*. Model CsD, masyarakat diberi kesempatan mengakses dalam menyampaikan suara hatinya melalui media massa terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, komunikasi harus dilaksanakan secara dua arah. Masyarakat harus mendiskusikan bersama-sama dan kemudian menggunakan media komunikasi, serta informasi data yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Komunikasi yang memperlihatkan hati nurani masyarakat seperti ini akhirnya dikenal sebagai *Participatory Communication*.

Diaz-Bordenave (1989) menguraikan fungsi media massa kaitannya dengan *Participatory Communication* sebagai berikut :

- a. Media massa membantu dalam pembangunan identitas budaya masyarakat.



- b. Media massa sebagai alat bagi warga negara untuk mengekspresikan diri.
- c. Media massa memfasilitasi mengungkapkan persolan masyarakat
- d. Media massa memberikan pelayanan sebagai alat untuk mendiagnosa persolan-persoalan masyarakat.

### 2.2.3. Penyiaran Radio Dalam Teori Komunikasi

Studi komunikasi massa secara umum membahas dua hal pokok (Sendjadja,2002), yaitu *pertama*, bahwa studi komunikasi massa yang melihat peran media massa terhadap masyarakat luas beserta institusi-institusinya. Pandangan ini menggambarkan keterkaitan antara media dengan berbagai institusi lain seperti politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Teori-teori yang berkenaan dengan hal ini berupaya menjelaskan posisi atau kedudukan media massa dalam masyarakat dan terjadinya saling mempengaruhi antara berbagai struktur kemasyarakatan dengan media.

*Kedua*, studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media dengan audiennya, baik secara kelompok maupun individual. Teori-teori mengenai hubungan antara media audien terutama menekankan pada efek-efek individu dan kelompok sebagai hasil interaksi dengan media. Teori-teori itu umumnya berupaya menjelaskan fenomena media massa pada suatu proses, yaitu bagaimana proses berjalannya pesan, efek pesan itu kepada penerima (masyarakat) dan umpan balik yang diberikan. Secara tradisional teori komunikasi massa itu, terdiri dari teori-teori komunikasi massa linear dan teori komunikasi massa sirkular. Namun selain itu, terdapat pula teori komunikasi massa yang lebih mutakhir yang merupakan pemikiran terbaru di bidang komunikasi massa.

Dalam menjawab pertanyaan siapa yang menjadi pengirim pesan dalam proses komunikasi massa, maka teori Stimulus-Respons (S-R Theory), teori Lasswell dan tero DeFleur tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Pada kenyataannya pesan atau berita yang dikirimkan media massa kepada audiennya tidak selalu berupa perkataan, ucapan atau kenyataan dari pengirim pesan baik individu atau organisasi. Siapakah yang menjadi komunikastor ketika

media massa menyiarkan peristiwa bencana alam tsunami di Aceh atau peristiwa lainnya. Dengan demikian, proses komunikasi massa tidak selalu diawali dengan adanya peristiwa.

Joseph R. Dominick dalam bukunya *The Dynamic Of Mass Communication* (2002) memperkenalkan teori komunikasi massa dengan urutan sebagai berikut: (1) Lingkungan; (2) Media Massa; (3) Saluran; (4) Khalayak; dan (5) Umpan Balik. Dalam model ini, proses komunikasi tidak diawali dengan komunikator tetapi dari lingkungan. Dengan demikian, menurut Joseph Dominick lingkunganlah yang membawa informasi yang kemudian diterima oleh media massa.

Informasi yang diterima oleh media massa dari lingkungan dapat berupa berita (*news*) dan berita (*entertainment*) sementara berita dapat berupa peristiwa atau ucapan dan pernyataan dari individu atau organisasi. Informasi itu harus melalui tahap penyaringan oleh organisasi media massa. Dengan demikian, media massa bertindak sebagai *gatekeeper* yang melakukan *decoding*, interpretasi dan *encoding* sehingga menjadi pesan dan kemudian dikirimkan kepada khalayaknya. Selanjutnya atas pesan yang diterimanya dan sebagian di antara khalayak sasaran melakukan umpan balik.

Model Dominick ini merupakan adaptasi dari model komunikasi Wilbur Schramm (1954) yang mirip juga dengan model komunikasi massa oleh Westley dan Maclean (McQuail 1994). Menurut Westley dan Maclean (1957) dalam komunikasi massa, media massa melalui pesan wartawannya, berada pada posisi diantara "masyarakat" dan "audiennya."

Sebagaimana Dominick, Westley, dan Maclean tidak memulai model komunikasinya dengan komunikator tetapi dengan peristiwa dan pernyataan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, model yang diajukan Westley dan Maclean adalah sebagai berikut : (1) *Events and "voices" in society*; (2) *Channel*; (3) *Messages*; (4) *Receiver*. Namun kelemahan model Westley dan Maclean ini adalah tidak menggambarkan adanya umpan balik.

### 2.3. Konsep Komunitas

Dalam mengkaji karakteristik komunikasi suatu komunitas, diperlukan penelaahan terlebih dahulu tentang sistem sosialnya. Hal ini berarti menguraikan tentang peran, institusi sosial, dan pola interaksi yang ada pada komunitas tersebut. Ruang lingkup komunitas lebih sempit dari pada masyarakat.

Komunikasi komunitas merupakan perbatasan antara komunikasi publik berskala kecil dan media massa berskala besar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan komunikasi publik adalah suatu aktivitas manusia yang fundamental, perkembangan kepentingan yang melakukan transformasi pengalaman individu ke dalam pengalaman kolektif publik (Gazali, 2004:9-10). Komunikasi publik berlangsung dalam ruang publik atau ranah publik. Ranah publik adalah suatu institusi sosial yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman autentik dan kebutuhan relevan untuk kelompok tertentu atau untuk individu dalam kategori tertentu ke dalam suatu pengalaman sosial kolektif (Negt & Kluge, 1972: 47).

Selama ini, ulasan-ulasan memperlihatkan bahwa ada suatu kelebihan pada komunikasi publik berskala kecil. Bentuk ekspresi atau pernyataan publik dalam suatu kondisi sosial lokal yang spesifik ikut berperan mewarnai komunikasi komunitas. Contohnya, pertemuan publik seperti kumpul-kumpul adalah komunikasi dilingkungan rumah atau warung, pertemuan, gambar cetakan yang disebarakan dilingkungannya (Rachmiatie, 2007:60).

Pada poin ini, kajian komunikasi tertahan pada fakta bahwa riset komunikasi biasanya dibatasi pada media massa, khususnya yang berskala nasional. Riset komunikasi yang diarahkan pada komunitas umumnya terbatas. Untuk itu diharapkan lebih banyak lagi mempelajari khalayak dalam tingkat menengah lokal yang tunggal (*single local medium audience*) dan tidak mementingkan komunikasi lokal dalam bentuk lain. Riset komunikasi lokal telah dibatasi pada media lokal yang spesifik, isi media lokal yang spesifik, dan audiens media lokal yang spesifik pula (Bardoel & Haemens, 2003:5)

Komunitas dan ruang publik tidak mengecualikan fungsi media massa sebagai cara untuk mengorganisasi pengalaman sosial. Keduanya hanya menggabungkan fungsi media dalam komunikasi publik. Komunikasi publik dikonsepsikan pada tingkat individu sebagai elemen dari teori aksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi media dan interaksi komunikasi tidak dikaji sebagai aktivitas yang terisolasi, tetapi sebagai bagian integral dari orientasi aktif individu terhadap lingkungan fisik dan sosialnya.

Meskipun bertolak dari latar belakang teoretis yang berbeda, beberapa persamaan muncul pada kedua konsep komunitas dan ruang publik, diantaranya :

- a. Sama-sama ada minat khusus dalam mempelajari komunikasi publik berskala kecil.
- b. Sama-sama menawarkan pendekatan holistik dalam penelitian komunikasi lokal atau komunikasi komunitas (Rachmiati,2007:62).

Kedua konsep tersebut mengatasi prakiraan eksistensi dari satu ruang publik menyeluruh atau komunitas yang tercakup sebagai hasil langsung dari tekanan media massa. Kedua konsep tersebut menekankan eksistensi dari beberapa media massa independen atau media komunitas. Secara analitis, mereka membagi kategori-kategori dari individu yang berpartisipasi dalam komunikasi publik sebagai pengirim dan penerima berdasarkan pada topik yang dirasakan relevan untuk individu-individu tersebut. Lihat notasi komunitas interpretif oleh Lindolf (1988). Berdasarkan pada ketertarikan mereka secara umum, masyarakat mengatur komunitas dengan cara berpartisipasi dalam komunikasi publik.

Penjelasan di atas, meskipun terbentuk dari pemikiran yang berbeda, saling memengaruhi. Dalam arti bahwa konsep komunitas menekankan pada karakteristik kultural (struktur sosial, sistem sosial), sedangkan ruang publik lokal menekankan pada proses komunikasi dan relevansi topik yang spesifik sebagai motif komunikasi. Sejalan dengan kedua konsep tersebut adalah elemen komunikasi publik mengenai hal-hal yang relevan dengan proses komunikasi, dalam waktu yang sama yaitu membentuk memperkirakan identitas yang terbagi.

Konsep-konsep ini dapat dikembangkan menjadi proses komunikasi pada tingkat lokal dan sublokal yang sesuai dengan unit atau sistem sosial berdasarkan geografis. Dalam literatur komunikasi *Anglo Saxon*, ekspresi komunikasi komunitas mengacu pada struktur komunikasi dalam komunitas secara geografis atau karena kesamaan minat. Biasanya diyakini bahwa unit secara geografis adalah suatu komunitas minat yang kemudian muncul suatu ruang publik lokal tempat isu-isu yang relevan dikomunikasikan. Daripada menganggap bahwa media komunitas membentuk ruang publik semacam itu, akan lebih baik jika mengkaji terlebih dahulu pada tingkat apa minat komunitas muncul dalam sistem sosial. Oleh karena itu, suatu ruang publik muncul manakala penduduk membagi kepedulian pada topik-topik spesifik yang membentuk dasar bagi komunikasi lokal.

Pemahaman lebih mengenai komunikasi komunitas dapat membantu menjauhkan pemikiran kita dari pandangan yang terlalu menyederhanakan komunikasi sebagai proses linier, dan memandang komunikasi secara mekanis, sebagai transportasi informasi dari satu tempat ke tempat lain. Berikut ini bentuk komunikasi komunitas yang terkait dengan pola komunikasi yang berlangsung melalui media komunitas :

- a. Hubungan antara struktur komunikasi dengan struktur spasial/geografis.
- b. Hubungan antara struktur komunikasi dengan struktur sosial.
- c. Struktur komunikasi dalam kategori individu di mana topik lokal yang spesifik memiliki hubungan khusus (Hollander, 1988: 181-186).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, komunitas memiliki karakteristik yang dicirikan dengan adanya pembatasan dalam arti wilayah dan unit sosialnya. Faktor utama yang menjadi dasar suatu komunitas adalah adanya interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya sehingga menumbuhkan rasa keterikatan dan keakraban yang menimbulkan kenyamanan bagi anggotanya. Umumnya mereka kebiasaan-kebiasaan yang sama, meskipun hanya sebagian yang menjalankan tradisi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara ringkas konsep komunitas bisa dikemukakan sebagai berikut :

- a. Sebagai sistem pertengahan diantara masyarakat; sebagai makro sistem dan kelompok kecil sebagai mikro sistem.
- b. Memiliki populasi yang karakteristiknya teridentifikasi oleh perasaan saling memiliki dan kesadaran anggotanya sebagai bagian dari komunitas tersebut.
- c. Sebagai organisasi dan pertukaran dari kepentingan sesama anggotanya
- d. Memiliki fungsi fungsi yang satu sama lain.
- e. Beradaptasi dengan lingkungannya melalui pertukaran energi/potensi yang dimiliki masing-masing anggota.
- f. Menciptakan dan memelihara masing-masing organisasi serta kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan subsistem dan suprasistem masing-masing
- g. Anggota komunitas yang dimaksud tidak saja terdiri dari anggota yang secara fisik menempati tempat yang sama namun juga komunitas yang berdasarkan batas-batas psikis dan administratif (Rachmiate,2007:76)

### 2.3.1. Komunitas Pedesaan

Komunitas berasal dari istilah *community* yang berarti “semua orang yang hidup disuatu tempat” serta “sekelompok orang dengan kepentingan atau ketertarikan yang sama”. Dari definisi ini dapat dirumuskan tiga jenis komunitas dapat dirumuskan tiga jenis komunitas: (1) Komunitas yang terbentuk berdasarkan batasan-batasan geografis, misalnya Jakarta merujuk pada orang-orang yang tinggal didaerah Jakarta, atau komunitas Petamburan merujuk pada masyarakat yang mendiami wilayah Petamburan; (2) Komunitas yang terbentuk karena kesamaan identitas (Newby,1980). Komunitas Betawi merujuk pada orang-orang etnis Betawi asli di Jabotabek khususnya, komunitas Bugis merujuk pada kumpulan etnis bugis yang tinggal wilayah tertentu diluar daerah asalnya; dan

(3) Komunitas yang terbentuk karena kesamaan minat, kepedulian dan kepentingan. (Gazali,2003).

Faktor utama yang menjadi dasar suatu komunitas adalah adanya interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya sehingga menumbuhkan rasa keterikatan dan keakraban yang menimbulkan kenyamanan bagi para anggotanya. Umumnya mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sama, meskipun hanya sebagian yang menjalankan tradisi yang dimiliki. Seperti yang dikatakan Garna (1999) bahwa suatu kelompok manusia yang menempati suatu kawasan geografis yang terlibat dalam aktifitas ekonomi, politik dan juga membentuk suatu satuan sosial yang memiliki nilai-nilai tertentu serta rasa bersama.

Karakteristik yang membedakan komunitas dengan bentuk kelompok lain adalah adanya perasaan nyaman pada anggotanya untuk hidup dalam komunitas karena memiliki persamaan, baik dalam etnik, kebiasaan, bahasa sebagai faktor pengikat lainnya, seperti minat. Secara umum, tujuan dibentuknya suatu komunitas adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik psikis maupun fisik dalam suatu kondisi geografis.

Kondisi alam Indonesia yang memiliki letak geografis dan iklim tropis yang khas, sudah barang tentu kondisi pedesaan tidak tepat seperti konsep tersebut. Pada kenyataannya, pedesaan di Indonesia mungkin penggabungan dua atau tiga konsep, atau bahkan berbeda sama sekali dari konsep-konsep yang sudah dikemukakan sebelumnya (Rachmiatie, 2007). Meskipun demikian Horton dan Hunt (1999) mengatakan suatu ciri khas yang dapat ditemui diberbagai pedesaan di negara manapun dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Isolasi

Ciri kehidupan pedesaan yang paling menonjol adalah keterisolasiannya. Rumah yang terpencil ditengah-tengah ladang pertanian dan perkebunan, bahkan dipinggir hutan, seolah-olah terpisah satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Penduduk yang jumlah sedikit hidup menyebar. Oleh karena itu kontak antar individu jarang terjadi. Hubungan yang terjalin antara para warga

pedesaan umumnya dikenal umumnya bukan dikenal dari fungsionalnya saja seperti, petani, sopir, pedagang melainkan dari segi totalitas kepribadiannya dengan segenap aspek status dalam komunitasnya. Budaya ramah tamah muncul karena adanya kebutuhan sosial untuk mengetahui kabar berita dari orang luar, kontak dengan dunia luar, dan mengubah suasana yang monoton karena terisolasi.

b. Homogenitas.

Komunitas pedesaan pada umumnya memiliki latar belakang etnik dan budaya yang sama diantara anggotanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh migrasi para tetua mereka, yang diikuti jejaknya sehingga pada suatu wilayah tertentu cenderung memiliki etnik yang sama dan mengelompokan dirinya.

c. Pertanian

Hampir semua penduduk komunitas desa adalah para petani atau yang hidupnya mengandalkan hasil dari tanahnya. Bahkan guru, pedagang, pekerja sewaan, dokter, ulama dan semua orang akan terlibat dalam kehidupan pertanian. Masalah dan tugas yang dihadapi mereka yang umumnya sama bahwa betapa tidak berdayanya mereka dalam menghadapi kekuatan alam yang berada diluar kemampuan manusia.

d. Ekonomi Subsistem

Sistem ekonomi subsistem dan system tukar (*barter*) merupakan jalan keluar yang paling bermanfaat bagi komunitas pedesaan. Dalam sistem ini, orang desa cenderung bersikap curiga terhadap intelektualitas dan pengetahuan dari buku atau teori. Ketidakpercayaan dan ketidak senangan terhadap orang kota merupakan sikap orang desa dahulu. Citra umum tentang orang desa sebagai orang yang ramah, suka bekerjasama, konservatif, suka bekerja keras dan hemat, *etnosentris* dan bertoleransi merupakan hal yang benar. Walaupun kondisi tersebut telah banyak mengalami perubahan.



#### e. Revolusi Desa

Saat ini beribu-ribu desa kecil tak lagi merupakan komunitas yang berdikari. Adanya jalan yang dibuat untuk menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya, atau dengan perkotaan membuat keterbukaan isolasi pedesaan. Kondisi ini menyebabkan pergeseran-pergeseran, baik dibidang usaha, informasi, tempat rekreasi maupun yang lainnya. Dengan kata lain, terjadi perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan keterbukaan isolasi pedesaan tersebut. Aspek lain adalah terjadinya revolusi desa karena komersialisasi dan rasionalisasi pertanian. Tanpa adanya revolusi dibidang produktivitas pertanian, pertumbuhan kota menjadi sangat lamban karena tidak didukung oleh hasil produksi pertanian dari desa. Urbanisasi kehidupan di desa merupakan revolusi desa yang ditandai sukarnya mengidentifikasi orang desa hanya dengan melihat pakaian atau perilakunya. Meskipun masih terdapat beberapa perbedaan itu sudah semakin menipis. Juga termasuk pada permasalahan yang dihadapi, seperti kriminal, obat bius dan sejenisnya, antara penduduk desa dengan penduduk perkotaan tidak ada perbedaan.

Maka dari itu negara yang memiliki kemajemukan masyarakatnya seperti Indonesia diperlukan pembangunan suatu komunitas pedesaan. Keanekaragaman dalam etnik, bahasa, kepentingan, struktur, budaya, iklim, kondisi geografi mengakibatkan masing-masing memiliki karakteristik dari segi potensi wilayah, permasalahan kondisi manusia, rintangan dan peluang, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk itu dalam mengkaji masyarakat berdasarkan masing-masing komunitas, diperlukan data dan informasi yang mendalam untuk membangun secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas tersebut.

Jika dikaitkan dengan komponen komunikasi, menurut Rachmiate (2007) pola komunikasi yang berlangsung dalam komunitas pedesaan dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Model komunikasi yang berlangsung adalah konvergensi, buka linier. Posisi komuniator atau yang berperan sebagai narasumber umumnya

berasal dari komunitas itu sendiri. Inovator pada awalnya merangkap sebagai komunikator yang memfasilitasi proses komunikasi melalui media komunitas.

- b. Secara fisik, media komunitasnya populer, dalam arti mudah dioperasionalkan, murah dan sesuai dengan kondisi sumber daya manusia dan ekonomi dipedesaan. Untuk itu dalam menyebarkan isi siaran dan mengumpulkan informasi sebagai bahan siaran, proses pengolahannya menggunakan metode dan teknik yang sederhana serta otomatis.
- c. Bagi khalayak, sebagai bagian dari komunitas, komunikasi umum yang sedang berlangsung tersebut dianggap sebagai kegiatan komunikasi sehari-hari karena komunikator dan narasumbernya telah diketahui dan dikenalnya secara akrab sehingga mirip kegiatan komunikasi antarpersona yang digunakan secara terbuka.
- d. Proses komunikasi melalui media komunitas bersifat interaktif. Artinya, khalayak tidak menganggap media dan isi media itu jauh dari dirinya, tetapi ada unsur kedekatan sebagai kekuatannya. Khalayak tetap menerima dan turut aktif menyampaikan informasi-informasi yang terjadi dilingkungannya, baik secara langsung mendatangi studio radio yang relatif dekat /ada disekitar tempat tinggalnya maupun melalui saluran telepon jika sudah dimungkinkan. Melalui proses ini pula kebutuhan aktualisasi diri khalayak dapat dipenuhi.

#### **2.4. Media Penyiaran Komunitas**

Dibanyak negara demokratis, media penyiaran komunitas telah diakui dalam kebijakan media nasional. Bahkan secara umum, negara dan swasta justru mendukung media penyiaran komunitas melalui alokasi frekuensi dan donasi dana yang tidak mengikat. Dalam konteks makro, media penyiaran komunitas juga banyak digunakan untuk menguatkan ikatan kelompok entitas tertentu, selain media berita dan informasi komunitas.

Pengertian komunitas dalam konteks media komunitas bisa dalam dua batasan diatas, akan tetapi dalam konteks mikro ada yang menyebutnya dengan sebuah sistem sosial lokal. Alasan utamanya, semakin mikro daerah operasi sebuah media komunitas akan semakin besar kemungkinan menjalankan prinsip dari, oleh dan untuk komunitas.

Satu komunitas adalah sekelompok masyarakat yang berbagi kesamaan dalam hal karakter dan atau minatnya (Fraser & Estrada, 2001). Dengan melihat penjelasan yang tersebut diatas, maka radio komunitas Samudra FM termasuk dalam lembaga penyiaran komunitas (radio komunitas).

Media komunitas secara sederhana bisa didefinisikan sebagai media dari, oleh dan untuk komunitas. Tapi istilah komunitas itu sendiri setidaknya mengacu pada dua hal. Pertama, komunitas dalam pengertian geografis, misalnya desa Cimanggis atau Kecamatan Cibinong. Kedua, komunitas dalam pengertian psikologis yaitu komunitas yang terbentuk atas dasar identitas yang sama atau minat kepentingan, kepedulian terhadap hal yang sama (Gazali, 2002).

Kegunaan dan fungsi media komunitas tidak sama dengan fungsi media massa konvensional yang selama ini dikenal, yaitu untuk informasi, edukasi, pengarah, kontrol sosial, dan hiburan. Media komunitas memiliki kegunaan yang khas sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Selanjutnya, dilihat dari sudut pandang kepentingan nasional, media komunitas tidak merugikan media swasta yang ada saat ini.

Manfaat penyiaran komunitas bagi sistem penyiaran nasional bersifat positif sesuai dengan bahasan Ishadi (2004) yang menyebutkan bahwa kehadiran media komunitas secara fisik adalah :

- a. Dapat mengisi *blank spot* penyiaran.
- b. Bisa menjadi pendukung dari penyiaran nasional.
- c. Dapat menjadi sumber dari acara-acara yang diangkat pada tataran lokal maupun nasional

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Media Konvensional Dengan Media Komunitas**

<b>Unsur-Unsur</b>	<b>Media Massa Konvensional</b>	<b>Media Komunitas</b>
1. Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok, Negara, perorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga Komunitas</li> </ul>
2. Tujuan & Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi, hiburan, pendidikan dan kepentingan komersil/bisnis. Khalayak luas, publik sasaran khusus, klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi, pendidikan</li> <li>• Bimbingan (guidance). Hiburan tetapi tidak komersial atau mencari laba</li> <li>• Komunitas yang bersifat terbatas</li> </ul>
3. Isi (content)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aneka informasi yang bersifat universal, menyentuh berbagai segmentasi khalayak.</li> <li>• Isi dirancang oleh lembaga media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang terpilih sesuai dengan kondisi dan kepentingan komunitas</li> <li>• Isi di rancang oleh lembaga media bersama anggota komunitas</li> </ul>
4. Karakteristik Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiarkan/distribusi secara luas.</li> <li>• Cenderung satu arah</li> <li>• Feedback cenderung tertunda</li> <li>• Sistem operasional rumit dan mahal.</li> <li>• Peran narasumber dengan sasaran terpisah jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiaran/distribusi terbatas</li> <li>• Bersifat interaktif</li> <li>• Feedback cenderung langsung</li> <li>• Sistem lebih sederhana dan murah</li> <li>• Sasaran bias menjadi narasumber/peran tak jelas</li> </ul>
5. Pengawasan & Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bergantung pada sistem negara, bisa pemerintah, pasar/konsumen atau komisi dewan khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota komunitas dan perwakilan yang dtunjuk oleh warga</li> </ul>

**Sumber : Rachmiatie (2007:43)**

Secara umum, penyiaran komunitas (Mufid, 2005:77) memiliki ciri-ciri :

- a. Tujuan  
Untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik.
- b. Kepemilikan dan kontrol  
Di bagi diantara warga, pemerintahan lokal dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Isi  
Diproduksi dan diorientasikan untuk kepentingan lokal.
- d. Produksi  
Melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan.
- e. Distribusi  
Melalui udara, kabel dan jaringan elektronik.
- f. Audien  
Bisanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis
- g. Pembiayaan  
Secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklan dan subsidi pemerintah.

Lembaga penyiaran komunitas merupakan layanan nirlaba yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas tertentu, umumnya melalui yayasan atau asosiasi. Tujuan dari lembaga penyiaran komunitas adalah untuk melayani dan memberikan manfaat kepada komunitas dimana lembaga penyiaran tersebut berada. Berdasarkan dampak yang diberikannya, sebetulnya lembaga penyiaran komunitas dapat dianggap sebagai lembaga penyiaran publik, namun lembaga penyiaran komunitas memberikan layanannya lebih kepada komunitas daripada kepada seluruh bangsa, seperti yang biasanya dilakukan oleh lembaga penyiaran publik. Lebih dari itu lembaga penyiaran komunitas menggantungkan dan harus menggantungkan diri terutama pada sumberdaya-sumberdaya yang ada di tengah komunitasnya (Franser & Estrada, 2001).

## 2.5. Radio Komunitas

Selama dua dasawarsa terakhir badan dunia UNESCO telah ikut mendanai sejumlah penelitian dan telah menerbitkan berbagai risalah dengan tema media komunitas, seperti *Akses: Beberapa Model dari Dunia Barat* mengenai 'Media Komunitas' oleh Frances Berrigan yang diterbitkan tahun 1977. Tahun 1981, topiknya diperluas ke negara-negara berkembang dalam sebuah penelitian yang kembali dilakukan Berrigan berjudul *Komunikasi Komunitas; Peran Media Komunitas Dalam Pembangunan*. Peter Lewis dengan judul penelitian *Media Untuk Penduduk Kota*. Tahun-tahun berikutnya UNESCO membangun sejumlah stasiun radio komunitas di Afrika (Homa Bay, 1982) dan Asia (radio komunitas Tambuli Pilipina, 1982 dan Mahawelli Sri Langka, 1986) yang mengumpulkan sejumlah studi kasus dan kesimpulan mengenai dua pertemuan riset, mengenai media komunitas perkotaan. Pertumbuhan radio komunitas dicakup dalam satu bagian dari Laporan *Komunikasi Dunia* UNESCO Tahun 1997.

UNESCO memandang radio komunitas sebagai sebuah medium yang memberikan kesempatan bersuara kepada mereka yang selama ini tidak pernah didengar suaranya. Radio komunitas menjadi corong bagi mereka yang terpinggirkan dan merupakan jantung dari proses komunikasi dan demokrasi di dalam masyarakat. Melalui radio komunitas, warga masyarakat memiliki saluran untuk membuat pandangan-pandangan mereka didengar berkaitan dengan keputusan-keputusan penguasa yang menjadi perhatian. Istilah transparansi dan pemerintahan yang bersih menemukan dimensi baru dan demokrasi dirumuskan kembali.

Radio komunitas menjadi katalisator bagi upaya-upaya pembangunan masyarakat pedesaan dan warga perkotaan yang kurang beruntung. Terkait dengan kemampuannya yang luar biasa dalam hal menyebarluaskan informasi yang aktual dan relevan mengenai masalah-masalah pembangunan, peluang-peluang, pengalaman-pengalaman, keterampilan dalam hidup dan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di Amerika Latin, Afrika dan Tazmania, Jamison dan McAnay (1978) mengemukakan bahwa radio berhasil digunakan untuk memperkuat nilai dan perubahan pola-pola perilaku. Pada umumnya, isi informasi ditujukan untuk mengubah afeksi dan motifasi khalayaknya. Komunikasi pembangunan memiliki tujuan umum, yaitu secara politis untuk memotivasi. Tercapainya kesatuan nasional, membangkitkan perhatian publik terhadap kepentingan komunitasnya atau memotivasi kelompok dalam aktivitas membangun diri sendiri serta dapat meningkatkan kualitas hidup warga miskin yang berada diperdesaan. Sehingga program radio dapat mejadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan belajar warga.

Perkembangan radio komunitas di dunia bermula di Bolivia tahun 1947. Radio ini dikelola oleh para buruh tambang untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kerja yang lebih baik. Di Kolombia, radio komunitas lahir di tengah pegunungan Ansez. Radio yang diberi nama sesuai dengan nama desa Sutatenza ini, keberadaannya dimotori oleh seorang pastor yang bertujuan mendukung komunitas penggarap lahan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi para petani.

Dalam Konferensi Radio Komunitas Sedunia (majalah Kombinasi, edisi Januari 2007), yang diadakan pada tanggal 11 sampai 17 Nopember 2006 di Amman, Yordania terungkap beberapa pengalaman menarik tentang perkembangan radio komunitas di masing-masing negara peserta. Di Meksiko radio komunitas masih berjuang untuk memperoleh "ruang" karena frekuensi radio masih dimonopoli kelompok kecil yang mempunyai modal besar. Bahkan stasiun televisi dan radio komersial telah membentuk suatu aliansi untuk menghambat pertumbuhan radio komunitas dengan menuduh mereka sebagai komunis. Di India, setelah berjuang hampir 12 tahun, akhirnya pada penghujung tahun 2006 pemerintahnya telah melegalkan keberadaan radio komunitas. Kini di India, setiap organisasi masyarakat sipil dapat mendaftarkan diri untuk mendirikan radio komunitas.

Hal menarik yang terungkap dalam konferensi tersebut adalah pembahasan mengenai resolusi konflik. Beberapa yang ikut serta merupakan negara yang pernah atau masih berada dalam konflik, seperti Sierra Leone, Kongo dan Irak menceritakan bagaimana radio komunitas di masing masing negara mereka dapat bertahan ditengah situasi konflik. Hal penting yang patut dicatat dari pengalaman diatas betapa beragamnya persoalan dan dinamika radio komunitas, terutama yang berasal dari negara berkembang. Intinya keberadaan radio komunitas berusaha memecahkan ketidakadilan yang dirasakan oleh warganya dan mengambil peran sebagai media untuk kelompok masyarakat yang selama ini dibungkam.

### 2.5.1. Definisi Radio Komunitas

Beragam pemahaman tentang radio komunitas membuat orang terkadang masih simpang siur akan definisi yang paling cocok mengenai radio komunitas. Beberapa ahli menyebutkan radio komunitas sebagai radio alternatif, radio lokal, radio independen atau radio pembebasan. Organisasi Pegiat Radio Komunitas Seluruh Dunia atau *Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires* (AMARC) tidak memberikan definisi atau rumusan pengertian secara khusus. Organisasi ini lebih memilih menyatakan prinsip-prinsip radio komunitas dengan merumuskan ciri-cirinya: (1) Tidak mencari keuntungan; (2) Kepemilikan dan kontrol ada pada komunitas; dan (3) Partisipasi komunitas (Birowo, Prakoso, & Nasir, 2007).

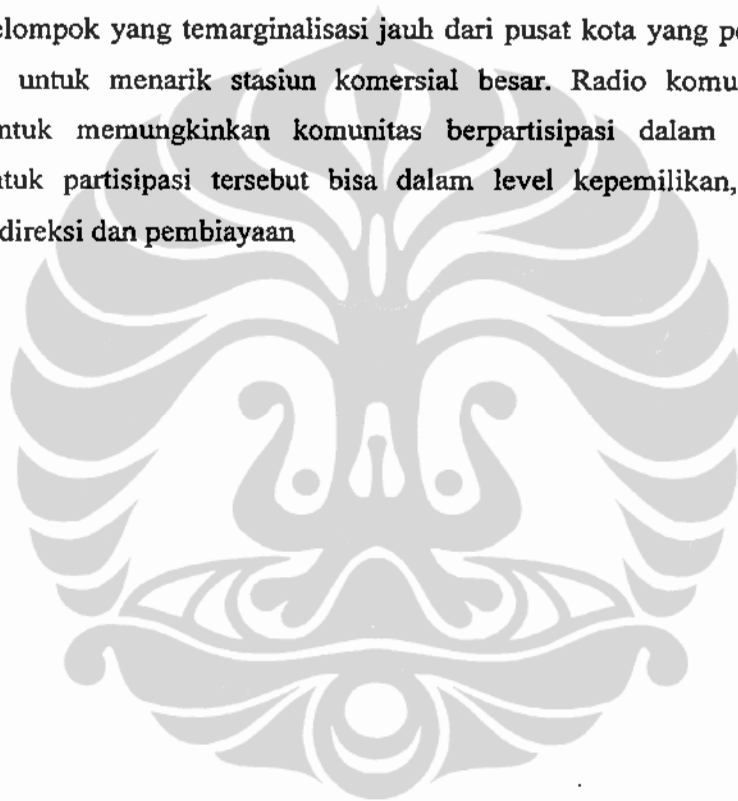
Dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 21 Ayat 1 disebutkan bahwa lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah yang terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Di Ayat 2 UU tersebut kemudian disebutkan juga bahwa radio komunitas tidak untuk mencari laba semata, atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan sesuatu, dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan



program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Dengan mengutip Girard (dalam Jankowski, 2002:7) mendefinisikan radio komunitas sebagai radio yang didirikan untuk melayani masyarakat yang mendorong ekspresi dan partisipasi dan yang bersisi kultur lokal. Tujuan radio komunitas adalah untuk memberi suara, mereka yang tak dapat bersuara yaitu kelompok-kelompok yang termarginisasi jauh dari pusat kota yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar. Radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi dan pembiayaan



**Tabel 2.2**  
**Indikator Yang Membedakan**  
**Antara Radio Swasta, Publik dan Komunitas**

	Swasta	Publik	Komunitas
<b>Inisistif menyusun materi siaran</b>	Pengelola berdasarkan hasil rating peringkat) dari surveyor dan juga selera/kreatifitas para pengelola	Pengelola berdasarkan keputusan manajemen	Pengelola berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama komunitasnya
<b>Orientasi materi siaran</b>	Diarahkan pada segmen pasar yang disasar	Luas untuk informasi kepada publik dari berbagai kalangan	Kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tersebut
<b>Sumber Informasi</b>	Berasal dari informasi resmi, pejabat formal pemerintah/punya nama besar tokoh selebritis	Pejabat formal menurut pemerintah	Tidak harus pejabat, bisa orang biasa, tokoh informal, petani, orang miskin dsb.
<b>Keragaman tema</b>	Cenderung mengikuti keinginan dan selera pasar.	Cenderung mengikuti keinginan dan norma	Bergantung pada tema-tema yang dibutuhkan warga setempat.
<b>Pakem dan dialek</b>	Cenderung mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta)	Menggunakan bahasa-bahasa formal dan kaku	Lebih mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat
<b>Kontrol terhadap isi siaran</b>	Selain pihak yang berwenang, pemilik dan juga pengiklan mengontrol isi siaran	Selain pihak yang berwenang masih saat ini masih dikontrol oleh pemerintah karena membiayainya.	Selain pihak berwenang adalah warga masyarakat langsung dan juga Dewan Penyiaran Komunitasnya.

Sumber : Birowo, Prakoso, & Nasir (2007)

Fraser & Estrada (2001) mengatakan terdapat perbedaan antara lembaga penyiaran publik, komersial dan komunitas. Lembaga penyiaran publik dan komersial termasuk kategori memberlakukan pendengar sebagai objek, sedangkan radio komunitas memberlakukan pendengar sebagai subjek dan pesertanya terlibat

dalam penyelenggaraannya. Fokus yang khas dari radio komunitas adalah membuat khalayaknya sebagai tokoh utama melalui keterlibatan mereka dalam seluruh aspek manajemen dan produksi programnya, serta menyajikan program yang membantu mereka dalam pembangunan dan kemajuan sosial di komunitas mereka

### 2.5.2. Karakter Radio Komunitas

Karakter dasar dari radio komunitas adalah hubungan langsung dan intensif antara lembaga penyiaran dengan komunitas serta adanya partisipasi anggota komunitas dalam perancangan program, produksi, pembiayaan dan dalam mengevaluasi kinerja lembaga penyiaran komunitas. Dari hal tersebut, jelas bahwa radio komunitas memiliki karakteristik yang berbeda dengan siaran radio komersial, terutama pada aspek kepemilikan, pengawasan, tujuan serta fungsinya.

Semakin luas jangkauan siaran akan semakin sulit mendapatkan partisipasi dari masyarakat, karena apapun media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Dengan demikian ada pula fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, fungsi menghibur, mendidik dan menginformasikan berita yang benar-benar merefleksikan kebutuhan komunitasnya (Gazali, 2003)

Hal yang membedakan radio komunitas dari radio atau media konvensional adalah menjadikan khalayaknya sebagai tokoh utama melalui keterlibatan mereka dalam seluruh aspek dari manajemen sampai produksi programnya. Program yang disajikan diarahkan untuk membantu komunitas dalam pembangunan dan kemajuan sosial di komunitas itu sendiri.

Prinsip-prinsip akses dan partisipasi dalam radio komunitas mengandung arti layanan siaran ditujukan untuk suatu komunitas. Partisipasi berarti publik secara aktif terlibat dalam perencanaan, manajemen, pembuatan program, sekaligus menjadi penyiar. Secara konkret konsep partisipasi tadi mengandung makna:

- a. Suatu siaran radio komunitas memiliki pola yang menjangkau seluruh anggota komunitas yang ingin dilayani.

- b. Komunitas berpartisipasi dalam merumuskan rencana dan kebijakan untuk pelayanan radio tersebut dan dalam menentukan tujuannya, juga dalam dasar-dasar manajemen dan pembuatan programnya.
- c. Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan materi program, lama waktu siar, dan jadwalnya. Masyarakat memilih jenis-jenis program yang mereka inginkan, ketimbang hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh para pembuat program.
- d. Komunitas bebas memberikan komentar dan kritik.
- e. Ada interaksi terus menerus antara pembuat program dan pihak yang menerima pesan. Radio ini sendiri bertindak sebagai saluran utama yang memudahkan interaksi tadi, tetapi terdapat juga suatu mekanisme yang memungkinkan kontak yang mudah antara para pembuat program dan pihak manajemen dan stasiun radio.
- f. Anggota komunitas baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok tidak dibatasi keikutsertaannya membuat program. Staf stasiun radio komunitas membantu dengan menggunakan fasilitas teknik produksi yang tersedia (Zein:2004)

Oleh sebab itu keberadaan radio komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media masa pada umumnya, hanya saja pada wilayah yang terbatas dan dominannya peran partisipasi komunitas dalam pengelolaan siaran. Meskipun jangkauan siaran radio komunitas dibatasi namun jenis media penyiaran ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi secara lebih sempurna kepada komunitasnya.

### 2.5.3. Jenis-Jenis Radio Komunitas

Menurut hasil riset *Combine Resource Institution* (2002), membagi jenis radio komunitas berdasarkan basisnya, diantaranya :

- a. Radio berbasis komunitas

Radio yang didirikan oleh komunitas yang menempati wilayah geografis tertentu sehingga basisnya adalah komunitas yang menempati suatu daerah dengan batas-batas tertentu, seperti kecamatan, kelurahan dan desa.

b. Radio berbasis masalah/sektor tertentu

Radio yang didirikan oleh komunitas karena terikat kepentingan minat yang sama sehingga basisnya adalah komunitas yang terikat oleh kepentingan yang sama dan terorganisasi, seperti komunitas petani, buruh dan nelayan.

c. Radio berbasis inisiatif pribadi

Radio yang didirikan oleh perorangan karena hobi atau memiliki tujuan lainnya, seperti hiburan, informasi dan tetap mengacu pada kepentingan warga komunitas.

d. Radio berbasis kampus

Radio yang didirikan oleh warga kampus perguruan tinggi dengan tujuan, termasuk sebagai sarana laboratorium dan sarana belajar mahasiswa.

Sedangkan Rachmiatie (2007), menyebutkan beberapa kategori jenis radio komunitas, diantaranya :

a. Radio komunitas pendidikan

Radio jenis ini terdapat disekolah atau kampus. Komunitasnya adalah siswa, mahasiswa, guru, karyawan, dosen. Tujuan utama didirikannya radio ini untuk media pendukung pembelajaran.

b. Radio komunitas peminatan.

Radio jenis ini didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki minat atau pekerjaan yang sama. Tujuan utama dibentuk radio ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan, tukar menukar informasi dan pengalaman.

c. Radio komunitas agama

Radio jenis ini ada pada komunitas agama sebagai media dakwah, seperti di pesantren. Radio seperti umumnya bertujuan untuk menyebarkan informasi keagamaan.

d. Radio komunitas wilayah

Radio jenis ini didirikan oleh kelompok warga komunitas yang menempati wilayah tertentu yang relatif terbatas, seperti dusun, kelurahan atau kecamatan tertentu.

e. Radio komunitas darurat

Radio jenis ini mengacu pada radio komunitas yang didirikan secara darurat karena ada bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dll, yang berfungsi sebagai media informasi bagi korban bencana.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer di bidang sosial menggunakan studi kasus dan bersifat longitudinal (waktu tertentu), mengingat penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atau informasi tentang perkembangan radio komunitas di daerah bencana dalam masa tanggap darurat yang telah berjalan pada Radio Komunitas Samudera 107.7 FM, yang tergabung dalam program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet). Hal ini dimaksud pula untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap atas manfaat pendirian radio komunitas di daerah bencana, partisipasi warga dan keefektifitas program AERNet itu sendiri.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan yang bersifat kualitatif karena diyakini akan mempunyai validitas yang lebih tinggi walaupun dengan reabilitas lebih rendah dan secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap masyarakat korban gempa dan tsunami dalam komunitas mereka sendiri, serta dengan dukungan data kualitatif yang bersifat sekunder.

Menurut Abdul Aziz S.R (Bungin, 2003:37) dalam pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan lebih tunduk kepada realitas dilapangan (bersifat emik) ketimbang apa yang dipikirkan atau dibayangkan secara subjektif sejak awal (prospektif etik). Sehingga penelitian yang dilakukan memang dirancang untuk membantu peneliti untuk memahami maksud fenomena sosial dan memperjelas proses yang diteliti di dalamnya. Dalam paradigma kualitatif sang peneliti berperan sebagai instrumen dari pengumpulan data dan mungkin ada perbedaan hasil tergantung siapa yang melakukan riset.

Pertimbangan lain adalah peneliti menginginkan suatu kebebasan untuk menentukan kondisi penelitian (informan atau lokasi). Oleh karena itu penelitian ini lebih baik dianalisis secara kualitatif. Sementara itu menurut Sarwono (2006:16), penelitian ini berdasarkan tempat termasuk kategori penelitian lapangan dan berdasarkan jenis datanya adalah penelitian primer (datanya diambil dari sumber pertama) dengan kategori studi kasus karena menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya.

Tipe dari penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggunakan variable masa lalu dan masa kini berupa penjelasan dari individu-individu yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Sekaligus mendeskripsikan fenomena sosial tertentu yang sebelumnya informasi tentang fenomena sosial tersebut telah ada namun dipandang belum cukup memadai. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif dalam arti mengupayakan pengkajian dan mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi pengelola radio komunitas Samudera 107.7 FM dalam masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Aceh.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi radio Komunitas Samudera 107.7 FM, yaitu di Desa Mancang Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Radio ini dipilih karena merupakan radio komunitas pertama yang mengudara dilokasi pengungsian warga korban gempa dan tsunami dari kecamatan Samudera dan sekitarnya. Meskipun sejak mengudara pada tanggal 14 Pebruari 2005, sampai saat ini studio radio komunitas ini tidak pernah pindah.

### **3.3. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah aparat kecamatan Samudera di Kabupaten Aceh Utara dengan unit analisisnya adalah lembaga penyiaran komunitas radio Samudera FM dan lembaga *Combine Resource Institution* (CRI) dengan unit analisisnya Desa Mancang Geudong dan program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet).



Kemudian akan dilakukan klarifikasi pada narasumber dari subjek tersebut sebagai *key information*. *Key information* yang dipilih dari unit analisis Desa Mancang Geudong, yaitu Kepala Desa, Ketua Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) radio komunitas Samudera, Ketua Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK) radio komunitas Samudera, Penyiar dan Pendengar/korban tsunami. Sedangkan unit analisis dari program program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet), yaitu relawan AERNet, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (KPID NAD), Direktur Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, Ketua Jaringan Radio Komunitas Nanggroe Aceh Darussalam (JRK-NAD) dan Ketua Ikatan Radio Komunitas Aceh Utara (IRK-AU). Masing-masing *key information* tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendirian dan pengembangan radio komunitas di Aceh pasca tsunami, khususnya radio komunitas Samudera FM dalam masa tanggap darurat.

#### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan adalah berupa wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan pengamatan lapangan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses pengumpulan data dengan cara menggunakan hasil *interview* dengan *key person* yang pemilihannya didasarkan orang-orang yang terlibat langsung dan berkepentingan dalam pengembangan radio komunitas Samudera FM, sehingga dapat memberikan informasi dan fakta aktual tentang berbagai aspek yang ada pada tingkat implementasi. Gunanya adalah agar *key person* tersebut memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap penelitian ini. Sifat pertanyaan yang diberikan berupa *open-ended* yang memungkinkan *key person* mengeksplorasi jawab yang diberikan.

Adapun yang menjadi fokus dalam pertanyaan yang diberikan kepada *key person* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pendirian radio komunitas di Kecamatan Samudera dalam masa tanggap darurat pasca gempa dan tsunami.
2. Tujuan dilakukannya pendirian radio komunitas Samudera 107.7 FM di dekat lokasi pengungsian gempa dan tsunami.
3. Keunggulan keberadaan radio komunitas di daerah dalam penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat
4. Kendala yang dihadapi pada tataran implementasi terhadap perkembangan radio komunitas Samudera 107.7 FM pasca bencana dalam masa tanggap darurat.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan analisis yang akan digunakan dalam laporan penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan dan mencatat semua informasi dan kejadian yang relevan, kemudian mempelajari serta memahami untuk kemudian mendapatkan pengertian-pengertian yang dalam dari data yang diperoleh.
2. Dari data yang bermakna tersebut dikembangkan dan dikaitkan dengan tujuan penelitian secara sistematik dan konsisten sehingga mendapatkan pemahaman yang aktual
3. Dari temuan-temuan tersebut dikembangkan dan dikomparasikan dengan kerangka teori serta disusun penjelasan secara deskriptif dan diformulasikan ke dalam kesimpulan sebagai rumusan hasil penelitian.

Mengingat analisis data ini adalah suatu proses maka pelaksanaan analisisnya sudah dimulai sejak pengumpulan data dilakukan dan secara intensif dianalisis sesudah data terkumpul. Dalam penelurusan hasil maupun analisis data, informasi yang diperoleh dari masing-masing responden tidak digambarkan secara satu persatu, akan tetapi ditekankan pada informasi yang umumnya diberikan responden sesuai dengan permasalahan penelitian.

### **3.6. Keterbatasan Penelitian**

#### **3.6.1. Keterbatasan yang berkaitan dengan pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menekankan pada dua teknik yaitu wawancara mendalam dan studi literatur/penelusuran teks yang terkait dengan radio komunitas yang menjadi subjek penelitian. Observasi non partisipan juga dilakukan namun tidak dalam jangka waktu yang lama; observasi dilakukan selama lebih kurang satu bulan. Dengan cara pengumpulan data seperti ini maka tidak semua aktivitas penyelenggaraan radio komunitas di Aceh khusus radio Samudera FM dapat teramati secara terperinci.

#### **3.8.2. Keterbatasan yang berkaitan dengan lokasi penelitian**

Karena luasnya cakupan penelitian terkait dengan analisis perkembangan radio komunitas di Aceh pasca tsunami sebagai media tanggap darurat. Maka penelitian ini dibatasi pada observasi di radio komunitas Samudera FM, tidak meluas pada radio komunitas-komunitas lain meskipun radio yang lain itu bagian dari program *Atjeh Emergency Radio Network (AERNet)*. Masa tanggap darurat tsunami Aceh berlangsung 6 bulan sejak bencana. Meskipun penulis melakukan observasi tidak pada masa itu tetapi pengalaman penulis sebagai relawan radio komunitas di Aceh ikut memperkaya analisis penelitian ini. Sementara itu bila mengacu pada proses tanggap darurat hingga selesainya rehabilitasi Aceh, maka periodenya bisa disebutkan antara tahun 2005 sampai 2008.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

#### 4.1. Sekilas Tentang Radio Komunitas Samudera

Radio komunitas Samudera FM termasuk salah satu dari lima radio komunitas yang didirikan oleh relawan *Combine Resource Institution* (CRI) Yogyakarta di Aceh sebagai media informasi dan komunikasi bagi korban tsunami dalam masa tanggap darurat. Untuk mematangkan pendirian radio penyiaran komunitas pada masa tanggap darurat, CRI merancangnya dalam program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet). Kehadiran dan keberadaan radio komunitas ini telah membawa angin segar dan perubahan yang berarti bagi korban tsunami di Aceh, khususnya masyarakat yang berada di wilayah radio komunitas itu berdiri.

**Tabel 4.1**  
**Data Radio Komunitas Samudera FM**

Nama Radio Komunitas	Samudera FM 107.7 Khz
Alamat	Jl. Banda Aceh - Medan, Desa Mancang Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara 24374
Frukuensi	FM 107.7 Khz
Berdiri	14 Pebruari 2005
Ketua DPK	Abdul Halim
Ketua BPPK	M. Husen
Daya pancar	50 Watt
Peralatan	- Antena setinggi 25 meter - 1 Unit Komputer - 1 Unit Mixer - 2 buah Mic - Trafo 30 Ampere - 1 Unit tape recorder

Radio komunitas Samudera FM terletak di Desa Mancang Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Jarak dari kota Lhokseumawe kurang lebih 15 km dan studionya berada di balai desa yang berada dipinggir lintas nasional Banda Aceh – Medan. Wilayah pedesaan desa Kecamatan

Samudera tersebar disekitar pinggiran pantai, yaitu 3 km ke arah utara pusat kota kecamatan dimana sewaktu bencana terkena dampak tsunami. Sehingga masyarakat di pesisir pantai berbondong-bondong pindah ke pusat kota kecamatan yang tidak jauh dari desa Mancang Geudong.

Adapun topografi wilayah yang datar dan sebagian besar wilayah desa berada dipinggir pantai dengan sebaran penduduk yang cukup padat menyebabkan wilayah ini tergolong parah kerusakannya akibat tsunami lalu. Dengan demikian, karena alasan itulah maka studio radio komunitas Samudera FM dipilih ditempatkan ditempat sekarang berdasarkan hasil rapat dan musyawarah dengan aparat desa dan muspida kecamatan Samudera. Abdul Halim, selaku Kepala Desa Mancang Geudong, yang juga menjabat Ketua Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) radio Samudera FM, menjelaskan :

”....Kami beruntung sekali diberikan pemancar radio untuk membantu pemulihan korban tsunami. Apalagi saat itu desa kami kedatangan banyak pengungsi dari desa tetangga yang berada dipesisir laut. Semua warga kami sibuk membantu mengurus pengungsi. Pernah radio Samudera mau dipindahkan ke kantor kecamatan, namun kami menolak karena alasan ditempat kami masih tersedia tempat yang layak. Hal ini juga atas kesepakatan desa-desa lain yang ada di kecamatan Samudera. Dukungan masyarakat diluar desa kami terlihat ketika penyerahan secara resmi radio ini dari relawan. Semua kepala desa tetangga ikut hadir...”

Kepemilikan dari radio komunitas ini adalah seluruh masyarakat yang menempati, berasal, bekerja dan berbakti untuk daerah kecamatan Samudera serta status kepemilikan perangkat radio komunitas sebagai milik kolektif (bersama) yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di kecamatan Samudera. Sebelum sampai ke proses pendirian, sebelumnya dilakukan pengorganisasian dan pendampingan dimasyarakat komunitas selama lebih dari tiga bulan guna mendorong dan menumbuhkan partisipasi, pemahaman dan kemandirian masyarakat Samudera terhadap radio komunitas. Sehingga dalam pengelolannya, radio komunitas ini menjadi media informasi dan komunikasi dua arah masyarakat Samudera.

Afrizal, selaku Relawan Program AERNet yang pertama kali ikut melakukan survey lokasi untuk pendirian studio ketika itu membenarkan, bahwa usaha pendampingan itu mutlak diperlukan.

“....Sangat berbeda proses pendirian radio komunitas di Aceh dengan daerah lainnya, karena ini kondisinya darurat bencana. Semua proses kami yang mengarahkan karena masyarakat tidak tahu tentang radio komunitas. Mereka tahunya selama ini radio swasta. Jadi setelah dijelaskan dan dilakukan pendampingan, alhamdulillah yang pada awalnya kami kira akan ada hambatan ternyata mendapat sambutan yang mendukung kerja kami ketika itu....”

Apalagi semua peralatan dibagikan cuma-cuma dan pemasangan dilakukan oleh teknisi AERNet.

“...Pada awal berdiri radio samudera, waktu itu semua alat pemancar termasuk semua perangkat studio dari kami. Terus terang kami juga bisa bekerja setelah mendapat bantuan dana operasional dari Bank Dunia yang disalurkan melalui lembaga kami di Yogyakarta. Masyarakat Aceh sungguh beruntung, tsunami membawa berkah bagi mereka.....”

Perihal nama radio juga tidak terlepas dari sejarah yang melekat pada daerah ini. Dimana nama radio komunitas kecamatan Samudera, Aceh Utara berasal dari kerajaan Islam Samudera Pasai.

”....Soal nama biar gampang kami pakai nama Samudera saja karena radio ini milik warga kecamatan Samudera. Sehingga desa-desa diluar Mancang Geudong ikut juga merasa memiliki. Cuma lokasi studionya saja di desa kami. Semangat sejarah kerajaan Islam Samudera Pasai ingin kami bangkitkan dengan menamai radio komunitas ini...”

Hal ini dibenarkan oleh M. Husen yang saat ini menjabat Ketua Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK) radio Samudera FM. Penamaan ini akan lebih mencirikan radio sebagai media informasi dan komunikasi masyarakat Samudera. Masyarakat mengharapkan kehadiran media radio dikecamatan mereka ini dapat benar-benar bermanfaat dan mendorong pembangunan dan percepatan proses rehabilitasi dan rekonsruksi di wilayah kecamatan Samudera, khususnya yang merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami.

#### 4.1.1 Sajian Informasi Radio Samudera FM

Pengelola dan penyiar radio komunitas Samudera FM sebagian adalah pemuda/pemudi dari barak pengungsian. Dengan personil terbatas mengemas program siaran dengan kreatif. Tim reporter cukup aktif melakukan reportase lapangan ke barak-barak pengungsian di wilayah kecamatan Samudera, Aceh Utara. Mereka mengangkat isu-isu seputar barak pengungsi. Hal ini menjadikan hubungan radio komunitas Samudera FM menjadi sangat dekat dengan komunitasnya, khususnya masyarakat pengungsi karena kondisi dan keadaan mereka sering diangkat dan disiarkan oleh radio.

Sebagai radio yang didirikan karena kondisi bencana tentu aspek-aspek psikologi pendengar menjadi pilihan utama pengelola radio dalam merancang program acara. Karimuddin selaku Ketua Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK) Samudera FM mengatakan :

“....Kami waktu itu hanya berpikiran agar jangan ada kesedihan dikalangan pengungsi. Makanya hal ini mendorong kami melakukan siaran selain informasi kebutuhan pengungsi juga acara-acara yang bernafaskan Islam, guna mengobati luka hati dan trauma dengan mengisi acara dengan acara ceramah agama, pantun, dan hikayat-hikayat Aceh. Karena menurut kami diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat dan menata kehidupan mereka kembali....”

Ketika informasi dikemas dalam sebuah acara *talk show*, pengisi acara tidak lain berasal dari masyarakat itu sendiri. Mereka dengan sukarela tanpa mengharapkan bayaran apapun datang ke studio guna menghibur dan saling memberikan motivasi dan semangat untuk terus bertahan hidup dan lepas dari kesedihan. Dengan adanya radio dan keterlibatan korban tsunami dalam proses siaran dapat mengobati luka mereka akibat bencana yang mereka alami

Berikut petikan wawancara dengan Farhan Adamy korban gempa dan tsunami yang ikut mengisi acara :

“....Saya awalnya coba-coba membantu siaran karena memang kurang orang di studio. Saya juga mencoba bangkit dengan banyak aktifitas. Dengan bisa siaran, saya ingin berbagi rasa dengan warga

pengungsi lain, yang senasib dan sepenenderitaan. Saya berusaha memberi semangat dalam setiap kesempatan siaran, ternyata banyak yang suka lagu-lagu yang saya putar....”

Dengan demikian, radio tidak sekedar berfungsi menyiarkan informasi dan berita seperti kebanyakan radio layaknya. Radio komunitas Samudera FM yang tergabung dalam simpul jaringan AERNet benar-benar menjadi simpul informasi yang dapat mengkomunikasikan berbagai informasi dan berita kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemanfaatan radio komunikasi menjadi salah satu hal penting untuk menyambung jaringan komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berada di lapangan. Baik simpul yang dibangun relawan AERNet maupun simpul-simpul mandiri yang berada di barak pengungsi, tenda logistik dan tenda relawan dengan memanfaatkan radio komunikasi dua arah. Selain itu, radio juga menjadi jaringan distribusi berita yang berasal dari kantor berita radio (KBR) 68H yang di akses melalui parabola. Seperti dituturkan oleh Karimuddin, selaku penyiar dan juga koordinator siaran radio Samudera FM :

”...Tidak hanya itu, lewat berkirim salam dengan kupon-kupon pendengar yang dibacakan penyiar dan diselingi hiburan lagu yang bernafaskan Islam. Kami juga memutar lagu-lagu yang dinyanyikan penyanyi Aceh. Sehingga menjadi pelipur lara masyarakat akibat musibah bencana alam. Informasi di wilayah pengungsian diperoleh langsung dari lapangan melalui relawan pengelola radio. Simpul informasi yang memanfaatkan radio komunikasi gelombang dua arah, seperti *handy talky*. Kami telah terlebih dahulu dibekali dengan kemampuan jurnalistik dan reportase lapangan. Informasi yang kami dapat dari barak-barak pengungsian kemudian disiarkan...”

Sesuai dengan fungsi yang diharapkan dimana radio tak hanya menyiarkan namun ikut membangun komunikasi dengan pihak lain, maka informasi yang dianggap layak didistribusikan kepada khalayak yang lebih lugas dikirimkan ke simpul pusat posko AERNet yang berada di Banda Aceh. Fasilitator informasi yang bertugas di Posko AERNet kemudian mengolah dan mengemas informasi tersebut setelah melakukan *cross check* kembali kepada sumber informasi dan kemudian berbagi informasi untuk di siarkan melalui radio komunitas jaringan



AERNet. Sistem kerja yang dilakukan ini sangat membantu informasi masyarakat di daerah lain karena pendengar dapat mengetahui perkembangan tanggap darurat dari lokasi yang berbeda.

#### **4.2. Dinamika Perkembangan Radio Komunitas di Aceh Pasca Gempa dan Tsunami.**

Gempa dengan kekuatan 8,9 skala richter dan diikuti gelombang tsunami yang menerjang Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, seakan melengkapi sisi kelam sejarah perjalanan rakyat Aceh. Harus diakui, Aceh sebelum bencana tsunami adalah Aceh dalam kungkungan situasi konflik. Situasi konflik menyebabkan terjadinya pembatasan media dalam hal ketatnya penyaluran informasi dan berita. Sebagai wilayah konflik dan tertutup, radio komunitas bukan merupakan pilihan warga untuk dijadikan media milik warga. Namun, bencana tsunami memberikan peluang warga untuk dapat mengelola radionya sendiri, yakni radio komunitas.

Sebagai gambaran yang dapat penulis kemukakan disini, masyarakat Aceh sebelum tsunami datang, tidak mengenal yang namanya radio komunitas. Masyarakat hanya tahu radio siaran swasta. Radio komersial selama itu memberikan hiburan dan informasi bagi masyarakat, baik itu di kota maupun di desa-desa seperti wilayah lain di Indonesia. Siaran berita dan informasi yang diperdengarkan radio swasta ini umumnya *me-relay* berita jaringan dari KBR-68H atau siaran radio luar negeri yang berbahasa Indonesia, serta membacakan berita-berita yang diambil dari koran-koran lokal.

Ketergantungan pada media komersial tersebut terputus dengan datangnya musibah gempa dan tsunami. Menurut pengalaman penulis sendiri, situasi di Aceh ketika itu terjadi kekosongan informasi. Seluruh media, termasuk radio turut mati bersama bersama bencana. Jika bukan karena studio yang tersapu gelombang tsunami atau rusak akibat gempa, radio tidak bersiaran karena staf mereka ikut menjadi korban. Tak hanya radio siaran. Seluruh perangkat komunikasi mengalami hal yang sama. Putusnya aliran listrik menyebabkan penggunaan telepon dan alat-alat komunikasi lain yang menggunakan daya listrik tidak dapat

berfungsi. Dapat dikatakan komunikasi lumpuh kala itu. Akibatnya fatal. Dalam dua sampai tiga hari setelah tsunami, kondisi Aceh tidak dapat diketahui khalayak di luar Aceh.

Komunikasi internal Aceh parah lagi kondisinya. Komunikasi antar warga, antar wilayah, terutama dalam merespon bencana tsunami sangat sulit dilakukan. Langkah-langkah koordinasi tanggap darurat tanpa alat komunikasi yang memadai menyebabkan lambatnya penanganan bencana. Memang dalam kondisi darurat di Banda Aceh dibuat beberapa radio yang difasilitasi oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI), Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Humpus, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KBR-68H, PP Muhammadiyah dan mitra-mitra radio swasta di Aceh sebelumnya. Tapi radio darurat yang mereka bangun ini sifatnya memang sementara sambil menunggu radio swasta yang terkena tsunami bisa mengudara kembali.

Penulis sendiri tidak berani mengatakan radio-radio yang dibangun dalam masa darurat ini adalah radio komunitas. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Safir, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah NAD, dijelaskan:

"....Banyak pihak yang antusias untuk mendirikan radio di Banda Aceh beberapa hari menjelang tsunami. Waktu itu semua radio swasta kena tsunami sehingga otomatis siaran radio di Banda Aceh mati, listrik tidak ada, koran lokal juga tidak bisa terbit. Lebih parah lagi RRI Banda Aceh juga mati bersiaran karena sebagian besar perangkat siaran dan gedung kena air tsunami. Kami sendiri juga sibuk mengurus keluarga, sehingga lembaga-lembaga yang datang ke Aceh tanpa koordinasi dengan kami langsung mendirikan radio. Lebih parahnya mereka bersiaran mengambil frekuensi milik radio lain yang sudah ada. Makanya ketika itu kami semua anggota KPI Aceh sepakat agar radio-radio swasta yang mati ini diberdayakan lagi daripada membuat radio baru..."

Diluar organisasi tersebut diatas, muncul *Combine Resource Institution* (CRI) yang secara khusus memberikan perhatian serius dalam pengembangan radio komunitas di Aceh pasca tsunami. Dimana CRI memberdayakan korban tsunami melalui radio komunitas dalam program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet). Dalam perkembangannya, dengan apa yang dikembangkan oleh CRI

di Aceh menjadi awal geliat radio komunitas di Aceh. Menurut Agustiawan, selaku Koordinator Lapangan Program AERNet, menjelaskan :

”....Menyikapi dampak yang muncul pasca bencana tsunami Aceh, CRI di Yogyakarta mencoba untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana tersebut yang berjumlah ratusan ribu orang sesuai dengan kompetensi kami. Bantuan yang diberikan berupa perangkat informasi dan komunikasi yang dikelola oleh masyarakat dalam mendistribusikan informasi bagi pihak-pihak terkait dengan program darurat, pemulihan dan pembangunan kembali Aceh. Pengembangan program AERNet memiliki strategi yaitu berupaya mendirikan sepuluh titik simpul informasi komunikasi, dimana lima titik diantaranya didirikan radio siaran *low power* bergelombang FM...”

Radio komunitas kemudian menjadi pilihan masyarakat Aceh pasca bencana tsunami untuk didengar. Radio komunitas memiliki peluang untuk dapat menjembatani kebutuhan informasi warga, baik yang berasal dari warga itu sendiri, maupun dari luar yang layak mereka diterima. Agak sedikit berbeda dengan inisiatif lain di awal, pilihan penempatan radio didistribusikan pada wilayah-wilayah di luar Banda Aceh. Dengan demikian diharapkan terjadi distribusi informasi yang lebih merata yang dapat mendorong proses-proses percepatan penanganan pascabencana di Aceh. Namun inisiatif pendirian radio komunitas di Aceh ini berbeda bila dilihat dari konsep partisipasi masyarakat, seperti dikatakan Afrizal :

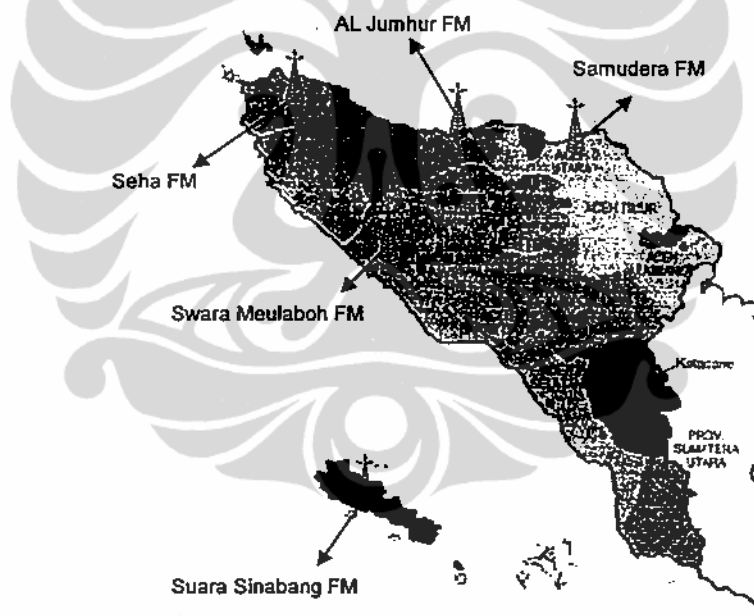
“....Pendirian radio yang diinisiasi ini agak melenceng dari konsep radio komunitas yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Radio didirikan dengan proses yang cukup instant, sehingga berbeda dengan konsep pendirian radio komunitas yang ideal. Instant-nya pendirian ini menjadi pilihan karena situasi yang dihadapi berbeda. Radio didirikan oleh pihak luar yang memiliki perhatian terhadap minimnya informasi dan rendahnya komunikasi yang dapat meningkatkan upaya-upaya koordinasi terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pelosok...”

Dalam situasi pasca bencana, kecepatan dan pemerataan informasi menjadi pemicu cepatnya proses pemulihan pasca bencana. Niat ini pula yang mendasari didirikannya radio komunitas, dengan daya pancar rendah kala itu di lima simpul di wilayah bencana tsunami. Kelima simpul tersebut berada wilayah di Meulaboh

Kabupaten Aceh Barat (Swara Meulaboh FM), Sinabang, Kabupaten Simeulue (Suara Sinabang FM), Jantho, Kabupaten Aceh Besar (Seha FM), Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen (Al Jumhur FM) dan Geudong, Kabupaten Aceh Utara (Samudera FM). Kehadiran radio komunitas di lima wilayah Aceh ini dianggap berhasil perubahan yang berarti pada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di wilayah radio komunitas itu berada.

**Gambar 4.1**

**Lokasi Simpul Radio Komunitas AERNet  
Dalam Masa Tanggap Darurat**



Untuk menentukan pilihan pada wilayah-wilayah yang disebutkan di atas juga tak mudah. Data dan informasi yang minim dan sekaligus simpang siur membuat tingkat kesulitannya cukup tinggi. Menurut Afrizal :

“....Pilihan atas wilayah ini semata-mata didasarkan pada tingkat keparahan akibat terjangan tsunami yang lebih tinggi dibanding wilayah lain....”

Pada setiap titik tempat radio didirikan, selain dilengkapi dengan *exciter* FM sederhana berkekuatan 100 watt, *mixer*, *mikrofon*, pemutar *video compact disc* (VCD), *tape recorder*, juga dilengkapi dengan telepon satelit, genset berkekuatan 1000 watt, dan parabola serta seperangkat radio komunikasi *very high frequency* (VHF). Disamping titik radio, didirikan pula simpul komunikasi pada beberapa titik strategis di wilayah lainnya di sekitar radio. Simpul-simpul informasi dan komunikasi ini berada di wilayah Banda Aceh. Posko Utama berada di Gedung Dinas Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi NAD, Aceh Besar (Lambaro), Aceh Barat (Alue Penyarang) dan Jeuram (Nagan Raya), serta Lhokseumawe di kantor Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK). Alasan pemilihan lokasi-lakasi titik simpul ini menurut Agustiawan, berdasarkan beberapa tahapan :

"....Pemilihan lokasi titik simpul AERNet ditetapkan melalui tahap tiga tahap. Tahap pertama melalui kajian awal. Tahap kedua adalah kajian lapangan. Tahap ketiga analisis, koordinasi dan penyepakatan bersama. Tahap kajian awal dilakukan dengan didasari data sekunder dari media dan koordinasi dengan mitra yang memiliki informasi terkini tentang kondisi Aceh ketika itu. Tahap lapangan dilakukan melalui kontak *person* yang telah dimiliki pada saat kajian awal. Melalui kontak *person* inilah *asesmen* lapangan dilakukan dengan lebih luas ke berbagai pihak dan lokasi lainnya. Indikator terpenting pada pemilihan titik simpul ditahap darurat adalah pemikiran terbuka dari pemilik tempat, ketersediaan tempat, jaminan keamanan, adanya operator awal, keterjangkauan dan kondisi geografis..."

Hasil amatan penulis lapangan ketika itu, pilihan wilayah untuk penentuan lokasi pendirian radio komunitas karena kemudahan akses masuk bagi relawan dalam mensurvei lokasi. Seperti dijelaskan Agustiawan berikut ini :

"....Pada saat itu situasi di Aceh yang sedang mengalami konflik, menjadi faktor yang harus kami pertimbangan secara seksama. Namun demikian, berbagai hal dapat saja terjadi dengan mendadak dan mempengaruhi proses kerja yang telah dirancang, termasuk AERNet ini. Apalagi dengan belum begitu stabil kondisi Aceh pasca tsunami, dimana infrastruktur pelayanan publik belum tertata baik sehingga bisa saja muncul kerusakan secara tiba tiba..."

Ada kalanya daerah yang sudah direncanakan untuk didatangi namun terhambat karena akses transportasi yang sama sekali hancur, disamping kesiapan masyarakat itu sendiri. Apalagi sewaktu tsunami datang, kondisi Aceh masih dalam status darurat militer akibat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga menyulitkan akses relawan memasuki pelosok Aceh yang terkena tsunami. Kondisi ini pula yang menyebabkan para relawan radio komunitas mengalihkan pilihan di titik-titik wilayah yang banyak terdapat lokasi pengungsian. Tentunya berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Agustiawan diatas dengan mempertimbangan terlebih dahulu kesiapan warga komunitas yang akan dituju untuk diberikan bantuan perangkat pemancar radio komunitas.

#### **4.2.1. Radio Komunitas Pasca Tanggap Darurat**

Enam bulan pasca sunami, wilayah bencana dinyatakan telah melewati masa tanggap darurat dan beralih ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Perubahan status tersebut tidak mengubah pola dan jenis bantuan yang diberikan lembaga-lembaga donor maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara umum situasi belum begitu banyak berubah, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang agak jauh dari kota misalnya. Pembangunan rumah-rumah bantuan belum banyak dimulai, kebanyakan donor masih berkuat membangun barak-barak pengungsi agar warga pengungsi segera pindah dari tenda-tenda darurat. Situasi di tenda darurat yang telah dihuni hampir enam bulan lamanya sudah mulai menunjukkan situasi yang kurang sehat. Sementara LSM asing dan lembaga donor masih hilir mudik keluar masuk desa untuk melakukan pendampingan awal maupun pengukuran-pengukuran tanah.

Dalam perubahan status pasca bencana, ada suatu momen penting bagi warga masyarakat Aceh, yakni di bulan Agustus 2005 terjadi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang menyatakan perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Momentum perdamaian ini kelak memberikan perubahan yang cukup berarti bagi kondisi psikologis warga pengungsi.

Pada awal masa rehabilitasi dan rekonstruksi, dua dari lima radio komunitas yang difasilitasi berdirinya oleh program AERNet tidak bersiaran lagi. Satu radio terkena gempa hebat dan terbakar dan satu lagi disegel oleh Balai Monitoring. Dengan demikian tinggal tiga radio yang beroperasi. Di luar itu, ada beberapa radio komunitas yang juga berdiri. Radio komunitas Muhammadiyah di Banda Aceh dan Radio Komunitas Matahari di Meulaboh yang dibantu pendiriannya oleh KBR 68H berdiri bahkan pada bulan-bulan awal pasca tsunami. Di luar itu, Radio Komunitas Suara Perempuan di Banda Aceh dan Radio Rapensa di Meulaboh telah kembali berdiri. Dengan demikian, pada masa tersebut paling tidak masih berdiri delapan radio komunitas.

Menurut penjelasan yang disampaikan Ketua Jaringan Radio Komunitas Nanggroe Aceh darussalam (JRK-NAD), Teuku Ambral, berkaitan dengan keberadaan radio di Aceh sebelum dan sesudah tsunami dalam kaitannya untuk mengisi kekosongan informasi di udara Aceh sebagai berikut :

”....Dari peta persebaran radio, tampak hampir semua radio, baik itu komunitas maupun komersial berkembang di wilayah perkotaan. Ada tiga kluster perkembangannya, yakni Banda Aceh dan sekitarnya, Kota Lhoksemae dan sekitarnya, serta Meulaboh dan sekitarnya. Sedangkan wilayah-wilayah lain, seperti wilayah pantai timur dan utara dan sebagian besar di wilayah Aceh Besar serta pantai timur, kala itu masih menjadi wilayah *blank spot*. Kasus yang lebih parah lagi adalah wilayah pantai barat. Setelah Lhoknga menuju pantai barat sampai dengan Meulaboh praktis tidak ada akses warga korban terhadap informasi. Oleh karena itu, timbul ide bagaimana memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi korban yang berada di wilayah tersebut...”

Setelah sebelumnya di masa tanggap darurat untuk memfasilitasi keberadaan radio komunitas di Aceh di inisiasi dalam program *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet), maka dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi dilanjutkan dalam kegiatan yang diberi nama *Aceh Reconstruction Radio Network* (ARRNet). Program ARRNet tidak lain akan kelanjutan dari program AERNet yang bertujuan untuk mengembangkan komunikasi dua arah antara warga korban dengan penyedia bantuan. Secara sederhana, program ini selain membantu pendirian radio komunitas juga menyediakan website sebagai wadah informasi

dari bawah yang diharapkan dapat direspon oleh para penyedia bantuan. Dari sisi substansi material, konten dari website merupakan konten yang berasal dari masyarakat, yang sebagian berasal dari konten radio komunitas. Titik yang dikembangkan untuk pendirian radio komunitas adalah wilayah yang terkena dampak tsunami di sepanjang pantai barat, utara sampai ke timur.

Menurut Afrizal, yang kemudian dalam program ARRNet ini menjadi *Knowledge Development Officer* (KD Officer) mengatakan :

“...Program ini diawali dengan pendirian radio komunitas baru. Namun agak berbeda dengan pendirian radio di masa awal tanggap darurat. Proses pendirian kali ini lebih menekankan pengorganisasian ditingkat basis warga terlebih dahulu. Dari proses pengorganisasian hambatan utama adalah sulitnya menempatkan isu komunikasi pada kepentingan merupakan gejala umum pada wilayah-wilayah terkena dampak tsunami...”

Pada awal tahun 2006, sewaktu program ARRNet digulirkan, terlebih dulu dilakukan pemetaan para pihak (*stake holders*). Dalam kasus ini muncul masalah, dimana masyarakat yang didekati menolak. Keengganan warga biasanya selalu membandingkan dengan jenis dukungan lain yang diberikan oleh donor atau LSM yang datang ke Aceh. Hal ini dibenarkan oleh Afrizal, seperti penuturannya di bawah ini :

“...Dalam masa ini agak susah menjelaskan pada masyarakat karena mereka tidak mengerti. Mereka bilang butuh rumah dan tidak butuh radio. Makanya ketika kami menawarkan ini harus menjelaskan sedetail mungkin dan kami melakukan pendekatan serius dengan kepala desa, tokoh desa dan tokoh pemuda....”

Dalam proses dengar pendapat yang dilakukan oleh relawan ARRNet, pendekatan dengan tokoh-tokoh informal warga dianggap perlu agar terdapat kesamaan visi mengenai program bantuan radio komunitas. Proses ini membutuhkan waktu pengorganisasian yang berkisar antara tiga sampai enam bulan. Namun tidak semua proses pengorganisasian berjalan mulus, selain karena isu radio komunitas belum menjadi bagian dari prioritas warga pengungsi, juga banyak dari warga yang maih berkuat pada upaya-upaya kembali pada kondisi semula.



Bila dilihat dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat masih terpuruk akibat kehilangan lapangan pekerjaan pasca tsunami. Disamping itu, masih terdapat warga hingga awal tahun 2006 yang tinggal di tenda-tenda darurat. Sementara itu, bantuan-bantuan yang datang sering tidak terkoordinasikan dengan baik, justru menimbulkan permasalahan tersendiri. Tidak jarang timbul konflik antara pemberi bantuan dengan kelompok warga, atau bahkan konflik antar warga penerima bantuan. Pada kasus di luar Aceh, persoalan dan konflik warga sering dapat terselesaikan dengan adanya radio komunitas yang menjembatani komunikasi warga. Namun, di Aceh, dengan situasi yang kompleks ini nampak warga korban memerlukan pembuktian terlebih dahulu ketimbang berangkat bersama-sama dari awal dalam mengawal pendirian radio komunitas.

**Tabel 4.2**  
**Lokasi dan Jumlah Radio Komunitas Program AERNet/ARRNet**  
**Dalam tahun 2006-2008 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Kabupaten	Jumlah Radio	Kecamatan
Banda Aceh	1	Meuraxa
Aceh Besar	10	Lhoong, Leupung, PeukanBada, Lhoknga, Darussalam, Baitussalam, Darussalam, Mesjid Raya dan Suka Makmur
Pidie/Pidie Jaya	6	Batee, Pante Raja, Jangka Buya, Kembang Tanjung, Simpang Tiga dan Muara Tiga
Bireuen	6	Jeunib, Samalanga, Simpang Mamplam, Gandapura, Kuala dan Peudada
Aceh Utara	5	Dewantara, Seuneudon, Samudera, Muara Batu dan Lapang
Aceh Jaya	4	Kecamatan Krueng Sabe, Teunom, Setia Bakti dan Jaya
Aceh Barat	4	Samatiga, Merurebo, Pante Cermin dan Arongan Lambalek
Simeulue	1	Sinabang

Dalam dua tahun proses dilakukan semenjak awal tahun 2006 hingga akhir tahun 2008 telah berdiri 37 stasiun radio komunitas yang baru. Keberhasilan ini diikuti perbaikan bertahap atas pendirian kembali lima radio komunitas yang pernah dirintis oleh AERNet. Sehingga total radio komunitas di Aceh saat ini yang di kembangkan oleh *Combine Resource Institution* berkisar 37 stasiun radio yang tersebar seluruh di wilayah Aceh.

### 4.3. Implementasi Perkembangan Radio Komunitas Dalam Penanggulangan Bencana

Peran signifikan radio komunitas dipengaruhi oleh pemanfaatan perangkat teknologi komunikasi dan informasi lain dalam mendukung proses komunikasi dan distribusi informasi. Masing-masing perangkat infrastruktur tersebut dengan segala kelebihan dan keterbatasan, saling mendukung untuk menyesuaikan dalam situasi dan kondisi lapangan.

Memang harus diakui bahwa, suatu lembaga penyiaran seperti sebuah radio komunitas tidak bisa dituntut untuk mampu berperan di segala bidang; dia tidak harus menjadi "*super power*". Namun, harus dipahami juga bahwa radio komunitas sedikit banyak merupakan perwujudan dari sebuah lembaga warga atau masyarakat sipil karena yang bergiat di dalamnya adalah masyarakat setempat. Sebagai sebuah lembaga perwakilan warga itu maka sebuah radio komunitas layak pula untuk mengemban tugas untuk berperan sebagai salah satu tokoh terdepan dalam penanggulangan bencana di wilayah tempatannya.

Kegiatan penanggulangan bencana dalam berbagai tahapan situasi bencana hampir dapat dipastikan adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak, dengan peran masing-masing. Tidak ada satupun pihak yang dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana tanpa dukungan pihak lain. Demikian juga dalam sektor informasi dan komunikasi, pengembangan jaringan kerja mendukung penanganan bencana menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh Hamdani, selaku Ketua Ikatan Radio Komunitas Aceh Utara (IRKOM-AU). Menurut ia :

"....Rasanya kalau kami berjalan sendiri-sendiri tanpa bantuan pihak luar mungkin radio komunitas di Aceh tidak mungkin ada. Kami dalam mengembangkan jaringan sampai sekarang masih melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kami. Begitu halnya ketika dulu radio komunitas ikut ambil peran dalam penyaluran bantuan tsunami. Bahkan lembaga pemberi bantuan ikut melibatkan radio komunitas dalam menyebarkan informasi jenis bantuan apa yang akan mereka salurkan atau malah sebaliknya. Jadi seperti saling membutuhkan..."

Dalam mendukung proses penanggulangan resiko bencana diperlukan pemetaan sumberdaya manusia. Sumberdaya disini meliputi sumberdaya dalam wujud fisik dan dalam wujud non-fisik. Sumberdaya yang bersifat fisik tentu saja adalah benda, sarana, atau perangkat yang memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Sementara, sumberdaya yang bersifat non-fisik adalah kumpulan dari pengetahuan dan kemampuan yang melingkupi sumberdaya yang bersifat fisik tadi. Sebagai contoh, sistem informasi dan telekomunikasi adalah salah satu sumberdaya utama yang mampu mendukung upaya penanggulangan bencana.

Dalam sifat fisiknya, sumberdaya ini akan mewujud dalam berbagai peralatan, seperti telepon, komputer, atau radio. Dalam sifat non-fisiknya, sumberdaya ini akan dapat diwujudkan dalam bentuk kemampuan mengolah pesan untuk disampaikan melalui radio komunitas. Radio komunitas merupakan media komunikasi yang relatif secara teknis bisa dibuat dalam keadaan darurat seperti yang telah dilakukan di Aceh. Dalam usaha memberikan pertolongan dan pemulihan korban bencana tersebut diperlukan media komunikasi informasi dan transportasi yang mudah dan cepat. Pengalaman yang telah dilakukan CRI di Aceh dalam program AERNet bisa menjawab penjelasan di atas, seperti yang dijelaskan Agustiawan berikut ini :

”...Dari pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan di Yogyakarta dan umumnya di pulau Jawa dalam memberdayakan radio komunitas sebagai media informasi warga, kami memutuskan untuk membantu Aceh lewat radio komunitas. Kondisi di Aceh tentunya berbeda dengan apa yang telah kami lakukan di daerah lain. Ini menjadi program CRI pertama dalam kondisi darurat yang kemudian menjadi media pembelajaran bagi daerah lain bila seandainya nanti terjadi bencana. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil setelah radio komunitas berhasil didirikan di Aceh, terutama dalam hal bagaimana mempersiapkan masyarakat dengan segala perangkatnya...”

Pada situasi dan kondisi seperti itu, media komunikasi dan informasi yang paling memungkinkan adalah radio komunitas. Media komunikasi lain misalnya radio komersial berdasarkan pengalaman hingga hari ini, informasi kurang menyentuh kebutuhan dan kepentingan korban bencana atau lapisan masyarakat

bawah. Hal ini pada dasarnya radio komunitas merupakan ujung tombak pelayanan informasi bagi masyarakat yang tak terjangkau radio siaran komersial.

Berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membangun radio komunitas dalam kondisi darurat, yang disarikan dari berbagai sumber.

### 1. Faktor teknis

Pemilihan frekuensi di kanal FM dengan dasar pertimbangan, diantaranya :

- a. Kanal FM relatif masih kosong di daerah-daerah dengan memilih frekuensi sesuai yang dialokasikan pemerintah untuk radio komunitas.
- b. Masih memungkinkan terhindar dari benturan frekuensi dengan radio siaran swasta di kanal FM karena radio komunitas memiliki daya pancar rendah.
- c. Diperkirakan lebih cepat dalam meraih pendengar karena kebanyakan pesawat penerima siaran radio FM lebih mudah dioperasikan dan bersuara jernih.

### 2. Faktor peralatan

- a. Pengadaan pemancar yang berkekuatan 50 watt, dengan catatan bila pengoperasian terpusat pada satu lokasi. Namun bila lokasi bencana lebih luas dengan sebaran pengungsi berjauhan sangat dimungkinkan penambahan kekuatan pemancar sampai 100 watt.
- b. Pengadaan peralatan antena dan alat-alat siaran di dalam studio darurat.
- c. Peralatan komunikasi seperti *handphone*, *handy talky* dan radio penerima (*radio receivers*) diperlukan oleh para korban bencana untuk dapat mendengarkan informasi apa saja yang terjadi disekitarnya, termasuk keadaan alam pasca gempa untuk peringatan dini jika ada bencana susulan.

### 3. Penyelenggaraan operasional dilapangan

- a. Diperlukan suatu lembaga, atau relawan yang akan mendampingi jalannya penyelenggaraan komunitas darurat tersebut. Di Aceh, kelahiran radio komunitas Samudera FM, difasilitasi oleh *Combine Resource Institution* (CRI) asal Yogyakarta yang digerakkan oleh relawan mereka yang

tergabung dalam program kegiatan *Atjeh Emergency Radio Network* (AERNet).

- b. Selain keterlibatan lembaga dan para relawan, tentunya operasionalisasi siaran radio komunitas akan melibatkan banyak pihak, terutama aparat desa, polisi, organisasi jaringan radio komunitas setempat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah dan unsur terkait lainnya.

#### 4. Program siaran

Dalam rencana program radio komunitas tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak baik para birokrat, LSM, pers, kampus, lembaga pemberi donor maupun masyarakat pendukung lainnya yang peduli dengan bencana gempa dan tsunami. Siaran lebih dititik beratkan pada informasi ketimbang hiburan, seperti pokok siaran berikut :

- a. Siaran yang berisi informasi bagi para korban untuk mendapatkan bantuan berupa kesehatan, tempat tinggal, makanan, air bersih dan informasi yang berkenaan dengan kebutuhan langsung pengungsi/korban bencana.
- b. Siaran yang bersifat *trauma healing* pasca bencana secara langsung di studio dengan menghadirkan korban dan narasumber yang kompeten.
- c. Siaran yang berisi tentang mitigasi bencana bila terjadi bencana susulan
- d. Siaran yang berisi berita tentang keberadaan keluarga korban
- e. Siaran yang berisi siraman rohani untuk memulihkan beban psikologis dan mental korban bencana.

#### 5. Biaya operasional

Menyangkut anggaran biaya operasional radio komunitas disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Terutama menyangkut biaya pembelian peralatan, yang biasanya sudah dibeli/ditanggung oleh lembaga fasilitator radio komunitas. Hanya yang perlu dipikirkan biaya oprasional setelah radio berdiri. Hal ini disusun kembali oleh forum warga untuk menyusun anggaran bersama dengan Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK).

Untuk mendukung eksistensi radio komunitas itu sendiri, selain kesiapan yang perlu dilakukan seperti dijelaskan diatas, setidaknya dalam rangka penanggulangan bencana perlu juga diperhatikan kondisi sumberdaya, baik itu secara internal maupun eksternal. Keberadaan sumberdaya ini menjadi kunci yang harus terpetakan oleh pegiat radio komunitas. Keenam sumber daya itu meliputi :

1. Sumberdaya Alam
2. Sarana dan prasarana
3. Sistem Informasi dan Komunikasi
4. Sistem Transportasi
5. Sumber Energi
6. Sumberdaya manusia

Sumberdaya alam sangat berkaitan erat dengan sumber penghidupan dan kehidupan. Sebagai langkah persiapan menanggulangi bencana, masyarakat harus sudah siap dengan pengadaan sumberdaya alam, baik untuk bertahan hidup maupun untuk membangun kembali peradaban pasca bencana. Sumberdaya alam ini antara lain dapat berbentuk mulai dari bahan makanan. Jaminan ketersediaan berbagai bahan tersebut, termasuk langkah-langkah pengelolaannya oleh masyarakat atau pemerintah, harus mulai terekam oleh radio komunitas. Radio komunitas dapat mulai aktif memberitakan berbagai potensi tersebut, sehingga ketika pada saatnya diperlukan maka radio komunitas dapat menjadi acuan informasi yang tabu benar kondisi lingkungan. tempatannya.

Keberadaan berbagai sarana publik seperti kantor kepala desa atau kecamatan, rumah sakit dan sarana yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus mendapat perhatian masyarakat. Radio komunitas haruslah dapat memberikan informasi mengenai lokasi tempat berbagai sarana itu berada, lengkap dengan kondisi terkininya, juga potensi ancaman yang mungkin saja terjadi dalam proses pemulihan. jika kondisi berbagai sarana dan prasarana yang ada dikawasan tersebut tidak cukup atau buruk, maka melalui kekuatan pemberitaannya, dimana radio komunitas dapat mendorong adanya perbaikan sarana.

Pengalaman radio komunitas Samudera FM, ada benarnya juga bisa mengikuti penjelasan di atas seperti dijelaskan oleh Karimuddin sebagai berikut :

”....Dalam setiap kesempatan menyiarkan berita, kami selalu menyelipkan informasi tentang fasilitas-fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan dalam melindungi diri bila terjadi bencana susulan. Kami merancang informasi demikian agar ada pendidikan bagi korban dan pendengar radio kami. Bahkan dalam masa pemulihan, kebutuhan-kebutuhan korban selalu kami udarakan agar didengar sama sipemberi bantuan. Bahkan pernah korban menerima bantuan tapi tidak bisa pakai, dengan ada radio komunitas mereka bisa menyampaikan masalah tersebut kepada kami dan lalu disiarkan...”

Dengan pemetaan dan pencatatan kondisi sarana prasarana ini, radio komunitas juga dapat memanfaatkannya untuk mencari alternatif tempat jika suatu ketika studio radio mereka harus pindah (diungsikan) akibat bencana tertentu. Dalam kaitannya dengan radio komunitas, para pegiat radio komunitas harus bisa memetakan perangkat dan kegiatan komunikasi apa saja yang berlaku di tempatnya. Sebagai contoh, bisa dipetakan mulai dari keberadaan jaringan telepon, siaran radio apa saja yang ada, siaran televisi apa saja yang dapat ditangkap, apakah ada jaringan internet, dan seterusnya. Termasuk juga keberadaan media massa cetak, tingkat keterpakaian papan pengumuman, keefektifan pamakaian selebaran, dan sejenisnya.

Lebih jauh lagi, harus diketahui pula bahasa apa saja yang biasa digunakan dan dipahami oleh masyarakat setempat. Pengetahuan akan hal-hal tersebut akan membekali para pegiat radio komunitas ketika harus mencari informasi dan/atau menyebarluaskan informasi pada situasi darurat. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai jenis sistem yang ada maka mereka akan memiliki beragam alternatif perangkat yang bisa dipakai, yang jika satu perangkat tidak berfungsi maka mereka bisa beralih menggunakan perangkat yang lain.

Dalam pemetaan bencana, sektor transportasi memegang peranan penting menuju akses daerah bencana. Pada situasi darurat dan pemulihan, sistem transportasi akan menjadi sangat vital dan cukup menentukan akan seberapa cepat proses evakuasi hingga pemulihan berlangsung. Radio komunitas jika cukup tanggap dan siap dengan segala data diatas maka ketika diperlukan, mereka dapat

menjadi sumber informasi yang akurat bagi masyarakat. Secara internal, bagi radio komunitas sendiri, pengetahuan akan hal di atas juga akan membantu mereka sendiri jika suatu saat studio radio komunitas mereka sendiri terancam dan harus diungsikan, sehingga harus cepat menentukan dengan moda transportasi apa dan lewat jalur mana mereka akan mengungsi.

Berbagai perangkat dan sarana di nomor-nomor sebelumnya akan sulit atau bahkan tidak berfungsi jika tidak ada sumber energi. Sumber energi disini bisa meliputi bahan bakar tenaga angin, dan tenaga binatang. Fungsi utamanya jelas untuk menjadikan seluruh perangkat dapat berfungsi karena jelas seluruhnya membutuhkan energi, termasuk manusia yang memerlukan energi pula. Keberadaan sarana pemasok energi mulai dari tempat pengisian ulang bahan bakar hingga instalasi listrik akan sangat penting untuk diketahui, tidak hanya keletakannya tetapi juga kondisi dan status persediaan energinya secara berkala.

Dengan melihat dari beberapa pemaparan tersebut memang akan sangat banyak dan berat jika itu semua dilakukan oleh sebuah lembaga radio komunitas saja. Sebuah radio komunitas tak harus menjadi lembaga yang "*super power*", bisa mengerjakan semuanya. Namun, tetap penting untuk bisa mengetahui kondisi semua hal di atas. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pegiat radio komunitas dapat mengembangkan jaringan dengan berbagai organisasi dan kelompok yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Organisasi dan kelompok-kelompok itulah yang bisa jadi memiliki beragam informasi mengenai berbagai hal seperti yang telah disebutkan di awal. Jadi, pegiat radio komunitas tinggal mengolah dan menyebarkanluaskannya, tentunya dengan tetap menyebutkan dari mana dan siapa sumber informasi tersebut diperoleh. Seperti yang diutarakan oleh Direktur Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, Juanda Jamal berikut ini :

"....Melalui keberadaan lembaga yang bergiat di tingkat regional akan memiliki jaringan kerja yang luas dengan dunia internasional. Tentu saja, itu akan berkaitan dengan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat jika mampu berjejaring dengan mereka, mulai dari transfer pengetahuan hingga bentuk dukungan lainnya yang mungkin bersifat fisik. Keberadaan lembaga regional ini biasanya muncul di wilayah



kerja yang memiliki cakupan wilayah dampak yang luas dan meliputi beberapa negara. Organisasi seperti ini biasanya memiliki jaringan dengan banyak lembaga pemerintahan sampai beberapa kelompok masyarakat secara langsung jika memang ada kaitan erat dengan ruang lingkup di atas...”

Kehadiran lembaga donor internasional seperti yang terjadi di Aceh yaitu badan-badan kerja yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk kasus Aceh, lembaga donor berlomba-lomba datang kesana. Mereka ini rata-rata telah memiliki kantor di Jakarta. Dalam mengembangkan berbagai program kemitraan dengan banyak komunitas di berbagai daerah di Indonesia, mereka ini menggandeng lembaga lokal seperti *Combine Resource Institution* (CRI). Lembaga-lembaga internasional ini, tentunya yang berkaitan langsung dalam penanggulangan bencana rutin menyebarluaskan informasi mitigasi bencana melalui mitra kerjanya, seperti dengan pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang bergerak langsung dilapangan.

Keberadaan lembaga-lembaga ini beragam. Saat ini ada banyak LSM yang bergerak di daerah-daerah pelosok Indonesia dan mengembangkan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Dengan berjejaring bersama LSM-LSM ini, manfaat yang bisa didapatkan meliputi berbagai bentuk pengetahuan, kemampuan untuk mengorganisasikan kegiatan, hingga dukungan yang bersifat fisik, seperti bantuan pembangunan infrastruktur komunikasi yang dilakukan oleh LSM. LSM dengan kompetensi dan kapasitasnya biasanya akan punya jaringan yang luas dan kuat dengan berbagai lembaga lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan komunikasi yang baik, radio komunitas dapat membangun kemitraan dengan berbagai LSM yang bergiat di wilayahnya untuk dijadikan sebagai narasumber informasi penting, atau juga bahkan sebagai pendukung program kegiatan radio komunitas itu sendiri.

Adapun peran pihak swasta yang biasanya tampil dalam kelompok-kelompok usaha, biasanya memang mengambil peran yang berbeda. Mereka kadang tidak secara langsung memiliki program kegiatan untuk penanggulangan bencana. Namun, pihak ini punya potensi memiliki sumberdaya yang diperlukan oleh masyarakat dalam menanggulangi bencana, misalnya sarana telekomunikasi dan

sarana transportasi. Untuk bisa memanfaatkan dukungan dari pihak swasta, jaringan kemitraan harus dibangun terlebih dahulu. Tidak harus secara langsung oleh radio komunitas atau bisa dengan mendorong lembaga-lembaga warga atau LSM untuk membuka jaringan dengan swasta dan mengembangkan program bersama. Berikut penjelasan Safir, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah NAD :

”...Kalau kaitannya dengan radio swasta sebelum tsunami memang mereka sudah membangun jaringan dengan radio dari Jakarta dan luar negeri. Tapi di Aceh sebelumnya tsunami belum ada radio komunitas. Saya rasa mungkin karena kedekatan ini, jaringan radio swasta tadi datang ke Aceh bikin radio sementara. Namun sifatnya kan darurat seperti radio Suara Aceh. Kita beri ijin siaran sementara untuk mengisi kekosongan informasi waktu itu. Setelah keluar masa tanggap darurat jaringan radio-radio ini baru menghidupkan radio swasta yang kena tsunami. Tapi ada juga jaringan radio swasta ini mendirikan radio darurat di Aceh seperti yang dilakukan kelompok KBR 68H, diluar apa yang telah dilakukan AERNet...”

Hasil amatan penulis dilapangan, keberadaan kelompok media modern ikut mengambil peran dalam kapasitasnya sebagai penyebar luas informasi. Radio komunitas dapat berjejaring dengan media-media ini, baik cetak maupun elektronik yang ada mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Kegiatannya bisa berlangsung dua arah. Radio komunitas dapat memanfaatkan informasi-informasi dari media massa yang dianggap penting dan tepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Sebaliknya, media massa dapat pula menjadikan radio komunitas sebagai narasumber mengenai situasi terkini di wilayah tersebut untuk kemudian disiarkan atau diinformasikan kepada khalayak yang lebih luas melalui media tadi.

Kerjasama dengan kalangan akademis, apakah itu kampus ataupun perorangan, sangat berguna dalam merancang konsep penanggulangan bencana, terutama dalam mendapatkan data dilapangan. Seperti halnya ketika program AERNet dilaksanakan di Aceh. Pengalaman penulis waktu itu sebagai orang kampus ikut terlibat dengan relawan radio komunitas dalam pelatihan manajemen radio komunitas bagi korban tsunami di kampus Universitas Malikussaleh Lhokseumawe pada 17 sampai 19 April 2005. Dengan bermitra dengan kalangan

akademis, radio komunitas dapat mengembangkan manajemen siaran dan program-program yang berkualitas.

#### **4.3.1. Mengelola Informasi dan Komunikasi Dalam Bencana**

Sebelum melangkah lebih jauh kedalam konteks pengulangan bencana, maka perlu diketahui tentang gambaran informasi yang bertumpu pada masyarakat. Dalam pengembangan sistem informasi yang bertumpu pada masyarakat akan sulit dilakukan tanpa membangun institusi warga sebagai infrastruktur sosialnya. Lalu sistem informasi itu sendiri harus dapat menjadi bagian dari suatu komunitas, misalnya dalam komunitas korban bencana ia harus mengenal berbagai persoalan yang akan muncul bila bencana tiba dan memiliki pengetahuan dalam menghadapi bencana. Dengan kekuatan sistem informasi itu juga diharapkan mampu membangun pengetahuan kolektif dan memberi arah untuk pemecahan masalah sehingga mampu memicu terjadinya inovasi. Istilah yang tepat untuk yang terakhir ini adalah sistem informasi yang cerdas.

Untuk kepentingan yang lebih besar karena pembangunan wilayah dan kota yang terkena dampak bencana, sistem informasi ini perlu juga diberi muatan yang telah diolah khusus menjadi bahan untuk pengambilan keputusan strategis, seperti muncul isu-isu tentang kebutuhan korban bencana, fasilitas publik, keberpihakan pada korban, arah bantuan yang relevan dan kemudahan dalam memperoleh akses informasi. Dengan demikian, paling tidak ada dua pilar utama dalam pengembangan sistem informasi yang bertumpu pada masyarakat, yaitu pilar kelembagaan, yang diharapkan dapat memiliki sifat-sifat demokratis, non-diskriminatif, transparan, dan akuntabel, dan pilar sistem informasi, yang diharapkan dapat memiliki sifat-sifat strategis dan cerdas.

Kedua pilar tersebut bisa diperan-fungsikan oleh radio komunitas dan jaringan radio komunitas. Berikut penjelasannya :

## 1. Pilar Kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian yang terpenting di dalam bangunan masyarakat informasi, bisa dikatakan sebagai tulang punggungnya. Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Dalam periode transisi ini, perubahan kelembagaan pemerintah di aras lokal ke arah yang demokratis, transparan, bersih dan tanggap terhadap kebutuhan lokal (komunitas) berlangsung dengan sangat lambat. Kelambatan proses transisi tersebut karena unsur-unsur birokrasi pemerintah cenderung mempertahankan kontrol terpusat atas masyarakat.

Untuk dapat melakukan tekanan dan kontrol terhadap pemerintah, kalangan marginal di tingkat komunitas perlu diberdayakan. Pemberdayaan kalangan marginal harus mengikutsertakan kalangan-kalangan menengah di komunitas. Kalangan marginal difasilitasi untuk melakukan dua hal, seperti mengidentifikasi kebutuhan pembangunan mereka dan mengidentifikasi potensi pembangunan yang bisa dimobilisasi sebagai kekuatan swadaya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian kalangan menengah tidak memandang kalangan marginal sebagai beban.

Untuk mempercepat proses transisi, dan sekaligus mengartikulasikan kepentingan komunitas, jaringan masyarakat sipil (*civil society*) ditingkat kabupaten/kota perlu diaktifkan sebagai sistem pendukung komunitas yang mengolah dan mengemas informasi yang dikumpulkan oleh radio komunitas untuk dijadikan alat bantu menekan dan mengontrol birokrasi pemerintah di tingkat desa atau kabupaten/kota melalui jaringan radio

## 2. Sistem Informasi

Bila pilar kelembagaan merupakan tubuh dan jiwa kolektif masyarakat, maka pilar sistem informasi merupakan pengelola muatan (*content management*) potensi, masalah dan kebutuhan kolektif masyarakat. Sistem informasi juga memfasilitasi kegiatan pembelajaran kolektif untuk membangun pengetahuan,

keterampilan dan motivasi masyarakat. Di dalam pilar kedua inilah peran-fungsi radio komunitas harus sangat maksimal.

Radio komunitas perlu mengembangkan sistem informasi berbasis komunitas yang dapat menjadi wahana untuk :

- a. Membangun pengetahuan kolektif antar warga dan antar komunitas yang mendorong munculnya berbagai pemikiran untuk terus-menerus memperbaiki keadaan;
- b. Mendorong tumbuhnya berbagai kearifan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan, mengatasi masalah dan konflik dengan memperhatikan potensi/muatan lokal;
- c. Membangun hubungan-hubungan dan sistem nilai komunitas yang produktif, dan berkeadilan

Untuk membangun isi informasi yang akurat dan terkini, tekanan pada pembentukan pilar kelembagaan lokal yang demokratis, inklusif, dan partisipatoris harus dibarengi dengan upaya memfasilitasi pembentukan pilar informasi yang bersifat *problem solving*. Warga suatu komunitas baru mau berpartisipasi aktif apabila mereka yakin bahwa *database* yang dibangun akan membantu mereka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Upaya pembentukan *database* yang bersifat *problem solving* diawali dengan pelatihan teknik-teknik *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*. Apabila *database* tidak bersifat *problem solving*, tidak akan ada insentif bagi komunitas untuk melakukan pengumpulan dan *updating* data dan informasi.

Upaya untuk menjaga keberlanjutan *database* komunitas tidak hanya dilakukan pada sisi pengumpulan informasi, yaitu mengupayakan agar karakter *database* bersifat *problem solving*, tapi juga pada distribusi informasi, yaitu menjaga supaya aliran informasi terjadi dua arah. Komunikasi dijaga mengalir dua arah, yaitu dari komunitas ke *stakeholders* di perkotaan dan sebaliknya. Dan inilah

tugas berat radio komunitas dan jaringannya. Seperti diungkapkan oleh Teuku Ambral berikut ini :

”....Kalau ditarik lurus dalam penanganan bencana di Indonesia yang baru mulai dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, paling tidak setelah tsunami di Aceh. Para pihak yang terlibat didalamnya mulai menerapkan standar dan norma-norma. Informasi yang lebih mengedepankan kepentingan korban dengan standar minimum yang harus dilakukan dan mendorong proses yang lebih koordinatif sifatnya. Meskipun proses dan prosedur sudah disosialisasikan dan banyak pihak-pihak yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan hal tersebut, tapi langkah itu belum dirasa mencukupi...”

Dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang disahkan tahun 2007 juga belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Berbagai masalah didalamnya masih terus diupayakan jalan keluarnya, diantaranya adalah bagaimana koordinasi dan kelembagaan yang tepat pada pelaksanaan dilapangan. Sekarang sebagian daerah telah memulai perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanggulangan risiko bencana setelah mengetahui bahwa wilayahnya memiliki potensi bencana. Namun sayangnya dalam berbagai prosedur yang telah disusun, termasuk juga Undang Undang Penanggulangan Bencana, kegiatan komunikasi dan informasi tidak menjadi bagian dari upaya pendukung yang patut disediakan oleh pembuat kebijakan, termasuk oleh pemerintah.

Oleh karena itu keberadaan radio komunitas merupakan bagian dari sektor komunikasi dan informasi, menjadi sangat penting perannya dalam proses penanggulangan resiko bencana. Berikut penjelasan Juanda Jamal, selaku Direktur Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh :

”....Apa yang telah dilakukan CRI di Aceh dalam program AERNet dan kemudian berlanjut di program ARRNet, ini menjadi bagian dari program kerja BRR juga. Sejak awal memang telah menjadi paling tidak, jika dilihat dari apa yang telah berhasil dilakukan radio komunitas pasca tsunami telah memberikan gambaran dan dukungan masyarakat yang cukup signifikan bagi proses penanggulangan resiko bencana...”

Memang, apa yang disajikan hanyalah pengalaman dari beberapa segelintir radio yang berhasil teridentifikasi. Di luar itu, dengan berbagai kejadian bencana

alam yang terjadi di Indonesia masih banyak pengalaman yang tidak terekam karena keterbatasan informasi. Satu hal yang pasti, pengalaman yang diuraikan merupakan proses-proses yang dialami oleh radio komunitas dengan persiapan dan perencanaan yang sangat terbatas sehingga bisa disebut dengan bekal pengetahuan penanganan bencana yang terbatas pula.

Meskipun dengan persiapan dan perencanaan yang minimal dan masih ada kesan tergesa-gesa, akan tetapi pengalaman dan langkah-langkah yang dijalankan radio komunitas perlu diangkat sebagai pelajaran yang berharga. Dengan segala keterbatasannya, peran radio komunitas dalam menghadapi bencana alam secara cukup signifikan dalam mempengaruhi proses percepatan informasi dan komunikasi bagi upaya pemulihan secara fisik maupun non-fisik. Tidak hanya informasi yang bersifat menunjang proses pemulihan fisik, pemulihan psikologis korban banyak pun mendapat dukungan dari siaran yang diproduksi oleh radio.

Hal ini dibenarkan oleh Hamdani, yang menjabat Ketua Ikatan Radio Komunitas Aceh Utara (IRKOM-AU), berikut petikannya :

"....Radio komunitas di Aceh Utara rata-rata memiliki program siaran yang sifatnya pemulihan mental. Acaranya bisa dalam bentuk siaran rohani, ceramah agama, atau mengundang korban tsunami untuk berbagi cerita. Kami pengelola radio komunitas sadar bahwa kami hadir memang karena tsunami dan kehadiran kami bisa memberikan hiburan menyejukkan dalam pemulihan beban psikologis. Pendengar menyukai acara-acara seperti ini. Kami menyusun program siaran berdasarkan hasil saringan dari pendengar sesuai keinginan mereka..."

Berbagai acara bincang-bincang yang melibatkan tokoh lokal hingga acara berbagi pengalaman antar korban yang siarkan radio komunitas menjadi proses *trauma healing* yang mampu membangkitkan kepercayaan diri korban. Keterbatasan jangkauan yang diperbolehkan dalam peraturan justru membuat radio lebih fokus pada upaya-upaya penggalian dan penggalan informasi mengenai pemulihan pada wilayah yang sangat spesifik. Selain itu, rasa kedekatan warga dengan radio dapat membangun hubungan emosional tersendiri.

Informasi yang akurat dalam persoalan penanganan bencana ini menjadi penting, terutama jika membicarakan hal lokasi, jumlah, jenis logistik, serta perkiraan ataupun potensi ancaman bencana yang kemungkinan berkembang. Informasi yang akurat dapat mengurangi atau mengefisienkan pekerjaan yang harusnya dilakukan beberapa kali, atau informasi yang akurat dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat pula. Hal ini seperti dijelaskan oleh Agustiawan, bahwa :

”...Menurut saya, media radio memiliki peran cukup signifikan untuk membangun kesadaran akan potensi terjadinya bencana di daerah masing-masing. Kesadaran tersebut dibangun lewat program siaran berupa konten-konten siaran yang mengarahkan bagaimana warga bersikap dalam menghadapi bencana jika memang wilayah yang dihadapi rawan atau berpotensi bencana. Program siaran dimaksud, selain bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan potensi atau kerawanan bencana diwilayahnya, juga menyampaikan petunjuk yang harus dilakukan manakala terjadi ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat kejadian alam...”

Satu hal yang menjadi permasalahan kemudian adalah kebanyakan warga dan juga radio komunitas di wilayah masing-masing tidak mengetahui apakah wilayahnya memiliki peluang atau potensi terjadinya ancaman atau bencana. Kedua, belum terdistribusikannya pengetahuan mengenai pengurangan resiko bencana kepada masyarakat. Selama ini kita belum memahami sepenuhnya soal kebencanaan dan belum menganggapnya menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Padahal, sebagai wilayah yang berada dalam *ring of fire* (cincin api; jalur gunung-gunung api di sepanjang pertemuan lempeng benua), Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap kejadian gempa dan tsunami, juga jenis bencana alam lainnya.

Oleh karena itu maka dalam penanggulangan bencana seperti yang telah berhasil dilakukan di Aceh, terutama keterlibatan radio komunitas didalamnya tak bisa dipungkiri lagi. Berikut petikan wawancara dengan Direktur Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, Juanda Jamal :

”...Belajar dari pengalaman di Aceh maka dalam pengelolaan bencana ke depan saya pikir perlu dimasukkan unsur-unsur pemanfaatan komunikasi dan informasi dalam upaya-upaya mitigasi dan kesiap-



siagaan, agar komunikasi dan informasi yang dikembangkan sejalan dengan proses manajemen penanggulangan bencana yang dijalankan para pihak tersebut, termasuk apa yang harus dilakukan oleh radio komunitas. Hal ini sangat penting menurut saya...”

Tidak pelak lagi, radio komunitas sebagai sebuah infrastruktur komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dalam merespon kondisi kebencanaan. Pemanfaatan perangkat komunikasi lain merupakan hal yang jamak dilakukan bagi upaya merespon situasi kebencanaan. Tidak lain adalah bertujuan untuk mempercepat agar prosentase informasi dapat segera diterima oleh yang membutuhkan serta memperbanyak penerima informasi dalam jangkauan wilayah geografis tertentu.

Hal ini dilakukan dengan menyandarkan pemahaman bahwa tidak semua orang memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga dengan berbagai media yang digunakan diharapkan akan semakin banyak orang yang terjangkau. Seperti yang diutarakan oleh Agustiawan berikut ini :

”...Satu hal penting yang perlu diterapkan dalam sistem tersebut adalah penyampaian informasi yang akurat. Namun demikian, pemanfaatan radio komunitas tidak semata-mata didasarkan pada kecepatan penerimaan informasi, memperbanyak penerima informasi, ataupun akurasi informasinya. Namun, penting juga bahwa bagaimana pertukaran informasi dan juga komunikasi dua arah dapat terbangun, sehingga sektor ini dapat berperan lebih optimal dalam penanganan bencana...”

Pada kasus gempa dan tsunami Aceh yang terjadi udara kosong karena tersedia komunikasi di ruang publik. Pengalaman di Aceh menjadi momentum dalam perbaikan persiapan penanggulangan bencana terutama dalam bidang komunikasi dan informasi.. Dengan demikian, sedikitnya ada empat hal penting dari sektor informasi dan komunikasi dalam mendukung proses penanggulangan bencana. Pertama, bagaimana informasi itu dapat cepat diterima oleh masyarakat. Kedua, bagaimana jumlah penerima informasi itu meningkat. Ketiga, penyampaian informasi yang akurat. Keempat adalah bagaimana komunikasi dua arah dapat terbangun, yang diterjemahkan melalui adanya umpan balik.

Disadari kemudian dalam kekosongan informasi, ketidaksiapan semua pihak dalam neghadapi bencana. Terutama karena tidak memiliki standar mitigasi

bencana. Sehingga ancaman adalah suatu kejadian yang mempunyai kemungkinan menjadi penyebab kerusakan dan kerugian terhadap kehidupan, harta benda, dan lingkungan. Ancaman yang telah terjadi dan merugikan tersebut disebut bencana. Dengan mengetahui apa saja potensi ancaman yang ada di sekitarnya maka sebuah lembaga radio komunitas akan mendapatkan sedikitnya tiga manfaat. Pertama, mengetahui tingkat resiko bencana dikawasannya, kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dikawasan tersebut. Ketiga, membantu proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan kawasan tersebut.

Oleh karena itu perangkat penyiaran di daerah-daerah perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri. Berikut petikan pendapat anggota KPI NAD, Safir :

”....Penyiaran Indonesia (Perangkat radio komunitas ini ternyata dapat mempercepat penggalan informasi penting yang kemudian dikomunikasikan secara lebih luas melalui stasiun radio komunitas, kepada khalayak ramai untuk dapat memahami langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan yang tidak dapat ditunda. Namun juga harus dipahami bahwa radio komunitas sedikit banyak merupakan perwujudan dari sebuah lembaga warga atau masyarakat sipil karena yang bergiat di dalamnya adalah masyarakat setempat. Sebagai sebuah lembaga perwakilan warga itu maka sebuah radio komunitas layak pula untuk mengemban tugas untuk berperan sebagai salah satu tokoh terdepan dalam penanggulangan bencana di wilayah tempatannya...”

Radio komunitas yang biasanya bergerak di tingkat desa bisa menjadi aktor yang mendorong adanya perhatian yang layak dari pemerintah daerah, nasional dan internasional. Langkah pemetaan potensi, perencanaan aksi, dan diseminasi berita sosialisasi di atas dilakukan oleh pegiat radio komunitas yang bersangkutan. Jika ada pihak lain yang membantu mendampingi, proses yang terjadi harus bersifat partisipatif atau partisipatoris seperti yang dilakukan *Combine Resource Institution (CRI)* di Aceh dalam program *Atjeh Emergency Radio Network (AERNet)* dan berlanjut pada *Aceh Reconstruction Radio Network (ARRNet)*.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan radio komunitas yang digerakkan oleh pegiat radio komunitas, dimana mampu bekerjasama dengan komunitas lainnya untuk mampu menjawab secara nyata persoalan apa saja yang

memang menjadi kebutuhan utama di daerah tersebut. Jadi, sebuah radio komunitas akan menjadi siap dalam proses penanggulangan bencana ketika lembaga itu mampu mempersiapkan diri dan komunitasnya, baik dari sisi fisik maupun non-fisik.

Kesadaran mengenai isu pengurangan resiko bencana masih terbatas pada pegiat-pegiat kelompok masyarakat sipil yang banyak terlibat dalam penanganan kebencanaan yang kemudian mereka terapkan dalam berbagai kegiatan advokasi mendorong kebijakan penanggulangan bencana yang lebih tepat. Untuk mengembangkan kewaspadaan bencana dalam kehidupan sehari-hari, radio komunitas memiliki peran yang cukup penting. Paling tidak kampanye mengenai kebencanaan dalam konteks kondisi lokal menjadi bagian dari perannya. Radio komunitas juga dapat mendorong lahirnya rencana-rencana komunitas dalam menghadapi dan mengupayakan pengurangan resiko bencana. Intinya adalah bagaimana radio berperan untuk mengangkat pengetahuan mengenai pengurangan resiko bencana agar warga komunitas terbangun kesadarannya untuk kemudian bersiap diri jika bencana benar-benar terjadi dilingkungannya.

Situasi yang sedikit berbeda adalah pada situasi tanggap darurat. Ketika semakin banyak orang dilapangan guna menjalankan aktivitas kemanusiaan, maka sedikit banyak isu mengenai keberadaan radio komunitas mereka ketahui dan sebagian dari mereka memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan. Sementara, di sisi pengelola radio sendiri justru hal sebaliknya terjadi. Menurut pendapat Afrizal :

”....Mereka lebih banyak melakukan upaya-upaya pemulihan diri dan keluarga, sehingga memang kegiatan di studio banyak ditinggalkan. Hal ini menjadi pengecualian di Aceh, karena radio komunitas didirikan setelah bencana terjadi dan di awal memang disebutkan bahwa radio dibangun sebagai radio tanggap darurat. Justru dari hal ini dapat dilihat kesiapan radio komunitas menghadapi resiko bencana menjadi penting. Dan hal ini harus diakui belum terjadi pada kebanyakan radio-radio komunitas yang pernah mengalami musibah bencana....”

Radio komunitas harus memiliki rencana tersendiri jika terjadi bencana, tidak hanya bagaimana berperan dalam menyampaikan informasi atau sebagai

media koordinasi pekerja kemanusiaan semata. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola situasi internal radio itu sendiri, yakni sebisa mungkin siaran tidak berhenti, kesiapan fisik bangunan studio yang lebih aman, sampai bagaimana mendesain penyelenggaraan format siaran darurat yang seperti apa.

Adapun persoalan yang perlu dipertimbangkan menjadi bagian dari rencana aksi radio komunitas ketika situasi bencana terjadi. Tentu, semua proses ini juga menyangkut bagaimana hal tersebut akan dilakukan yang tidak hanya melibatkan pengelola radio semata, tetapi juga jaringan kerja radio itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mengidentifikasi rencana aksi sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat bekerja bersama dalam jaringan kerja merespon bencana merupakan hal yang mutlak harus dirumuskan oleh radio komunitas.

Pengalaman kegiatan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi justru mampu melibatkan banyak pihak dalam menjalankan fungsi kegiatan siaran. Menurut Jaunda Jamal :

”...Pada kasus di Aceh ketika ratusan LSM dan lembaga donor, baik dalam dan luar negeri berdatangan, maka bisa dibayangkan bagaimana hiruk-pikuknya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Masing-masing perlu mengangkat programnya dan melihat programnya berjalan dengan baik di mata masyarakat penerima bantuan....”

Hampir semua radio komunitas di Aceh pada tahap ini bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyalur bantuan untuk mengkampanyekan programnya. jaringan kerja yang dikembangkan menjadi cukup luas. Namun, apakah radio komunitas sudah menemukan esensi sebenarnya mengenai isu penanganan krisis pasca bencana? Dari perspektif eksternal, upaya-upaya yang dijalankan seperti dalam penjelasan di atas bisa jadi benar adanya. Namun, dari sisi peran radio komunitas sendiri sebagai sebuah institusi yang memberdayakan komunitasnya melalui media masih menimbulkan sebuah pertanyaan serius jika dihadapkan pada fakta tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan masih belum banyak muncul. Bagaimana fungsi ini dapat berjalan dengan mendapat dukungan dari jaringan

kerjanya. Pengalaman di Aceh ketika beberapa radio komunitas kemudian bekerjasama dan mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga pemantau korupsi dapat dijadikan pelajaran penting.

Akan sama saja bohong jika setelah memiliki beribu perencanaan, tetapi hal itu semua tidak disebarluaskan, diinformasikan, atau disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait di wilayahnya. Hal ini dibenarkan oleh Teuku Ambral, bahwa :

”....Dalam sosialisasi peran ini adalah sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan jaringan kerja karena pada prinsipnya berbagai hal dalam penanggulangan bencana itu memang menjadi tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan. Lembaga radio komunitas hanyalah salah satu bagian yang akan mampu mendukung upaya tersebut dan tidak perlu memposisikan diri sebagai lembaga yang serba bisa dan serba tabu. Beragam kemampuan dan pengetahuan itu ada dan tersebar dibanyak pihak, dan radio komunitas dapat berperan untuk membangun jaringan pengetahuan itu agar bisa diketahui oleh masyarakat lokal di tempatnya berada...”

Pegiat radio komunitas sendiri berusaha melibatkan semua pihak dalam membangun jaringan dan relasi dengan semua pihak, tentu setelah memberdayakan partisipasi warganya sendiri. Pada prinsipnya, semua pihak yang akan dilibatkan memiliki kompetensi, kapasitas dan tingkat kepentingannya masing-masing jika dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan bencana di tingkat lokal tempat radio komunitas tersebut berada. Pegiat radio komunitas dapat mulai dengan menghubungi kontak-kontak utama dari pihak-pihak yang akan diajak bekerjasama, kemudian dikembangkan sebagai bagian jaringan kerja yang berkesinambungan.

Tujuan dari segala langkah yang diuraikan di atas adalah sebagai upaya persiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Secara khusus adalah untuk mempersiapkan sebuah lembaga dan stasiun radio penyiaran komunitas yang memenuhi syarat sebagai aktor pendukung upaya penanggulangan bencana. Dengan melakukan berbagai langkah pemetaan potensi ancaman dan pemetaan potensi sumberdaya tadi diharapkan sebuah radio komunitas dapat berperan pula

untuk mengurangi dampak bencana sejak awal, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

#### **4.4. Prospek dan Kendala Radio Komunitas di Aceh Pasca Gempa dan Tsunami**

Kebijakan penanggulangan bencana atau pengelolaan bencana adalah tindakan menyeluruh, baik sebelum kejadian maupun sesudah kejadian terjadi. Kegiatan ini meliputi perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi yang semuanya bersifat berkelanjutan. Untuk mendukung proses penanggulangan bencana ini diperlukan keterlibatan semua pihak, terutama dominasi peran pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut sehingga terkoordinasi dengan baik langkah-langkah penanggulangan bencana.

Sejak gempa bumi yang disertai gelombang tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, isu bencana menjadi sangat penting. Tayangan berita yang menyuguhkan kondisi terkini dari waktu ke waktu memaksa pikiran banyak orang untuk mengikuti secara cermat. Selain solidaritas yang terbangun begitu luar biasa, muncul pula ketakutan akan terjadinya kejadian serupa diwilayahnya. Kedatangan akan datangnya bencana besar tidak diikuti oleh bagaimana bersikap dan berbuat, sehingga beberapa kejadian gempa di daerah lain selalu diikuti kepanikan luar biasa karena adanya isu tsunami.

##### **4.4.1. Kesiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana**

Fakta menunjukkan bahwa pemerintah sampai saat ini dalam memahami pengelolaan penanggulangan bencana lebih fokus pada respon kedaruratan (*emergency response*). Sekalipun bantahan muncul dengan menunjukkan beberapa kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan, tetapi tidak cukup menunjukkan telah dilakukannya secara sungguh-sungguh pengurangan risiko bencana.

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Atau belajarliah dari pengalaman untuk hal yang terbaik. Begitu kata bijak diungkapkan. Sangat relevan tentunya dengan konteks Indonesia sebagai republik bencana, negeri yang kaya akan potensi ancaman dan selalu menjadi bencana setiap pemicu bahaya terjadi. Berbagai kejadian luar biasa kejadian bencana terjadi di sini. Musibah tsunami Aceh kemudian dijadikan momentum dalam membuat proses penanggulangan bencana yang terstruktur dan lebih baik.

Sebelumnya hampir semua kejadian bencana disikapi dengan kegagalan dalam penanganan. Bantuan darurat tidak kunjung sampai ke pengungsi. Bahkan jatuh korban akibat penanganan yang lamban. Koordinasi yang selalu menjadi masalah utama tak kunjung dibenahi. Mobilisasi sumberdaya yang sebetulnya tersedia untuk penyelamatan tidak dapat dilakukan dengan cepat karena terkendala dalam koordinasi. Problematika tanggap darurat saja tak kunjung selesai. Pengalaman atas kelemahan sistem dan operasional penanganan respon bencana dari satu kejadian ke kejadian masih tetap sama yakni sama-sama buruk yang menyebabkan penderitaan penduduk terkena bencana semakin bertambah dan berkepanjangan.

Permasalahan yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian seperti menggali informasi awal untuk memetakan kawasan rawan dan komunitas rentan bencana secara detil dan spesifik. Selama ini peta-peta yang dibuat selain tidak terkoordinasi dengan baik, juga terhenti setelah proyek pemetaan tersebut dilakukan. Selain itu, peta yang dibuat oleh banyak instansi tidak memiliki dasar data yang sama, sehingga tidak secara otomatis dapat digabungkan dan dioperasionalkan. Tambahan yang membuat miris adalah bahwa data statistik penduduk tidak diyakini kebenarannya, termasuk oleh pemerintah sendiri. Problematika ini berdampak pada persoalan teknis lainnya sebagai bagian penting dalam meredam risiko bencana. Kerja parsial, berorientasi pada proyek, dengan tidak terjadinya transparansi menggenapkan persoalan selain orientasi pembangunan masih ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata.

Hal teknis yang bersifat mendesak karena ancaman yang luar biasa besar adalah meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi ancaman. Daya tahan ini baru dapat dilakukan dengan baik dengan memberdayakan kekuatan berbasis warga itu sendiri sehingga warga tersadarkan dalam menghadapi ancaman atas keberlanjutan kehidupannya. Peningkatan daya tahan juga harus diimbangi dengan berbagai solusi dalam mengurangi kerentanan yang berkaitan dengan ekonomi warga. Sosialisasi dan pelatihan nyaris tak berarti ketika dibenturkan pada kebutuhan harian warga untuk hidup tidak diselesaikan atau ditangani.

Dalam menghadapi Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan kebutuhan sebagai pagar terakhir penyelamatan. Pemahaman yang sempurna atas sistem peringatan dini tentu menjadi kewajiban bagi pemegang mandat pelaksana negara untuk selanjutnya diterapkan sampai pada tingkat bawah. Implementasi kebijakan sistem peringatan dini yang bersifat resmi mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tanda-tanda yang tidak membingungkan. Sedangkan di tingkat lokal yang menjadi kebutuhan meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan dalam deteksi dini adalah bagaimana memahami tanda-tanda bahaya yang dapat berpotensi menjadi ancaman bencana.

Bagaimana jika hal-hal penting itu tidak dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana? Pepatah klasik mengatakan, keledai tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Keledai sebagai simbol kebodohan menunjukkan apakah penyelenggara negeri ini bisa dianggap tidak lebih pandai dari keledai dalam hal melindungi dan menyelamatkan warganya dari ancaman bencana. Mandat utama yang diberikan konstitusi sebagai janji kemerdekaan pada tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban perdamaian dunia.

Dalam ranah etika, tercakup banyak prinsip filsafat moral yang intinya mencari pemahaman atas keteraturan dalam upaya untuk mempertahankan sesuatu kepentingan, hingga upaya merekomendasikan suatu konsep perilaku, antara yang



benar dan yang salah. Dalam kaitan penganggulangan bencana saat ini, terutama yang telah dilakukan di Aceh pasca gempa dan tsunami menjadi momentum dalam mempersiapkan segala lapisan masyarakat didaerah lain dalam menghadapi bencana. Dengan menggalang segala elemen kekuatan masyarakat secara politik sebenarnya mampu untuk melakukan persiapan maupun tindakan penanggulangan. Namun, karena tidak dilandasi oleh moral yang baik untuk memulainya maka tindakan itu tidak terwujud dengan optimal karena persoalan rantai birokrasi.

Beberapa pihak memang menilai bangsa kita susah berubah dan belajar dalam pengalaman penganggulangan bencana sebelumnya. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana sudah mulai banyak bermunculan dengan melandaskan diri pada perubahan paradigma, dari reaktif responsif menuju pencegahan, tetapi pada praktiknya memang belum sepenuhnya tampak. Padahal, ada begitu banyak ancaman bencana yang potensial terjadi di Indonesia. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana di tahun 2006 hingga 2009 antara lain disebutkan ancaman-ancaman tersebut, mulai dari gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, topan dan angin kencang, epidemi/wabah/kejadian luar biasa, dan kegagalan teknologi, hingga kerusuhan/konflik sosial.

Secara teori pada saat ini telah mulai dipahami oleh berbagai pihak yang aktif dalam ranah ini, bahwa rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana ada dua hal. Pertama adalah dengan pengurangan ancaman bencananya itu sendiri. Kedua, pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana tersebut. Dalam praktiknya, kedua hal itu bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan fisik (antara lain dalam tahap mitigasi) Berta melakukan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Hal ini juga menjadi bukti atas penjaminan oleh undang undang bahwa peran masyarakat diakui dalam konteks penanggulangan bencana. Keberadaan radio komunitas dan praktik-praktik yang dilakukannya itu adalah salah satu wujud

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam perannya sebagai media, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 sebelumnya telah mengakui radio komunitas sebagai salah satu lembaga penyiaran yang berhak menyampaikan informasi ke masyarakat luas.

Meskipun demikian kesemua hal ini belum tersusun dalam bentuk dokumen apapun. Bahkan dalam berbagai prosedur yang disusun, termasuk juga Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kegiatan komunikasi dan informasi tidak menjadi bagian dari upaya pendukung yang patut disediakan oleh para pihak, termasuk oleh pemerintah.

a. Masyarakat lokal/komunitas

Subjek utama dari seluruh sistem ini adalah masyarakat lokal sendiri, yang didalamnya termasuk pula para pegiat radio komunitas. Dalam sebuah kelompok masyarakat di suatu wilayah, tentu akan bisa dijumpai suatu struktur pengorganisasian kelompok masyarakat, baik dalam bentuknya yang tradisional seperti kelompok etnis maupun dalam bentuknya yang lebih baru, seperti keberadaan RT/ RW. Di situ, biasanya sudah ada pembagian peran dan tugas. Dalam kelompok masyarakat setempat ini juga bisa dijumpai pula kelompok-kelompok usaha yang potensial memiliki berbagai sumber daya, seperti kendaraan, perangkat telekomunikasi, atau sumber energi.

b. Pemerintah daerah/lokal

Pemerintah daerah tentu saja bertanggungjawab untuk mempersiapkan kapasitas masyarakatnya yang siap menghadapi ancaman bencana. Radio komunitas yang biasanya bergerak di tingkat desa bisa menjadi aktor yang mendorong adanya perhatian yang layak dari pemerintah daerah yang bisa dimulai dari pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Dengan berjejaring dengan pemerintah daerah maka radio komunitas akan mampu mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menggali informasi

mengenai berbagai sumberdaya yang ada di wilayahnya.

c. Pemerintah pusat/nasional

Pada beberapa jenis bencana, ada yang ditanggulangi oleh beberapa bagian kerja dari pemerintah pusat secara langsung, walaupun secara teknis akan ada unit kerja yang ditempatkan di lokasi bencana. Namun, jika terjadi suatu kondisi yang tak kunjung membaik, kadang harus ditempuh upaya advokasi dengan berjejaring langsung ke pusat pemerintahan. Masyarakat setempat mengorganisasikan diri untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat agar permasalahan atas hak mereka bisa segera diselesaikan. Radio komunitas bisa berperan pula untuk menginisiasikan hal yang sama atau, paling tidak merekam semua langkah yang terjadi ketika kelompok masyarakat di tempatnya bergiat melakukan langkah-langkah tersebut.

**Tabel 4.3**  
**Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana**  
**(yang telah dilakukan di Indonesia)**

Fase Penanggulangan Bencana	Kegiatan On-Air	Kegiatan Off-Air
Pra-bencana	Menyiarkan informasi terkait potensi terjadinya ancaman dan/atau bencana	Mengorganisasikan komunikasi <i>off-air</i> (baik melalui perangkat komunikasi lain ataupun pertemuan warga)
Tanggap Darurat	Menyiarkan informasi (kondisi) darurat Menyiarkan berita seputar kebutuhan logistik, koordinasi bantuan, orang hilang; produksi program siaran <i>trauma healing</i> Memberitakan informasi cuaca dan perubahan iklim terkini	Melakukan koordinasi bantuan logistik, koordinasi kegiatan komunikasi harian tim relawan menjadi bagian dari sistem komunikasi melalui radio amatir/komunikasi (HT) antar siaga/informasi. Radio ikut mendistribusikan bantuan logistik kepada korban korban
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Sosialisasi dari penyedia bantuan, penyiaran program berita seputar keluhan dan komplain penerima bantuan rehabilitasi infrastruktur dan perumahan pascabencana. Dialog antara pengelola bantuan dengan warga penyampai/sosialisasi hasil rembuk warga korban atas bantuan yang diberikan oleh penyedia bantuan	Pengorganisasian komunitas untuk memproduksi materi siaran. Pertemuan warga yang diinisiasi radio untuk mengklarifikasi persoalan seputar bantuan.

Sumber : Combine Resource Institution (AERNet/ARRNet)

Ketiga tahapan diatas menjadi pentahapan berdasarkan situasi kebencanaan yang berlangsung. Tentu saja, kejadian dilapangan tidak sepenuhnya terkotak-kotak sesuai dengan penjelasan dalam tabel diatas. Penanganan ataupun kegiatan lain yang dijalankan oleh radio dapat dipastikan mengalami tumpang tindih antara satu tahap dengan tahap yang lain. penjelasan dalam tabel tersebut hanya untuk memberikan kecenderungan pada setiap tahapan saja, sehingga kadang-kadang program siaran yang berada dalam kotak tanggap darurat dapat saja masih dilakukan meskipun situasi atau tahapan sudah masuk dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Isi dalam tabel di atas dapat saja menjadi sebuah daftar panjang jika kasus-kasus yang teridentifikasi semakin banyak.

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih lemahnya kegiatan *on-air* maupun *of-air* yang dijalankan radio komunitas pada saat sebelum bencana. Kegiatan pra-bencana ini akan lebih banyak berwujud kegiatan menyiapkan warga (terutama berbagai upaya radio komunitas) untuk menghadapi ancaman bencana. Paling tidak upaya mitigasi merupakan langkah yang diperlukan pada tahap pra-bencana ini. Mitigasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan dalam bentuk perbaikan fisik, upaya-upaya penyadaran, maupun peningkatan kemampuan, melalui pendidikan pada masyarakat itu sendiri untuk mengurangi resiko bencana.

#### 4.4.2. Prospek Radio Komunitas di Aceh

Wajah Aceh kini telah berubah seiring bergulirnya proses perdamaian dan semangat berbenah untuk kembali bangkit dari berbagai bencana yang dialaminya. Seiring bangkitnya Aceh dalam alam perdamaian, masyarakat korban tsunami mulai menemukan kembali semangat dan kekuatan untuk kembali bangkit menunjukkan eksistensinya dalam setiap denyut proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Membangun kembali Aceh memang bukan pekerjaan yang mudah, harus ada perencanaan dan pemantauan jelas yang berkesinambungan agar semua proses pemulihan dapat berjalan maksimal sehingga dirasakan seluruh masyarakat Aceh khususnya. Untuk mendukung semua itu diperlukan suatu sistem jaringan informasi yang akan menjadi media untuk mendukung proses pemulihan Aceh. Sehingga dari data dan informasi akurat akan memudahkan pihak-pihak penentu kebijakan dan penyalur bantuan untuk memberikan kontribusi dalam pemulihan aceh secara tepat dan terarah.

Seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang tertatih-tatih, radio komunitas di Aceh pun mulai menunjukkan eksistensinya dalam memberikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pengungsian. Informasi seputar distribusi bantuan, kesehatan, informasi korban hilang dan selamat, pendidikan, *trauma healing* dan lain sebagainya di

kemas dalam program yang sederhana dan seadanya.

Untuk melihat peran strategis radio komunitas di Aceh, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nanggroe Aceh Darussalam, Safir, menjelaskan :

”...Radio komunitas yang bersiaran di kampung lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peluang yang besar untuk menjadi primadona masyarakat Aceh. Radio komunitas ibarat dokter praktek dipuskemas yang ada di desa-desa yang secara umum memiliki komitmen sosial bagi masyarakatnya. Hal ini bertolak belakang dengan radio swasta yang orientasinya bisnis dan mengambil untung. Ibarat dokter yang buka praktek di kota dan sudah jauh dari tanggung jawab sosialnya kepada msyarakat...”

Partisipasi masyarakat juga terlihat cukup tinggi, baik itu dalam pengelolaan maupun pemanfaatan radio komunitas sebagai media pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi ditingkatan komunitas setempat. Perlunya komunitas, apakah itu korban bencana, petani atau masyarakat adat dalam mengorganisasikan diri menyebarkan informasi tidak bisa dilepaskan dari makin menguatnya posisi informasi yang harus diterima masyarakat. Masyarakat komunitas yang berbasis informasi adalah masyarakat yang hidup berdasarkan informasi, atau menyumbang informasi untuk keberlanjutan pemberdayaan suatu komunitas.

Bukan hanya industri modern, industri tradisional juga iku mengendalikan aspek informasi dan pengetahuan kalau mau untung. Radio komunitas jadi salah satu pilihan untuk mengorganisasikan diri agar komunitas bisa berdaya dalam mempraktikkan kebebasan informasi. Melalui radio yang dikelola dari, oleh, dan untuk komunitas ini mereka bisa berbagi informasi dan meningkatkan posisi tawar. Tidak sekadar berbagi, keterbukaan informasi itu juga dapat mendorong terjadinya penyelesaian masalah warga. Selain itu radio komunitas juga bisa menjadi pengawal pelaksanaan pemerintahan ditingkat lokal.

Pengelolaan informasi melalui radio dapat mendorong demokratisasi, menjalin kedekatan antar warga dan membangun kepercayaan dalam membangun desa. Sebagai bagian desa besar bernama globalisasi, komunitas pun harus bisa

memanfaatkan peluang yang dihadirkan globalisasi itu sendiri. Teknologi informasi telah menawarkan peluang bagi komunitas untuk terlibat dalam produksi informasi itu. Maka komunitas juga harus bisa menggunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Radio komunitas juga tidak tergantung kepada kepentingan modal. Radio komunitas dapat menjadi alat untuk merumuskan dan menyampaikan secara lugas berbagai kepentingan-kepentingan komunitasnya yang sering diabaikan oleh lembaga-lembaga representasi, terutama di tingkat lokal. Dengan perkataan lain, komunitas menggunakan radio komunitasnya untuk mendorong agar kepentingan-kepentingan mereka masuk dalam kebijakan/keputusan publik. Pada tingkat tertentu peranan radio komunitas akan memaksa lembaga-lembaga representasi untuk melakukan fungsi yang seharusnya.

Khusus untuk Aceh menurut pendapat Ketua JRK-NAD, Teuku Ambral menjelaskan :

"...Kelebihan radio komunitas seperti sudah tergambarkan selama masa tanggap darurat di Aceh hingga proses rekonstruksi. Media penyiaran komunitas ini cukup besar mengambil peran ditengah masyarakat. Menurut saya geografis alam Aceh yang berpengunungan dan banyak memiliki pulau kecil memberikan peluang bagi radio komunitas untuk bisa mengambil peran lebih banyak lagi. Atau yang belum optimal dilakukan radio komunitas di Aceh, misalnya dalam penguatan perdamaian. Kehadiran radio komunitas yang ada di Aceh saat ini kedepannya bisa digunakan sebagai media rekonsiliasi dan reintegrasi proses perdamaian. Dimana informasi reintegrasi sangat cocok bila disampaikan melalui radio komunitas..."

Pengalaman yang terlihat dalam kemunculan dari komunitas pasca tsunami memperlihatkan antusias komunitas (terutama kaum muda) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan radio cukup tinggi. Tidak heran bila sebahagian penyiar terdiri dari kaum muda (berasal dari mahasiswa, pelajar dan pemuda-pemudi dari barak pengungsian) yang energik dan penuh potensi. Kehadiran radio komunitas telah menyediakan wadah bagi mereka untuk dapat menunjukkan semangat kreatifitas mereka yang selama ini nyaris pupus ditelan kondisi Aceh yang selama bertahun-tahun larut dalam kondisi konflik dan rawannya kondisi keamanan yang

menyebabkan tertutupnya akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat terutama melalui media radio.

Dalam mengisi keterbatasan informasi, radio komunitas dapat mengambil peran dalam penyediaan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan penguatan hak dalam memperoleh informasi yang kemudian diolahnya menjadi gagasan-gagasan pembangunan. Menurut Juanda Jamal, selaku Direktur Komunikasi BRR Aceh-Nias mengatakan :

”....Ada tiga momentum besar yang dapat dimainkan oleh radio komunitas dalam melaksanakan peran strategisnya di Aceh, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, perdamaian dan pemilu. Berkaitan dengan perdamaian, radio komunitas dapat memainkan peran sosialisasi dalam konteks pemenuhan hak-hak korban konflik, penguatan proses reintegrasi, penyelesaian masalah setelah perdamaian dan pegawalan implementasi MoU Helsinki...”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan radio komunitas di Aceh masih menggembarakan, tentunya berbeda dinamikanya dengan perkembangan radio komunitas di wilayah Indonesia lainnya. Walaupun pada intinya radio komunitas sesungguhnya memang hadir dalam ruang suara bagi mereka yang selama ini tidak dapat bersuara, serta ruang untuk berbagi solidaritas dan pengetahuan. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pengawalan yang tepat sehingga radio komunitas sungguh-sungguh berpijak pada komunitasnya, bukan pada program atau kepentingan politik dan ekonomi semata. Caranya yaitu dengan membangun kapasitas kerja radio komunitas, saling belajar, saling bertukar pengalaman. Belajar dari radio komunitas di daerah bencana, tantangan strategis radio komunitas terletak pada konsistensi tujuan dan sebagai media akar rumput yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kapasitas pengetahuan, ketrampilan dan kerjasama menuju kemandirian.

#### **4.4.2. Kendala Radio Komunitas di Aceh**

Selain kegunaan, fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat di Aceh terhadap keberadaan media radio tersebut sebenarnya ada fenomena dan kondisi lain yang mengiringi perjalanan radio komunitas di Aceh,



mulai dari pendiriannya sampai eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berikut ini kutipan pendapat Teuku Ambral, selaku ketua JRK-NAD tentang kendala radio komunitas di Aceh:

”....Keberadaan Radio komunitas merupakan hal baru bagi masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal radio siaran swasta yang sebenarnya sangat sedikit sekali jumlahnya dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah aceh. Ketatnya proses perijinan yang harus dilalui untuk mendirikan radio komunitas. Tapi sebagian besar radio komunitas yang telah ada di Aceh agak terbantu sedikit karena proses pendampingan. Apalagi sekarang tugas-tugas pendampingan tersebut sudah beralih dengan sendirinya setelah dikukuhkan jaringan radio komunitas Aceh....”

Ketika program pengembangan radio komunitas berjalan, hambatan-hambatan muncul lebih pada ketidaktahuan semua perangkat hukum tentang peran dan fungsi radio komunitas itu sendiri. Kondisi Aceh saat ini misalnya masih mengalami krisis listrik sehingga menghambat proses siaran radio komunitas. Sehingga saat akan mengudara kembali setelah sekian bulan berkuat dengan kerusakan alat akibat arus listrik yang tidak stabil, pengelola harus rela menyaksikan perangkat radio yang rusak.

Sementara itu menyangkut materi siaran radio komunitas, terutama menyangkut manajemen siaran, seperti halnya radio komunitas lain pada umumnya menurut Karimuddin sebagai berikut :

”....ketika harus berhadapan dengan anak muda yang menginginkan mengelola radio komunitas seperti gaya radio siaran swasta. Kondisi tersebut setidaknya telah menunjukkan bagaimana sulitnya membangun radio komunitas yang ideal. Belum lagi kalau kita bicara persoalan partisipasi warga yang juga masih belum begitu optimal dalam memanfaatkan radio komunitas sebagai media informasi desa. Di tambah lagi keterbatasan pengetahuan dalam manajemen siaran radio komunitas serta faktor geografis menjadi hambatan bagi masyarakat Aceh untuk mendapatkan akses informasi dan hiburan...”

Semula, ketika tragedi tsunami muncul dan lahir perdamaian menjadi momentum tepat bagi semua pihak di Aceh untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun kembali aceh. Sekarang radio komunitas sudah ada di Aceh dan menjadi media komunikasi, informasi, hiburan, pendidikan, syiar agama dan

pelestarian budaya lokal. Namun demikian, tantangan terbesar radio komunitas di Aceh justru berada pada faktor internal, seperti yang utarakan Safir, selaku anggota KPID NAD :

”.... Seperti kita ketahui bersama kelahiran radio komunitas di Aceh inisiatifnya dari pihak luar. Padahal kalau mau jujur, radio komunitas seharusnya lahir karena inisiatif warga itu sendiri. Kekuatan partisipasi komunitasnya adalah kekuatan radio komunitas, namun kenyataannya saat ini banyak yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut. Kelemahan manajemen internal radio komunitas dalam memposisikan diri dimana para pengelolanya anak muda dan pemahaman mereka masih lemah. Makanya konsistensi pengelola sangat berpengaruh pada daya hidup radio komunitas itu sendiri...”

Selanjutnya keberlanjutan radio komunitas juga tergantung dari manajemen keuangan. Memang, sampai pada tingkat-tingkat tertentu ada orang-orang yang bersedia menjadi pendukung dana tapi ini biasanya memiliki batas. Pengeluaran rakom biasanya lebih besar daripada pemasukannya. Manajemen keuangan radio komunitas memang susah-susah gampang karena menurut undang-undang tidak boleh memasang iklan siarannya kecuali iklan layanan masyarakat. Namun radio komunitas yang kreatif justru memiliki pemasukan yang berasal dari acara *off-air*. Sayangnya belum semua radio komunitas memiliki kreativitas yang cukup atau mereka kurang referensi tentang bagaimana bentuk-bentuk manajemen keuangan yang telah dilakukan radio komunitas lain. Jadi adalah penting untuk mempersiapkan sebuah radio komunitas yang tak hanya lihai dalam urusan teknis siaran, tetapi juga mampu mencari sumber pemasukan untuk mendukung operasionalisasi siaran.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Diskusi

Pada bagian diskusi ini adalah bagian di mana penulis melakukan interpretasi terhadap temuan di lapangan dan analisis data yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya, maka tentunya interpretasi penulis akan merujuk pada teori komunikasi massa Joseph R. Dominick (2002) dengan urutan sebagai berikut : (1) Lingkungan; (2) Media Massa; (3) Saluran; (4) Khalayak; dan (5) Umpan balik. Dalam model ini proses komunikasi tidak diawali dengan komunikator tetapi dengan lingkungan. Dengan demikian lingkunganlah yang membawa informasi yang kemudian diterima oleh media massa.

Bila hendak melihat fungsi komunikasi massa dapat berperan dalam menghadapi bencana ataupun dalam situasi tanggap darurat, maka fungsi pengawasan *lingkungan* yang berupaya untuk pengumpulan dan penyebaran informasi melalui radio komunitas mengenai berbagai peristiwa terjadi di dalam dan di luar lingkungan masyarakat. Masyarakat disini bisa korban bencana itu sendiri dan bisa pihak luar yang ikut memberi bantuan. Asumsi dari lingkungan pada radio komunitas menjadi medium untuk menyebarkan dan menyampaikan segala peristiwa dan pengaruhnya, sehingga dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat luas luas.

Dari pandangan Dominick ini sangat jelas melihat bahwa peran komunikasi massa juga berfungsi sebagai *early warning system* (tanggap darurat) terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini bencana gempa bumi dan tsunami Aceh. *Media massa* tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Informasi yang diterima media massa dari lingkungan berupa berita dan hiburan. Sementara itu berita dapat berupa peristiwa atau ucapan dan pernyataan dari individu atau organisasi. Informasi itu harus melalui tahap penyaringan oleh organisasi media massa.

Melalui *saluran* radio komunitas, informasi penanggulangan bencana dapat terinformasikan bagi korban yang berada di barak-barak pengungsian. Segala keluhan masyarakat dapat tersalurkan dengan siaran radio komunitas. Khalayak yang menerima informasi tentang perkembangan bencana, informasi keluarga hilang serta siaran hiburan untuk menghilangkan trauma tsunami. Radio komunitas juga bisa bereaksi setelah menerima informasi dari masyarakat bila terjadi kecurangan dalam penyaluran bantuan. *Umpan balik* disini telah terjadi komunikasi dua arah yang saling menguntungkan antara masyarakat, radio komunitas dan penyedia bantuan itu sendiri. Tentunya umpan balik ini bisa saja negatif maupun positif.

Dalam situasi pasca bencana, kecepatan dan pemerataan informasi menjadi pemicu percepatan proses pemulihan pasca bencana. Niat ini pula yang mendasari didirikannya radio komunitas dengan daya pancar rendah untuk memenuhi kekosongan informasi di lokasi-lokasi pengungsian, baik bagi organisasi donor, pihak terkait dalam melakukan koordinasi dan tentunya korban bencana itu sendiri. Informasi seputar distribusi bantuan, kesehatan, informasi korban hilang dan selamat, pendidikan, *trauma healing* dan lain sebagainya di kemas dalam program yang sederhana dan seadanya.

Dalam masalah yang penulis teliti ini, radio komunitas Samudera FM yang berada di lokasi pengungsian mencoba mengambil peran sebagai media penyambung lidah dengan komunitas diluar pengungsi. Bahkan sebagian besar pengelola dan menyiarkannya adalah korban tsunami. Mereka adalah masyarakat dari barak pengungsian yang terdiri dari pemuda dan aparat desa. Dengan personil terbatas dan memperoleh pendampingan dari relawan program *Atjeh Emergency Radio Network (AERNet)* mampu mengemas program siaran dengan kreatif. Misalnya dari hasil diskusi dengan pengelola Samudera FM dikemukakan bahwa dalam mengemas program siaran tim reporter melakukan reportase lapangan ke barak-barak pengungsian di wilayah kecamatan Samudera. Hal ini menjadikan radio Samudera FM sangat dekat dengan komunitasnya, khususnya masyarakat pengungsi karena kondisi dan keadaan mereka sering diangkat dan disiarkan radio.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi

Aceh, radio komunitas Samudera FM mulai menunjukkan keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bukan berada di daerah pengungsian. Setelah keluar dari masa tanggap darurat dan masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi, radio komunitas lalu mengambil peran sebagai media pengawas dan pengontrol kebutuhan korban gempa dan tsunami dalam pelaksanaan pembangunan. Penyimpangan-penyimpangan dan keterlambatan penyediaan rumah bantuan masuk agenda pemberitaan yang sering disuarakan melalui radio. Sehingga radio komunitas kemudian menjadi salah satu pilihan untuk mengorganisasikan diri agar komunitas bisa berdaya dalam mempraktikkan kebebasan informasi. Melalui radio yang dikelola dari, oleh, dan untuk komunitas ini mereka bisa berbagi informasi dan meningkatkan posisi tawar.

Pengalaman yang terlihat dari kemunculan radio komunitas pasca tsunami memperlihatkan antusias komunitas (terutama kaum muda) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan radio. Tidak heran bila sebahagian penyiar terdiri dari kaum muda yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pelajar dan pemuda-pemudi dari barak pengungsian. Kehadiran radio komunitas telah menyediakan wadah bagi mereka untuk dapat menunjukkan semangat kreatifitas mereka yang selama ini nyaris pupus ditelan kondisi Aceh yang selama bertahun-tahun larut dalam kondisi konflik dan rawannya kondisi keamanan yang menyebabkan tertutupnya akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat terutama melalui media radio.

Walaupun pada intinya radio komunitas sesungguhnya memang hadir dalam ruang suara untuk berbagi solidaritas dan pengetahuan. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pengawalan yang tepat sehingga radio komunitas tetap berpijak pada komunitasnya. Caranya dengan membangun kapasitas kerja radio komunitas, saling belajar, saling bertukar pengalaman. Belajar dari radio komunitas di daerah bencana, tantangan strategis radio komunitas terletak pada konsistensi tujuan dan sebagai media akar rumput yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kapasitas pengetahuan, ketrampilan dan kerjasama menuju kemandirian.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, beberapa pakar komunikasi berpendapat bahwa radio memiliki peran penting dalam pembangunan. Radio dianggap mampu berperan sebagai kekuatan pengganda yang mampu mengubah

anggota masyarakat menjadi individu-individu memiliki semangat tinggi dan kreatif. Menurut Pye (1967) radio sebagai salah satu media massa juga diharapkan mampu berperan sebagai pengawas umum (*inspector general*) bagi kebijaksanaan dan tindakan pemerintah. Dalam masyarakat yang sedang membangun, informasi dianggap mampu memainkan tiga macam peranan, yaitu untuk mengawasi dan melaporkan kembali (*the watchman role*), membantu dalam memutuskan kebijaksanaan, mengarahkan dan mengatur (*the policy role*) dan mendidik anggota-anggota baru dalam masyarakat membawa dan membekali mereka dengan keahlian dan kepercayaan yang sesuai dengan masyarakat tersebut (*the teacher role*).

Hal ini menurut Schramm (1964) secara empiris dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi massa mampu menciptakan suatu iklim bagi perubahan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai baru dan membantu masyarakat dalam menemukan norma-norma baru dan kesenangan dalam periode transisi. Ketika berbicara peran media radio komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, maka dapat dilihat paradigma pendekatan komunikasi dalam proses pembangunan. Dalam kerangka model-model komunikasi pembangunan, dimana di tahun 80-an lahir sebuah pendekatan baru yang dikenal dengan *Communication Support Development (CsD)*.

Dalam model CSD ini masyarakat diberi kesempatan mengakses dan menyampaikan suara hati melalui media massa terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Bentuk komunikasi harus dilaksanakan secara dua arah. Masyarakat harus mendiskusikan bersama-sama dan kemudian menggunakan media komunikasi, serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Diaz-Bordenave (1989), Komunikasi yang memperlihatkan hati nurani masyarakat seperti ini akhirnya dikenal sebagai *Participatory Communication*. Komunikasi seperti ini apabila digunakan penerapannya pada radio komunitas dapat membantu dalam pembangunan identitas budaya masyarakat. Seperti telah diketahui, radio komunitas selain sebagai alat bagi warga negara untuk mengekspresikan diri dan memfasilitasi mengungkapkan persolan masyarakat, juga pada kesempatan yang lain memberikan pelayanan sebagai alat untuk mendiagnosa persolan-persoalan masyarakat.

## 5.2. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehadiran radio komunitas di Aceh pasca tsunami untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana informasi, hiburan dan komunikasi. Hal ini membutuhkan dukungan yang konstruktif dan kerjasama dari semua pihak terkait agar para korban bencana dan masyarakat sekitar dapat terhibur. Peran dan fungsi radio komunitas di dalam masa tanggap darurat dapat menjadi media untuk saling berkomunikasi dengan keluarganya yang terpisah dan dapat mendapatkan informasi, baik tentang lingkungannya maupun dari luar lingkungannya. Kerjasama yang dilakukan sangat penting dilakukan agar berbagai kendala dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
2. Independensi, partisipasi, inisiatif dan mekanisme dari dan untuk komunitas. Banyaknya bantuan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri hendaklah justru menguatkan semangat partisipasi dan inisiatif serta kreativitas komunitas. Jangan sebaliknya atau malah mematikan independensinya. Justru dengan keberadaan sistem informasi komunikasi ini diharapkan terbangun mekanisme pembangunan yang lebih partisipatif dan dari bawah (*bottom up*) untuk mengimbangi pembangunan yang berorientasi dari atas (*top down*).
3. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan radio komunitas dalam proses operasionalisasi pengembangan radio komunitas Samudera FM membutuhkan kemampuan yang khusus baik individu maupun kelembagaan komunitas. Kemampuan ini bukan membutuhkan proses dan tidak diperoleh dengan cara instan. Kemampuan ini dijalankan seiring dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh *Combine Resource Institution* bersama mitra-mitranya.
4. Jalanan kerjasama, dukungan, dan peran lembaga-lembaga terkait dalam menjaga eksistensi radio komunitas yang telah terbangun di Aceh. Dimana perkembangan bantuan dalam bentuk apapun akan memiliki peluang berhasil bila didukung oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, komunikasi dan

menjadi syarat berhasilnya kerjasama tersebut. Di masa depan, baik pemerintah, badan regulasi independen, masyarakat sipil, donor, dan penerima manfaat hendaklah mampu bekerjasama dengan lebih baik.

5. Penyelenggara radio komunitas dalam menjalankan peran dan fungsinya di daerah bencana belum optimal. Apalagi di Aceh, kehadiran radio komunitas murni atas inisiatif pihak luar karena mereka melihat adanya kekosongan informasi dalam masa tanggap darurat.
6. Radio komunitas di daerah bencana ternyata memberi semangat dan kesadaran kepada korban tsunami untuk memanfaatkan media ini sebagai corong pemberdayaan mereka untuk keluar dari trauma dan kekosongan informasi.
7. Radio komunitas merupakan bagian dari sektor komunikasi dan informasi menjadi penting artinya dalam proses penanggulangan resiko bencana.

### **5.3. Rekomendasi Akademis**

Adapun rekomendasi akademis yang dapat penulis tawarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini melihat pada perkembangan radio komunitas di daerah bencana dalam masa darurat pasca gempa dan tsunami Aceh dengan studi kasus di radio komunitas Samudera FM di desa Mancang Geudong kecamatan samudera Aceh Utara. Penelitian tentang radio komunitas di daerah bencana dalam masa tanggap darurat seperti ini belum pernah ada, oleh karena itu dirasakan banyak kekurangan terutama dalam membedah karakteristik partisipasi warga komunitas di tengah bencana dan mencari bentuk media tanggap darurat itu sendiri.
2. Seperti yang telah di uraikan dalam pembahasan, titik fokus penelitian ini hanya pada masa tanggap darurat, dimana telah tergambarkan proses kelahiran radio komunitas di Aceh sampai pada tahap pendampingan untuk menguatkan partisipasi warga sehingga radio komunitas bermanfaat dalam mengisi keterisolasian komunikasi dan informasi bagi korban tsunami. Oleh karena itu apabila penelitian ini dilakukan menyeluruh sampai masuk dalam masa



rehabilitasi dan rekonstruksi maka sebaiknya ada studi perbandingan yang bisa digali untuk mengetahui peran dan fungsi media tanggap darurat dalam bencana.

#### 5.4. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus bahwa perkembangan radio komunitas di Aceh pasca tsunami cukup menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari peran pihak luar yang ikut membantu. Oleh karena pengelola radio komunitas dan masyarakat perlu mendapat publisitas yang kuat dari lembaga yang peduli dengan radio komunitas.
2. Dalam kasus Aceh, perkembangan radio komunitas adalah karena inisiatif awalnya berawal dari luar komunitas yang terkait dengan proyek tertentu dalam hal ini karena adanya kondisi tsunami. Radio komunitas model seperti ini cenderung memiliki potensi tersendat atau tutup kalau tidak mendapat dukungan masyarakat. Untuk itu, inisiatif semacam itu perlu di dukung proses pengorganisasian yang baik untuk mengembangkan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat.
3. Kelemahan mendasar dari pengelolaan radio komunitas di aceh pada umumnya adalah rendahnya partisipasi warga, karena masyarakat belum bisa membedakan antara radio komunitas dan radio komersial swasta.
4. Problem lainnya yang harus mendapat perhatian serius adalah, sumber dana radio komunitas yang belum tergali dengan benar. Seperti radio komunitas Samudera FM hanya mengandalkan dari penjualan kupon requet lagu. Hal ini tentu berakibat pada kemampuan operasional radio komunitas itu sendiri.
5. Walaupun saat ini di Aceh sudah ada wadah yang mengayungi radio komunitas, kedepan perlu dipikirkan penguatan kapasitas radio komunitas itu sendiri di tingkat eksternal .

6. Proses perijinan radio komunitas perlu dipermudah agar geliat radio komunitas di Aceh yang sudah berkembang baik tidak mati akibat ketiadaan ijin siaran sehingga menyurutkan minat pengelola radio siaran mengudara.
7. Diperlukan penguatan institusi komunitas agar terus dilanjutkan hingga terbangun sebuah radio komunitas yang memenuhi prinsip-prinsip yang ideal.
8. Penguatan kapasitas pelaku lokal yang berkelanjutan, melalui berbagai bentuk metode dan peningkatan kapasitas agar berbagai proses dan keluaran dari radio komunitas dapat memenuhi kebutuhan komunitas akan informasi, komunikasi, pendidikan dan hiburan.
9. Dukungan pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung keberadaan radio komunitas.
10. Pegiat radio komunitas sudah semestinya paham bahwa tujuan utama dari kegiatan penyenggaraan radio komunitas bukanlah keberadaan radio itu sendiri, tetapi pada wujud ruang komunikasi untuk menanggulangi berbagai hal yang ada dalam kehidupan masyarakat.
11. Komunikasi yang intensif dari para pengelola radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas (JRK) Nanggroe Aceh Darussalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro., Komala, Lukiati & Erdinaya. (2005). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Adam, Rainer (ed). (2000). *Politik dan Radio: Buku Pegangan Bagi Jurnalis Radio*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung.
- Amri, Mulya., Prakoso, Imam., Nasir, Akhmad., & Tenesia, Ade.(2007). *Media Rakyat Mengorganisasikan Diri Melalui Informasi*. Yogyakarta: Combine Resource Institution.
- Astuti, Santi Indra. (2008). *Jurnalisme Radio Teori dan Praktek*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bittner, John R. (1980). *Mass Communication An Introduction*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Bagdikian, Ben H. (1997). *The Media Monopoly*. Boston: Beacon Press
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Birowo, Mario Antonius., Prakoso, Imam., & Nasir, Akhmad. (2007). *Mengapa Radio Komunitas*. Yogyakarta: Combine Resource Institution.
- Devito, Joseph A. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Books.
- Dominick, Joseph R. (2002). *The Dynamics of Mass Communication: Media in Digital Age(7th ed)*. New York: McGraw-Hill.
- Darmanto, A. (2007). *Pengelolaan Radio Komunitas*, Yogyakarta: Combine Resource Institution.
- Daymon, Christine & Holloway, Immy. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Effendy, Onong Uchjana. (1991). *Radio Siaran Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fraser, Colin & Sofia Restrepo Estrada. (2001). *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office

- Gamble, Michael W. (1986). *Introducing Mass Communication*. New York: Graw Hill.
- Garna, Yudhistira K. (1999). *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Gazali, Efendi (ed). (2002). *Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak: Sebuah Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Kontruksi Sosial Industri Penyiaran*. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Horton, Paul B, & Hunt, Chester L. (1999). *Sociology*. Penerjemah: Amiruddin Ram & Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Hollander, Nick., Stappers., James & Nikholas Jankowski. (1992). *The People's Voice: Local Radio and Television in Europe*. London: John Libbey Co. Ltd
- Ishadi SK. (1999). *Dunia Penyiaran: Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jankowski, Nick (ed). (2002). *Community Media in the Informasi Age*. New Jersey: Hampton Press Inc.
- Jahi, Amri. (1998). *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Lindolf, Thomas R. (1995). *Qualitative Communication Research Methode*. New Delhi: Sage Publications.
- List, Dennis. (2003). *Pemasaran Partisipatif Untuk Radio Lokal*. Jakarta: Kantor Berita Radio 68H
- Nasution, Zulkarimein. (1988). *Komunikasi Pembagunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pess.
- McGuail, Denis & Sven Windahl. (1981). *Communications Models for The Study of Mass Communications*. New York: Longman
- Melkote, Srinivas R.(1991). *Communication for Development in the Third World Theory and Practise*. India: Sage Publications.
- Munthe, Moeryanto Ginting. (1996). *Media Komunikasi Radio*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Maholtra, Naresh K. (1999). *Marketing Research: An Applied Orientation* (3<sup>rd</sup> ed). New Jersey: Prentice Hall.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Meeske, Milan D. (2004). *Copy Writing for Elektronik Media*. Arkansas: Wadsworth.
- MD, Mukhotib. (2006). *Bagaimana Mendirikan Radio Komunitas*. Yogyakarta: Combine Resource Institution.
- Masduki (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKIS
- \_\_\_\_\_. (2007). *Radio Komunitas: Belajar Dari Lapangan*. Jakarta: Kantor Perwakilan Bank Dunia.
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Prenada Media.
- McGuail, Denis & Sven Windahl. (1981). *Communications Models for The Study of Mass Communications*. New York: Longman
- McGuail, Denis. (1996). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Pandjaitan, Hince IP, & Siregar, Amir Effendi. (2003). *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*. Jakarta: PT. Wahana Global Indonesia.
- Prayudha, Harley. (2004). *Radio: Suatu Pengantar Untuk Wacana dan Praktik Penyiaran*. Malang: Bayumedia Publishing
- Purbo, Onno W. (2008). *Membangun Pemancar FM Broadcast Komunitas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rao, Laksmana (1963). *Communication and Development; A Study of Two Indian Villa*. PhD dissertation, University of Minosta.
- Rogers, Evert & Shoemaker, Floyd (1971). *Communication of Innovation; A Cross Culture Approach*. New York: The Pree Press.
- Rubin, Herbert J & Rubin, Irene S. (1992) *Community Organizing and Development*. USA: Mcmillan Publishing Company.

Rakhmad, Jalaluddin. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Setiadi, Agus. (1977). *Azas-Azas Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: LP3ES.

Srinivas, R Melkote (1991). *Communication for Development in the Third World Theory and Practise*. London: Sage Publications.

Sudibyoy, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS.

Sendjadja, Djuarsa., Tandiyo, Pradekso., & Rahardjo, Turnomo. (2002). *Teori Komunikasi Massa: Media, Efek dan Audience, modul Teori Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Severin, Werner J., & Tankard, James W. (2005). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Schechter, Danny. (2007). *Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sulistiyadi, Happy., & Saptono, Irawan. (2007). *Radio Tanggap Bencana*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan media Nusantara (PPMN)

Tabing, Louie N. (2001). *Pedoman Perilaku: Panduan Bagi Pengelola Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office

\_\_\_\_\_ (2001). *Kiat Menyusun Program Untuk Stasiun Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office

\_\_\_\_\_ (2001). *Siaran Radio Kampung: Panduan Produksi Siaran Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office

Vivian, John. (2006). *The Media of Mass Communications*. Boston: Pearson Educations

#### **Jurnal :**

Bardoel, Jo & Leen d'Haemens. ( 2003). *Media Meet The Citizen: Beyond Market Mechanism and Government Regulation*. Jurnal *The Public* Vol 10.

Jurriens, Edwin. (2003). *Radio Komunitas di Indonesia: "New Brechtian Theatre" di Era Informasi*. Jurnal *Antropologi Indonesia* Vol 72.

Zein, Dudi. (2004). *Inilah Radio Komunitas: Menyajikan Isu dan Materi Lokal Dengan Ekspresi Apa Adanya*. Jurnal Komunikasi & Informasi Vol 3 Nomor 2.

**Majalah :**

Majalah Kombinasi. Edisi 18. Januari 2007

Majalah Kombinasi. Edisi 24. April 2008

**Internet :**

[www.combine.or.id](http://www.combine.or.id)

[www.siar.or.id](http://www.siar.or.id)

[www.arnet.or.id](http://www.arnet.or.id)

<http://yunitamandolang.wordpress.com>

<http://jrki.wordpress.com>

<http://radiokomunitas.blogspot.com/>

<http://arnet.or.id/index.php?lang=id&cid=2&sid=11&id=1451>

<http://arnet.or.id/index.php?lang=id&cid=2&sid=11&id=1455>

<http://rumahiman.wordpress.com/2008/02/14/membangun-masyarakat-informasi/>

<http://slaksmi.wordpress.com/2007/03/23/radio-komunitas-di-konteks-global/>

<http://p2kpnad.blogspot.com/2006/06/konsep-dasar-rehabilitasi-rekonstruksi.html>

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21189906~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html>

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/19/time/145100/idnews/294313/idkanal/10>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2005/01/29/brk,20050129-12,id.html>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/06/opini/1483099.htm>

[http://nurudin.multiply.com/journal/item/23/Peran\\_Media\\_Massa\\_dalam\\_Menang\\_gulangi\\_Bencana](http://nurudin.multiply.com/journal/item/23/Peran_Media_Massa_dalam_Menang_gulangi_Bencana)

<http://reeqhelicious.wordpress.com/2008/04/12/radio-komunitas-media-efektif-komunitas/>

<http://bencana.net/sosok/sistem-tanggap-bencana-yang-paradigmatik.html>

<http://hartanto.wordpress.com/2006/05/10/tanggap-darurat-berbasis-komunitas/>

<http://cetak.fajar.co.id/kolom/print.php?newsid=119>

## RADIO KOMUNITAS SAMUDERA FM

<b>Nama Radio Komunitas</b>	<b>Samudera FM</b>
<b>Alamat</b>	<b>Jln.Medan B.aceh Gampong Mancang Geudong Aceh Utara.24374</b>
<b>Frekuensi</b>	<b>107,7 Mhz</b>
<b>Daya Pancar</b>	<b>50 Watt</b>
<b>No. Badan Hukum</b>	

### Gambaran Umum Wilayah Kecamatan

#### KECAMATAN Samudera:

Jumlah Mukim	: 4 Mukim
Desa	: 42 Desa
Jumlah Penduduk	: 20.655 jiwa
	: 4.267 KK
	: 10.083 laki
	: 10.083 Perempuan
Luas wilayah	: 11,919
Kondisi Topografi	: Datar
Kondisi Demografi	: Padat

Samudera adalah kecamatan yang terletak di tengah wilayah Kabupaten Aceh Utara jaraknya sekitar 20 km dari kota Lhokseumawe dan sebelah barat berbatasan dengan syamtalira bayu, sebelah timur berbatasan dengan syamtalira aron, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tanah pasir dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan murah mulia ,letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau karena pusat kota Kecamatan berada di ruas jalan Banda Aceh-Medan. Pusat kota dapat di jangkau dengan alat transportasi Mobil Antar kota, Mobil angkutan Desa hanya RBT (ojek).

Kondisi Kota Kaecamatan cukup ramai karena pasar kecamatan yang ada, di samping sebagai pusat pemiagaan warga setempat sering di singgahi penumpang umum antar kota Kabupaten maupun Propensi (dari/ke Medan).

Sedangkan wilayah pedesaan yang tersebar di sekitar pinggiran pantai,3 km kearah utara dari pusat kota Kecamatan.dan dapat Dengan RBT (OJEK).

Tofografi wilayah yang datar dan sebagian besar wilayah desa berada di pinggiran pantai,dengan sebaran penduduk yang cukup padat menyebabkan wilayah ini tergolong parah kerusakannya akibat tsunami lalu. Kerusakan fisik banyak terjadi pada tambak-tambak ikan,sarana umum,jalan dan perumahan di 12 wilayah pedesaan.Bahkan menelan korban ratusan jiwa.

Diantara desa yang rusak berat itu adalah Desa *Sawang , Blang Nibong, Puuk, Kuta Geulumpang, Meucat, Kuta Krueng, Beringen dan Krueng Matee.*

Dengan pertimbangan itulah maka Tim melakukan kajian lebih mendalam di desa-desa tersebut.



### Proses Pendirian

Radio komunitas Samudera FM berdiri/mengudara pada hari Minggu, 14 Februari 2005 yang difasilitasi oleh Aceh Emergency Radio Network ( AERNet ). Pada awal berdirinya radio ini, semua alat - alat yang dimiliki adalah hibah dari World Bank ( Bank Dunia ) yang disalurkan Combine Resource Institution ( CRI ) melalui program Aceh Emergency Radio Network ( AERNet ). Sebelum sampai ke proses pendirian, sebelumnya dilakukan pengorganisasian dan pendampingan di masyarakat komunitas selama lebih dari 3 bulan guna mendorong dan menumbuhkan partisipasi, pemahaman dan kemandirian masyarakat Samudera terhadap radio komunitas, sehingga dalam pengelolaannya nanti, radio komunitas ini dapat menjadi media informasi dan komunikasi dua arah masyarakat Samudera.

Pendirian di lakukan dengan melibatkan warga masyarakat kecamatan Samudera dan tim teknisi serta unsur muspika kecamatan dan prosesnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan rintangan.

### Visi dan Misi

<b>Visi</b>	Untuk membangun komunikasi dua arah dan informasi melalui hiburan untuk memasyarakatkan Informasi dan menginformasi masyarakat guna mengakses informasi yang lebih luas.
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Media informasi untuk masyarakat</li> <li>2. Sebagai sarana komunikasi rakyat yang ada di perkotaan ataupun di pedesaan.</li> <li>3. Sebagai alat pemersatu masyarakat dalam wadah informasi,hiburan yang murah.</li> <li>4. Sebagai media untuk mempromosikan potensi lokal</li> <li>5. Sebagai wahana untuk menimba pengetahuan bagi masyarakat.</li> </ol>

### Program Siaran

1. Assalamualaikum Bumo Malikussaleh
2. Samudera Inüp
3. Aceh Lon sayang
4. Sore Ceria
5. Request Syedara
6. Nuansa Islami
7. Nasyid
8. Riley Mesjid Besar Malikussaleh
9. Pantun Atjeh IPSA
10. Sport News
11. Pentas Cilik
12. IRT Ngobrol
13. Top musik
14. Bolly Song
15. Den dank Yok
16. Sara House
17. Lambaian Malam

### Kepemilikan

Pemilik dari radio komunitas Samudera FM ini adalah seluruh masyarakat yang menepati/ berasal/ bekerja dan berbakti untuk daerah kecamatan Samudera serta status kepemilikan perangkat radio komunitas sebagai milik kolektif ( bersama ) yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Samudera.

### Struktur Kelembagaan Radio Komunitas

#### DPK (Dewan Penyiaran Komunitas)

Nama	Jabatan	No Telpn
Saifuddin Yunus	Ketua DPK	
M.Husen	Sekretaris DPK	085260043145
Dahri Yunus	Bendahara DPK	0852
Marzuki	Anggota	-
Husaini	Anggota	-
Abdul Hadi	Anggota	-
Tgk.Syarif	Anggota	-
M. Daud	Anggota	-
Basri	Anggota	-
Sofyan	Anggota	-
M.Nasir	Anggota	-

#### BPPK (Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas)

Nama	Jabatan	No. Telpn
Karimuddin	Direktur BPPK	085260061206
Ledi Soeheri.SKM	Sekretaris	081375889989
Halizar	Bendahara	081360572183
Pumama	Bidang umum	-
Khairullah	Bidan Studio	-
Muslim	Bidang teknis	-
Farhan Adami	Bidang siaran	085277566684
Saiful Muzakir	Bidang siaran	-
Mahmuddi	Bidang keamanan	085262948350
Zulfikar	Bidan Keamanan	-

### Mekanisme Kaderisasi

Mekanisme Kaderisasi berasal dari masyarakat kecamatan samudera, pemuda, orang dewasa dan masyarakat yang mampu dan ingin belajar dan akan difasilitasi oleh Community Organizer dan BPPK.

### Dana Operasional

Dana operasional sementara ini berasal dari swadaya masyarakat dan hasil penjualan kartu request/kupon yang di jual dengan harga Rp. 500,- /kartu, dan iklan produk local serta proposal.

### Latar belakang penamaan Radio

Nama Radio Komunitas Kecamatan Samudera, Aceh utara berasal dari kerajaan Islam Samudera Pase. Penamaan ini akan lebih mencirikan radio sebagai media informasi dan komunikasi masyarakat Samudera. Masyarakat mengharapkan kehadiran media radio di kecamatan mereka ini dapat benar-benar bermanfaat dan mendorong pembangunan dan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah kecamatan Samudera khususnya yang merupakan salah satu wilayah yang cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami 26 Desember 2004 silam.

### Mitra dan bentuk kerjasama yang telah dilakukan

Nama Mitra	Bentuk kerjasama
PLN	Iklan layanan masyarakat
Pengusaha lokal	Promosi produk
Inter News	ILM
Chilfund	ILM

### Jangkauan siaran :

- Seluruh kecamatan Samudera, Tanah pasir, Syamtalira Aron, Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Blang Mangat, Muara I sebagian Kota Lhokseumawe dan Kota Lhoksukon.

### Community Organizer CO

Community Orgaizer sudah mampu memproduksi program siaran

- Cool Edit
- Produksi Talk Show
- Pemberitaan
- Testimone
- Feature

Samudera FM juga mempunyai program merclay zikir dan shalat Jum'at yang secara langsung dari Mesjid Besar Jamik Malikussaleh Kecamatan samudera Kabupaten Aceh Utara. Dan juga pemutaran tembang-tembang islami (Nasyid) guna menanti azan yang akan berkumandang di saat shalat Ashar dan Maghrib.

Demikian deskripsi program radio komunitas samudera FM dengan program-program yang disajikan berupa informasi-informasi dan hiburan.

Dan program ini dibuat atas partisipasi masyarakat dan ide dari teman-teman yang tergabung dalam BPPK (Badan Pengelola Penyiaran Komunitas) dan di setujui oleh DPK (Dewan Penyiaran Komunitas).

Mengetahui,  
Koordinator Samudra fm

( Karimuddin )

Programer

( Farhan Andamy )

Lampiran 5
Profil Program AERnet

**“JARINGAN RADIO DARURAT ACEH  
AERNET (ATJEH EMERGENCY RADIO NETWORK)”**  
PROGRAM BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PASCA BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

**A. Latar Belakang**  
26 Desember 2004, Indonesia berduka akibat bencana Gempa dan Tsunami yang melanda propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Sumatera Utara. Ratusan ribu orang meninggal dan hilang serta ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi di berbagai daerah. Menyikapi dampak yang muncul pasca bencana Tsunami di NAD, Combine Resource Institution (CRI) di Yogyakarta mencoba untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana tersebut yang berjumlah ratusan ribu orang tersebut sesuai dengan kompetensi kami.

Bantuan yang diberikan berupa perangkat informasi dan komunikasi yang dikelola oleh masyarakat mendistribusikan informasi bagi pihak – pihak yang terkait dengan program darurat (emergency), pemulihan (rehabilitasi) dan pembangunan kembali Aceh (rekonstruksi).

Berdasarkan rencana tersebut dibutuhkan sejumlah dana yang didapatkan melalui sumbangan dan hibah dari berbagai pihak (donatur) yang tidak mengikat. Sumbangan dan hibah yang diperoleh tanpa adanya persyaratan tertentu (tidak mengikat) tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan bahan (procurement), transportasi, akomodasi, komunikasi, pelatihan, dan logistik tim yang melaksanakan program di NAD.

**B. Strategi Pengembangan**  
Pengembangan program AERnet memiliki strategi yaitu berupaya untuk mendirikan 10 titik simpul informasi komunikasi dimana 5 titik diantaranya didirikan radio siaran *low power* FM. Pada tahap awal radio *low power* ini difungsikan sebagai pendukung program darurat yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Misalnya terkait dengan penyebaran bantuan, pemulihan psikologis, dan lain-lain. Kedepannya stasiun radio *low power* FM ini diharapkan agar benar – benar menjadi radio komunitas (dari, oleh, untuk dan tentang komunitas).

Program AERnet juga berupaya untuk mengembangkan strategi berjangkan, yaitu bekerjasama dengan pihak lain dalam aspek teknologi dan konten informasi. Sehingga sistem AERnet tidak hanya terdiri 10 titik saja, melainkan dapat berhubungan dan bertukar informasi dengan pihak lain melalui berbagai media/bentuk teknologi informasi dan komunikasi.

### C. Isu Strategis

Bantuan yang disalurkan ke berbagai tempat (simpul) didasarkan pemikiran dan antisipasi hal – hal sebagai berikut :

1. **Pendanaan program dan dukungan dari multipihak.**  
Pendanaan program ini diperoleh CRI dari berbagai pihak secara hibah atau sumbangan tidak mengikat lainnya. Beberapa pihak yang telah memberikan sumbangan kepada CRI adalah PPK WB, Yayasan IDEP Bali, Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur (JRK Jatim), PT. PSN Jakarta, PT. FDK Jakarta, Posko Bersama "Save Aceh" dan individu – individu yang lain. Sumbangan atau hibah yang diberikan kepada CRI lalu dimanfaatkan untuk pembelian alat sebanyak hampir 70% sedangkan lainnya adalah untuk biaya operasional penyaluran, pelatihan, perawatan dan dukungan lain. Sehingga dengan demikian tidak ada mekanisme pendanaan yang diserahkan langsung dari luar negeri/asing kepada suatu komunitas apalagi Lembaga Penyiaran Komunitas (belum ada satu komunitas yang memiliki low power FM yang betul – betul memiliki LPK).
2. **Tim kerja, spesifikasi dan sistem kerja.**  
Pihak atau person yang terlibat dalam program AERNET baik untuk persiapan, pengadaan, pemasangan, uji coba, dan perawatan perangkat dibentuk oleh CRI atas dasar sukarela dan individual (bukan perwakilan atau atas nama suatu lembaga). Individu yang tergabung dalam tim memiliki kemampuan yang berbeda, antara lain : teknisi alat, program siaran radio, survey, pelatihan, konten, dan teknologi informasi. Sistem kerja yang dikembangkan untuk program AERnet adalah sukarelawan.
3. **Mitra program dan peran fungsi JRKI.**  
Posisi CRI sebagai inisiator selalu bergerak penuh atas nama lembaga CRI. Namun CRI dibantu secara dukungan materi oleh banyak pihak diatas sedangkan di lapangan CRI dibantu oleh berbagai relawan yang berasal dsari berbagai lembaga. Sehingga dalam program AERnet ini, JRKI tidak bertanggungjawab apapun jika terjadi suatu di lapangan. Meskipun dalam pelaksanaannya CRI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak lainnya, termasuk JRKI. Meskipun ada individu di dalam tim AERnet yang merupakan pengurus suatu lembaga, namun kehadirannya adalah selaku individu relawan untuk CRI.
4. **Pemilihan lokasi, titik awal masuk dan indikator.**  
Pemilihan lokasi titik/simpul AERnet ditetapkan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah melalui kajian awal. Tahap kedua adalah kajian lapangan. Tahap ketiga adalah analisis, koordinasi dan penyepakatan bersama. Tahap kajian awal dilakukan dengan didasari data sekunder dari media (cetak dan internet) dan koordinasi dengan mitra yang memiliki informasi terkini tentang NAD. Tahap ke lapangan dilakukan melalui kontak person yang telah dimiliki pada saat kajian awal. Melalui kontak person inilah asesmen di lapangan dilakukan dengan lebih luas ke berbagai pihak dan lokasi lainnya (tidak hanya terpaku pada kontak person saja). Indikator terpenting pada pemilihan titik di tahap darurat adalah pemikiran yang terbuka (visi) dari pemilik tempat, ketersediaan tempat, jaminan keamanan, adanya operator awal, keterampilan (aksesibilitas), dan lokasi/kondisi geografis.

5. **Kelembagaan dan pengelolaan perangkat.**  
AERnet sebagai sebuah sistem akan mengembangkan berbagai mekanisme operasionalisasi dan untuk itu dibutuhkan organisasi pengelolaannya. Pada masa awal (pemasangan perangkat), kedua hal ini diperimbangkan dengan cepat sembari mempersiapkan pengembangannya untuk menjadi kelembagaan yang lebih ideal. Untuk itu maka dilakukanlah komunikasi yang cukup intensif tentang pengelolaan ini. Sistem pengelolaan pada masa darurat, adalah lebih bersifat darurat dengan organisasi seadanya yang lebih utama adalah perangkat AERnet dapat berguna bagi korban dan pihak terkait. Namun kedepannya, kelembagaan radio komunitaslah yang ideal akan dikembangkan untuk mengelola stasiun *low power FM* yang ada.  
Berbagai keputusan CRI dalam menjalankan program AERnet sangat pula dipengaruhi oleh dinamika lokal/komunitas sendiri, termasuk para mitra yang ada di lapangan. CRI mencoba untuk membangun dialog dan perencanaan partisipatif agar terbangun rasa kepemilikan terhadap perangkat dan kreativitas untuk penggunaannya sesuai ketetapan. Guna mensukseskan operasionalisasi pada masa darurat maka CRI mengembangkan strategi pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola.
6. **Situasi daerah konflik.**  
Situasi di Aceh yang sedang mengalami konflik, adalah faktor yang harus dipertimbangkan secara seksama. Namun demikian, berbagai hal dapat saja terjadi dengan mendadak dan mempengaruhi operasionalisasi suatu program, termasuk AERnet. Apalagi dengan belum stabilnya kondisi alam (bencana) dan infrastruktur pelayanan publik, sehingga kerusakan masih dapat terjadi dengan tiba-tiba.
7. **Materi siaran dan konten informasi.**  
Berdasarkan latar belakang, tujuan program dan situasi dan kondisi di Aceh, maka AERnet mencoba untuk fokus pada penyaluran informasi dan komunikasi seputar penanganan darurat kemanusiaan misalnya mengenai : hiburan, berita seputar bantuan dan kebutuhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. AERnet juga berupaya untuk selalu memperhatikan materi siaran yang sesuai dengan nilai – nilai agama, nilai – nilai moral, dan kode etik (sesuai SK KPI No 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), untuk itu, maka AERnet selalu melakukan koordinasi dan monitoring internal. CRI berharap agar sistem ini dapat turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan membangun masyarakat yang mandiri, demokratis adil dan sejahtera. Apalagi hingga saat ini belum ada keluhan dari masyarakat sekitarnya akibat siaran radio yang ada.
8. **Perijinan dan perihal administrasi.**  
Komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait telah CRI lakukan terutama dengan Kodam Iskandar Muda melalui Satintel, KPI Pusat dan Daerah karena terkait dengan Penyiaran (sesuai UU 32/2002 tentang Penyiaran), Kantor informasi dan komunikasi daerah dan pihak terkait lainnya di daerah.

## 9. Materi siaran dan penanggungjawab simpul dengan radio low power FM (lampiran).

### E. Perkembangan Saat ini

Perkembangan dan kondisi Simpul AERnet saat ini (per april 2005)

1. Kota Banda Aceh. Kantor Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE), Jl. Tengku Cot Plieng No. 48, Lampineung. Sebagai Simpul Utama.
  - a. Alat tersedia : V-sat, laptop, rig (set radio komunikasi), printer, booster 160w, PS 30A, superboomer, rotator, genset, tv kontrol dan telpon satelit (086812130400)
  - b. Kondisi : Koneksi internet baik, rig berfungsi baik dan telpon satelit berfungsi baik. Rig terhubung langsung ke simpul di Lambaro, Jantho, Simpang mamplam, RPUK (Lhoks) dan secara berantai sampai ke Geudong. Rig dapat pula menghubungi langsung ke Meulaboh (dengan memutar arah Antena menggunakan rotator). Genset tidak berada di tempat (di simpan oleh staf BPDE). Sudah dapat melakukan pertukaran informasi.
2. Meulaboh, Kab. Aceh Barat. Posko Bersama "Save Aceh", Jl. Swadaya No. 9, Meulaboh.
  - a. Alat tersedia : Low Power FM (50-75 watt), rig, PS 30A, receiver 68H dan telpon satelit (086812130401)
  - b. Kondisi : Radio FM sudah bersiaran, berbagai program siaran hiburan dan informasi lokal sudah mulai disiarkan kembali. Rig sudah dapat berhubungan dengan simpul banda. Telpon satelit dapat berfungsi baik.
3. Jantho, Kab. Aceh Besar. Wisma Peinda, Jl. Ibrahim Saidi.
  - c. Alat tersedia : Low Power FM (50-75 watt, rig, PS 30A, receiver 68H, genset dan telpon satelit (086812130402)
  - d. Kondisi : Radio FM bersiaran, receiver 68H sudah terpasang dan sudah melakukan relay siaran, telpon satelit berfungsi baik dan rig terpasang baik beserta PS nya. Radio FM sempat rusak tapi sudah diperbaiki.
4. Simpang Mamplam, Kab. Bireun. Pondok Pesantren Dayyah Ihyaul Ulum Al Aziziyah, Jl. Banda Aceh – Medan.
  - e. Alat tersedia : Low Power FM (50-75 watt, rig, PS 30A, mounting terpasang, receiver 68H ada di Banda, genset dan telpon satelit (086812130403).
  - f. Kondisi : Seluruh perangkat (kecuali tel sat namun belum dapat dihubungi) diamankan (diambil & disimpan) oleh Polres Bireun bersama Polsek Pandrah (23 april 2005). Padahal telah sempat berhasil melakukan siaran hiburan bagi korban bencana dan pertukaran informasi dengan simpul RPUK di Lhokseumawe untuk mendukung penyaluran bantuan bagi ibu hamil.
5. Samudera, Kab. Aceh Utara, Meunasah Geudong.
  - g. Alat tersedia : Low Power FM (50-75 watt), rig, receiver 68H, genset dan telpon satelit (086812130404)
  - h. Kondisi : Radio FM bersiaran, receiver 68H berfungsi (sempat relay), telpon satelit berfungsi baik dan rig berfungsi baik.
6. Kota Lhokseumawe, Sekretariat RPUK, Jl. Air Bersih 18.
  - i. Alat tersedia : Rig (set radio komunikasi) dan Telepon satelit (086812130409)
  - j. Kondisi :
    - i. Rig terpasang baik dan telpon satelit berfungsi. Bahkan pada minggu kedua april 2005 telah melakukan komunikasi dengan memanfaatkan simpul AERnet yang berada dekat dengan lokasi relokasi pengungsi. Sistem infokom ini dimanfaatkan guna mendukung upaya penyaluran bantuan untuk ibu hamil dan habis melahirkan.
    - ii. Pengelola di RPUK menggunakan mekanisme jam kerja kantor untuk operasionalisasi perangkat AERnet.
7. Lambaro, lngin Jaya, kota Banda Aceh. Rumah Pegawai BPDE.
  - k. Alat tersedia : Rig lengkap dan Telepon Satelit (086812130408)



1. Kondisi : Rig sudah berfungsi untuk komunikasi ke simpul utama dan Jantho. Telepon satelit berfungsi baik.

8. Alue Penyarang, Kab. Aceh Barat. Sekretariat Rumoh Ceria Aneuk Aceh.

m. Alat tersedia : Rig, power suply 30A, genset dan telpon satelit (086812130406)

n. Kondisi : Perangkat sudah dibongkar dan disimpan AERnet di Posko Save Aceh Meulaboh. Panitia (posko) Rumoh Ceria Aneuk Aceh telah selesai programnya dan akan keluar dari lokasi, kembali ke Meulaboh.

9. Jeuram, Kab. Nagan Raya. Gedung Eks BKO, Jl. Nasional (komplek kantor Bupati)

o. Alat tersedia : Rig, PS 30A dan telpon satelit (086812130406)

p. Kondisi : Perangkat sudah dibongkar dan disimpan salah seorang staf Pemda, karena penanggungjawab yang lama sudah pindah kerja dan tidak dapat lagi mengelola simpul AERnet.

10. Sinabang, Kab. Simeulue, Posko Bersama Save Aceh, Jl. Nasional 71.

q. Alat tersedia : Low Power FM (50-75 watt), rig, PS 30A, receiver 68H, genset dan telpon satelit (086812130405)

r. Kondisi : Terbakar akibat gempa tanggal 28 Maret 2005, akan dipasang kembali setelah survey selesai dilakukan.

#### F. Tantangan yang dihadapi

1. Kebutuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap sarana hiburan, informasi dan komunikasi. Hal ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait agar para korban bencana dan masyarakat sekitar dapat terhibur, dapat saling berkomunikasi dengan keluarganya yang terpisah, dan dapat mendapatkan informasi (berita) baik tentang lingkungannya maupun dari luar lingkungannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Kerjasama yang dilakukan sangat penting dilakukan agar berbagai kendala dapat dicegah dan diatasi dengan cepat dan tepat. Perkembangan bantuan dalam bentuk apapun akan memiliki peluang berhasil bila didukung oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, komunikasi dan kerjasama (yang didasarkan pada niat baik, peran dan kompetensi) menjadi syarat berhasilnya kerjasama tersebut. Di masa depan, baik pemerintah, badan regulasi independen, masyarakat sipil, donor, dan penerima manfaat hendaknya mampu bekerjasama dengan lebih baik.

2. Independensi, partisipasi, inisiatif dan mekanisme dari bawah (*bottom up*) dari komunitas. Banyaknya bantuan dan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri (*asing*) hendaknya justru menguatkan semangat partisipasi dan inisiatif serta kreativitas komunitas. Jangan sebaliknya atau malah mematikan independensinya. Justru dengan keberadaan sistem informasi komunikasi ini diharapkan terbangun mekanisme pembangunan yang lebih partisipatif dan dari bawah (*bottom up*) untuk mengimbangi pembangunan yang berorientasi dari atas (*top down*).

3. Kapasitas SDM dan kelembagaan komunitas. Operasionalisasi simpul AERnet membutuhkan kemampuan yang khusus baik individu maupun kelembagaan komunitas. Kemampuan ini bukanlah hal yang instan (dengan cepat) dapat disiapkan. Kemampuan ini dijalankan seiring dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh CRI bersama mitra-mitranya.

4. Independensi, transparansi dan akuntabilitas lembaga regulasi. Penyiaran komunitas sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional diatur oleh Badan Independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia disingkat KPI (Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Selaku badan independen, maka anggota KPI diharapkan mampu menjaga dirinya dari pengaruh kelompok kepentingan tertentu (pribadi atau kelompok). Seorang anggota KPI dipilih hendaknya seorang yang non partisan dan tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Orang tersebut hendaknya seorang yang terbuka/inklusif, dialogis/komunikatif dan mampu memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran.

5. Kendala umum yang dihadapi.

Perkembangan program AERnet saat ini memiliki beberapa kendala yang secara terus menerus coba untuk diatasi, yaitu :

- a. Teknis perangkat. Perangkat yang sering rusak karena infrastruktur dan SDM yang kurang mendukung.
- b. SDM dan mekanisme kelembagaan. Operasionalisasi dan pertukaran informasi yang sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM.
- c. Infrastruktur (listrik). Aliran listrik yang tidak stabil (sering mati dan tegangan turun) menyebabkan perangkat menjadi lebih cepat rusak.
- d. Situasi sosial politik keamanan. Kondisi politik dan keamanan akan sangat menentukan operasionalisasi alat. Termasuk pertimbangan keamanan bagi beroperasinya alat komunikasi pada program AERnet.
- e. Regulasi, perjanjian dan dukungan aparat. Program AERnet dengan segala perangkatnya diharapkan mampu membantu masyarakat korban bencana dan para pihak terkait untuk melaksanakan agenda kemanusiaan pada kondisi darurat, relabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Sehingga dalam hal perjanjian seharusnya mendapat dukungan dari pihak pemerintah dan badan regulasi terkait.
- f. Biaya operasional. Beberapa perangkat AERnet membutuhkan biaya operasional yang tinggi seperti telepon satelit. Namun sangat penting terutama pada daerah yang belum memiliki jaringan telepon (kabel maupun mobile). Sedangkan aspek lain yang membutuhkan dana adalah kegiatan reportase untuk mengumpulkan berita.

**G. Penutup**

Demikian penjelasan kami kepada para pihak yang terkait agar dapat dijadikan bahan koordinasi dan membangun kerjasama yang lebih baik. Upaya bantuan yang CRI lakukan adalah didasarkan pada pengalaman CRI mengembangkan dan mendampingi berbagai kegiatan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Kami berupaya untuk selalu menegakkan komitmen dan tanggungjawab CRI pada setiap kegiatannya. Sehingga pemanfaat (benefeciaries) dapat benar-benar merasakan manfaatnya.

Perencanaan danantisipasi potensi konflik akibat program AERnet sebisa mungkin coba kami lakukan, namun jika masih terdapat hal - hal yang kurang, semoga dengan kerjasama kita semua hal tersebut dapat diatasi, demi masyarakat penerima manfaat. Jadi jika ada pihak yang merasa telah terjadi pelanggaran Undang - undang, maka CRI dan mitra - mitranya akan sangat terbuka untuk melakukan dialog secara terbuka dan konstruktif.

Yogyakarta, 29 April 2005

Combine Resource Institution

Agustiawan S  
Koordinator Lapangan Program AERnet

C. Program Acara Radio Samudera FM

Jam / Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	Siaran I						
07.00 – 08.30	Selamat Pagi Bumi Malikussateh						
08.30 – 09.30	Dangdut Pagi						
09.30 – 10.00	Bollywood Musik						
10.00 – 11.00	Atjeh Lon sayang (Aceh ku sayang)						
11.00 – 12.00	Musik Serumpun						
	Siaran II						
12.50 – 13.00	Azan Dhuhur						
13.00 – 14.00	Legend of Music						
14.00 – 15.00	Dangdut Dalam Kenangan						
15.00 – 15.45	Tembang Populer						
15.45 – 16.00	Azan Ashar						
16.00 – 18.00	Meusenda Lam Haba (kupon dalam bahasa aceh)						
	Kabar sepekan NAD						
	Top Hit Indonesia						
18.00 – 18.15	Lagu-lagu Islami						
18.15 – 18.45	Sentuhan Kalbu						
18.45 -	Azan Mahgrib						
19.45 – 20.00	Siaran III						
	Azan Isya						
20.00 – 22.30	Request	Nazam (Hikayat & Nasehat Aceh)	Request	Nazam (Hikayat & Nasehat Aceh)	Request	Request	Request
22.30 – 23.45	Round Midnight						
23.45 – 24.00	Penggajian						
24.00 - ...	OFF AIR (tutup Siaran)						

*Draf*  
LAPORAN KEGIATAN

**Program Bantuan Kemanusiaan Untuk  
Nanggroe Aceh Darussalam  
Pasca Bencana Tsunami,  
Bidang Informasi dan Komunikasi.  
(AERNET – Atjeh Emergency Radio Network)**



Disampaikan kepada  
Yayasan IDEP Bali

**combine**  
RESOURCE INSTITUTION  
Combine Resource Institution

2005

## A. Pendahuluan

26 Desember 2004, Indonesia berduka akibat bencana Gempa dan Tsunami yang melanda propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan sebagian Sumatera Utara. Ratusan ribu orang meninggal dan hilang serta ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi di berbagai daerah. Semenjak kejadian tersebut, bantuanpun mulai berdatangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang sangat besar.

Combine Resource Institution (CRI) sebuah LSM di Yogyakarta, mencoba untuk membantu kondisi di NAD sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Adapun bantuan yang diberikan oleh CRI adalah berupa perangkat informasi dan komunikasi yang dikelola oleh masyarakat guna mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi bagi pihak – pihak yang terkait pada program darurat (emergency), pemulihan (rehabilitasi) dan pembangunan kembali Aceh (rekonstruksi). Program bantuan ini mulai efektif berjalan (operasional) sejak akhir Januari 2005, walaupun ada beberapa titik yang baru mulai operasional sejak awal April.

Perangkat yang dipasang berupa :

1. Koneksi internet via satelit (1 titik)
2. Pemancar radio siaran FM low power (di 5 titik)
3. Receiver satelit kantor berita 68H (di 5 titik)
4. Radio komunikasi VHF (Rig) (di 10 titik)
5. Telepon Satelit PASTI Telum + PDPT (di 10 titik)

INVENTARIS
<b>combine</b>
NO/KODE: X-72-Lap1-CRI
TANGGAL: 841

Program bantuan ini didukung oleh banyak pihak sebagai hibah atau sumbangan tidak mengikat kepada CRI, antara lain berasal dari :

1. The World Bank, Jakarta Office.
2. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta.
3. Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur.
4. Posko Bersama "Save Aceh"
5. Yayasan IDEP Bali.
6. PT. PSN (Pasifik Satelit Nusantara) Jakarta.
7. PT. FDK Jakarta
8. Individu dan lembaga lainnya.

### Peta lokasi simpul – simpul AERnet.



Keterangan : Tanda T (antena) menunjukkan keberadaan simpul dengan radio siaran low power FM.

#### B. Strategi Pelaksanaan

##### 1. Pemilihan lokasi, titik awal masuk, kelembagaan dan pengelolaan perangkat.

Pengembangan program AERnet memiliki strategi yaitu berupaya untuk mendirikan 10 titik simpul informasi komunikasi dimana 5 titik diantaranya didirikan radio siaran low power FM. Pemilihan lokasi titik/simpul AERnet ditetapkan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah melalui kajian awal. Tahap kedua adalah kajian lapangan dan tahap ketiga adalah analisis, koordinasi dan kesepakatan bersama. Tahap kajian awal dilakukan dengan didasari atas data sekunder dari media (cetak dan internet) dan koordinasi dengan mitra yang memiliki informasi terkini tentang NAD. Tahap ke lapangan dimulai melalui komunikasi dengan kontak person yang telah dimiliki pada saat kajian awal. Melalui kontak person inilah asesmen di lapangan dilakukan dengan lebih luas ke berbagai pihak dan lokasi lainnya (tidak hanya terpaku pada kontak person saja). Indikator terpenting pada pemilihan titik di tahap darurat adalah pemikiran yang terbuka (visi) dari pemilik tempat, ketersediaan tempat, jaminan keamanan, adanya operator awal, keterjangkauan (aksesibilitas), dan lokasi/kondisi geografis.

Berbagai keputusan CRI dalam menjalankan program AERnet sangat dipengaruhi oleh dinamika lokal/komunitas sendiri, termasuk para mitra yang ada di lapangan yang merekomendasikan lokasi/calon titik AERnet. CRI mencoba untuk membangun dialog dan perencanaan partisipatif agar terbangun rasa kepemilikan terhadap perangkat dan kreativitas untuk penggunaannya sesuai ketetapan

AERnet sebagai sebuah sistem akan mengembangkan berbagai mekanisme operasionalisasi. Untuk itu dibutuhkan organisasi pengelolannya. Pada masa

awal/ darurat (pemasangan perangkat), kedua hal ini dikembangkan dengan sifat sementara, dengan struktur organisasi yang masih perlu penyempurnaan. Yang utama adalah perangkat AERnet dapat sesegera mungkin berguna bagi korban dan pihak terkait, misalnya melalui program-program siaran yang terkait dengan penyebaran bantuan, dan pemulihan psikologis. Di masa depan stasiun radio low power FM ini diharapkan benar – benar menjadi radio komunitas, dan kelembagaan komunitas yang ideal akan dikembangkan untuk mengelola perangkat yang ada.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelola sementara yang ditetapkan pada masa darurat lebih tepat disebut sebagai "fasilitator." Ia-lah yang menjalankan fungsi dinamisator dan motivator agar masyarakat dapat terlibat sambil mempersiapkan kelembagaan radio komunitas yang ideal bersama dampingan dari CRI.

Guna mensukseskan operasionalisasi pada masa darurat maka CRI mengembangkan strategi pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola. Bentuk komitmen dan tanggungjawab serta mekanisme pemberdayaan yang dilakukan CRI adalah mempersiapkan seorang fasilitator informasi yang selalu keliling untuk memantau dan mendampingi simpul untuk mempersiapkan berbagai hal. Selain itu, CRI mengadakan pelatihan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan para pengelola atau fasilitator ini

## **2. Pendanaan program dan dukungan dari multipihak**

Pendanaan program ini diperoleh CRI dari berbagai pihak secara hibah atau sumbangan tidak mengikat lainnya. Beberapa pihak yang telah memberikan sumbangan kepada CRI adalah Yayasan IDEP Bali, Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur (JRK Jatim), PT. PSN Jakarta, PT. FDK Jakarta, The World Bank (Jakarta Office), Posko Bersama "Save Aceh", dan individu – individu yang lain. Sumbangan atau hibah yang diberikan kepada CRI lalu dimanfaatkan untuk pembelian alat sebanyak hampir 70% sedangkan lainnya adalah untuk biaya operasional penyaluran, pelatihan, perawatan dan dukungan lain. Sehingga dengan demikian tidak ada mekanisme pendanaan yang diserahkan langsung dari luar negeri/asing kepada suatu komunitas apalagi Lembaga Penyiaran Komunitas (belum ada satu komunitas yang memiliki low power FM yang betul – betul memiliki LPK).

Berdasarkan rencana tersebut dibutuhkan sejumlah dana yang didapatkan melalui sumbangan dan hibah dari berbagai pihak (donatur) yang tidak mengikat. Sumbangan dan hibah yang diperoleh tanpa adanya persyaratan tertentu (tidak mengikat) tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan bahan (procurement), transportasi, akomodasi, komunikasi, pelatihan, dan logistik tim yang melaksanakan program di NAD.

## **3. Materi siaran dan konten informasi**

Aspek utama pada informasi adalah konten/isi yang tertuang pada siaran media radio. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang, tujuan program dan situasi dan kondisi di Aceh, maka AERnet mencoba untuk fokus pada penyaluran informasi dan komunikasi seputar penanganan darurat kemanusiaan misalnya mengenai : bantuan dan kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan SK KPI No 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran maka AERnet berupaya memperhatikan materi siaran yang sesuai dengan nilai – nilai agama; nilai – nilai moral, dan kode etik. Lebih jauh, AERnet berharap agar

sistem ini dapat turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan membangun masyarakat yang mandiri, demokratis adil dan sejahtera. Apalagi hingga saat ini belum ada keluhan dari masyarakat sekitarnya akibat siaran radio.

Jadi sebenarnya, dari penjelasan Pertama dan Kedua, dapat disimpulkan (dan ini pula yang sebenarnya terjadi di lapangan) bahwa belum dilaporkannya materi siaran dan kepengurusan kepada KPI D NAD lebih dikarenakan masih berprosesnya pendampingan dan pembahasan hal tersebut di lapangan. Simpul AERnet yang memiliki stasiun radio low power FM, masih melakukan uji coba dan masih sering mengalami kerusakan (karena tegangan listrik yang selalu berubah drastis dan kerap). Sudah menjadi kewajiban kami untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Sehingga hal situasi ini bukanlah bermaksud untuk melanggar SP3 dan SPS. Bahkan potensi untuk melanggar SP3/SPS dapat dihindari dengan adanya pembahasan secara partisipatif dalam proses pembuatan dan penyiarannya. Sehingga kemungkinan penyimpangan dapat dicegah yang juga didukung oleh intensifnya komunikasi (sebagai bentuk monitoring dan pendampingan dari CRI) terhadap program acara yang disiarkan oleh masing-masing simpul.

**4. Situasi daerah konflik, Perijinan dan perihal administrasi lainnya**

Situasi di Aceh yang sedang mengalami konflik, adalah faktor yang harus dipertimbangkan secara seksama. Namun demikian, berbagai hal dapat saja terjadi dengan mendadak dan mempengaruhi operasionalisasi suatu program, termasuk AERnet. Apalagi dengan belum stabilnya kondisi alam (bencana) dan infrastruktur pelayanan publik, sehingga kerusakan masih dapat terjadi dengan tiba-tiba. Sehingga CRI juga berkoordinasi dengan para pihak lain seperti PDS, Dinas Infokom, Bupati, Polres dan pihak Kecamatan.

Komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait telah CRI lakukan terutama dengan KPI Pusat dan Daerah karena terkait dengan Penyiaran (sesuai UU 32/2002 tentang Penyiaran). Dan untuk memperkuat masukan (karena NAD adalah wilayah khusus) maka kami pun melakukan koordinasi dengan Dinas Infokom NAD, kepala kantor BPDE, serta pihak PDS.

**5. Tim kerja, spesifikasi, sistem dan mitra kerja**

Pihak atau person yang terlibat dalam program AERNET baik untuk persiapan, pengadaan, pemasangan, uji coba, dan perawatan perangkat dibentuk oleh CRI atas dasar sukarela dan individual (bukan perwakilan atau atas nama suatu lembaga). Individu yang tergabung dalam tim memiliki kemampuan yang berbeda, antara lain : teknisi alat, program siaran radio, survey, pelatihan, konten, dan teknologi informasi. Sistem kerja yang dikembangkan untuk program AERnet adalah sukarelawan.

Posisi CRI sebagai inisiator selalu bergerak penuh atas nama lembaga CRI. Namun CRI dibantu secara materi oleh banyak pihak dan di lapangan CRI dibantu oleh berbagai relawan yang bekerjasama untuk CRI. Sehingga jika ada individu di dalam tim AERnet yang merupakan pengurus suatu lembaga, namun kehadirannya tetap selaku individu atau relawan untuk CRI. Sehingga dalam program AERnet ini, CRI lah lembaga yang bertanggungjawab dalam proses pemasangan/pemberian bantuan ini. Meskipun dalam pelaksanaannya CRI melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak lainnya, termasuk JRKI.



#### D. Kegiatan fasilitasi pasca instalasi/pemasangan radio.

1. Monitoring, perbaikan alat serta fasilitasi untuk membangun pertukaran informasi.  
Kegiatan ini berlangsung semenjak bulan februari 2005 hingga saat ini, sifat kegiatan ini adalah terus menerus, baik langsung (ke lapangan) maupun tidak langsung. Banyak perangkat (terutama radio pemancar FM) yang rusak setelah digunakan. Sedangkan untuk perbaikannya dibutuhkan waktu yang cukup lama karena jarak yang jauh dan kesediaan waktu teknisi dan tidak adanya elemen/komponen pengganti. Komponen yang tidak ada di NAD, harus dibeli dari medan. Namun terkadang komponen tersebut juga tidak ada di Medan sehingga harus dibeli dan dikirim dari Yogyakarta. Selain jenis kerusakan diatas, gangguan yang sering dihadapi adalah berubahnya setting dari perangkat, sehingga tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Namun demikian, berbagai kerusakan diatas umumnya dapat diatasi.
2. Pengembangan situs [www.infoaceh.net](http://www.infoaceh.net)  
Pengembangan situs web ini dilakukan melalui 2 arah, yaitu sesuai perencanaan dan sesuai kebutuhan yang muncul setelah berfungsi. Situs ini memiliki fasilitas khusus seperti : menampilkan berita, feature, laporan dan data (baik teks maupun peta). Menampilkan foto, audio dan video dari berbagai kegiatan. Menampilkan pesan singkat (sms). Serta berbagai fasilitas standar lainnya.
3. Pelatihan dasar radio komunitas, jurnalistik dan sistem operasional AERnet.  
Pelatihan dilangsungkan dua kali, pertama di Lhokseumawe, untuk simpul yang berada di wilayah pantai timur, dari tanggal 17 – 19 April 2005. Kedua di Meulaboh untuk simpul yang berada di wilayah pantai barat, dari tanggal 21 – 23 April 2005.
4. Misi khusus pada 27 April 2005 – 8 Mei 2005.

#### C. Kendala umum yang dihadapi.

Perkembangan program AERnet saat ini memiliki beberapa kendala yang secara terus menerus coba untuk diatasi, yaitu :

- a. Teknis perangkat sering rusak karena infrastruktur (listrik) yang tidak stabil.
- b. SDM dan mekanisme kelembagaan. Operasionalisasi dan pertukaran informasi yang sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM.
- c. Infrastruktur (listrik). Aliran listrik yang tidak stabil (sering mati dan tegangan turun) menyebabkan perangkat menjadi lebih cepat rusak.
- d. Situasi sosial politik keamanan. Kondisi politik dan keamanan akan sangat menentukan operasionalisasi alat. Termasuk pertimbangan keamanan bagi beroperasinya alat komunikasi pada program AERnet.
- e. Regulasi, perijinan dan dukungan aparat. Program AERnet dengan segala perangkatnya diharapkan mampu membantu masyarakat korban bندان dan para pihak terkait untuk melaksanakan agenda kemanusiaan pada kondisi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Sehingga dalam hal perijinan seharusnya tidak mendapat kesulitan dari pihak pemerintah dan badan regulasi terkait.
- f. Biaya operasional. Beberapa perangkat AERnet membutuhkan biaya operasional yang tinggi seperti telepon satelit. Namun sangat penting terutama pada daerah yang belum memiliki jaringan telepon (kabel maupun mobile). Sedangkan aspek lain yang membutuhkan dana adalah kegiatan reportase untuk mengumpulkan berita.

#### D. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa dipetik.

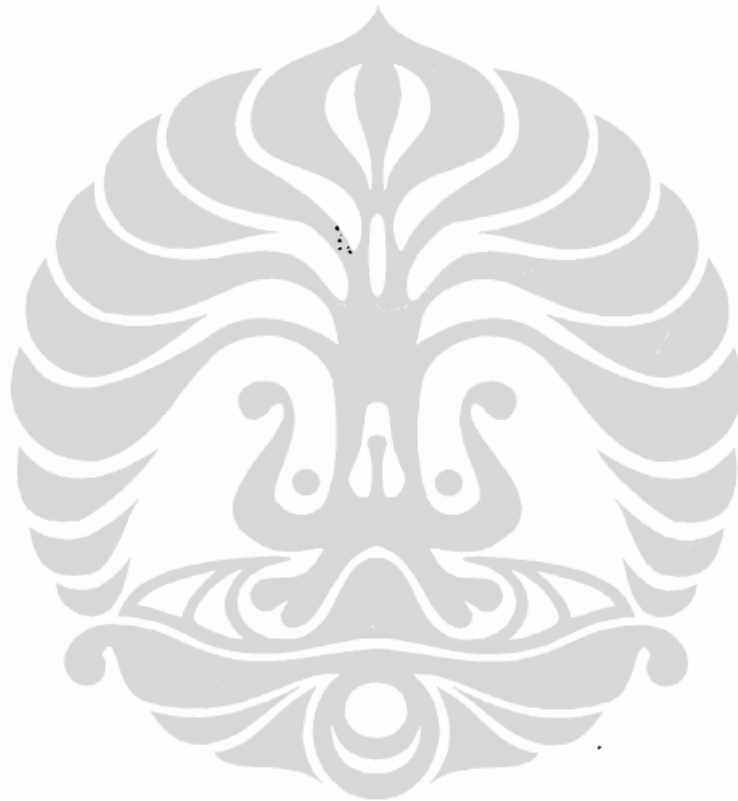
1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana informasi, hiburan dan komunikasi. Hal ini membutuhkan dukungan yang konstruktif dan kerjasama dari semua pihak terkait agar para korban bencana dan masyarakat sekitar dapat terhibur, dapat saling berkomunikasi dengan keluarganya yang terpisah, dan dapat mendapatkan informasi (berita) baik tentang lingkungannya maupun dari luar lingkungannya. Kerjasama yang dilakukan sangat penting dilakukan agar berbagai kendala dapat diatasi dengan cepat dan tepat.
2. Independensi, partisipasi, inisiatif dan mekanisme dari bawah (*bottom up*) dari komunitas. Banyaknya bantuan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri (asing) hendaklah justru menguatkan semangat partisipasi dan inisiatif serta kreativitas komunitas. Jangan sebaliknya atau malah mematikan independensinya. Justru dengan keberadaan sistem informasi komunikasi ini diharapkan terbangun mekanisme pembangunan yang lebih partisipatif dan dari bawah (*bottom up*) untuk mengimbangi pembangunan yang berorientasi dari atas (*top down*).
3. Independensi, transparansi dan akuntabilitas lembaga regulasi. Penyiaran komunitas sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional diatur oleh Badan Independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia disingkat KPI (Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Selaku badan independen, maka anggota KPI diharapkan mampu menjaga dirinya dari pengaruh kelompok kepentingan tertentu (pribadi atau kelompok). Seorang anggota KPI dipilih hendaklah seorang yang non partisan dan tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Orang tersebut hendaklah seorang yang terbuka/inklusif, dialogis/komunikatif dan mampu memberdayakan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran.
4. Kapasitas SDM dan kelembagaan komunitas. Operasionalisasi simpul AERnet membutuhkan kemampuan yang khusus baik individu maupun kelembagaan komunitas. Kemampuan ini bukanlah hal yang instant (dengan cepat) dapat disiapkan. Kemampuan ini diwajibkan seiring dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh CRI bersama mitra-mitranya.
5. Kerjasama, dukungan, dan peran lembaga – lembaga terkait. Perkembangan bantuan dalam bentuk apapun akan memiliki peluang berhasil bila didukung oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, komunikasi dan kerjasama (yang didasarkan pada niat baik, peran dan kompetensi) menjadi syarat berhasilnya kerjasama tersebut. Di masa depan, baik pemerintah, badan regulasi independen, masyarakat sipil, donor, dan penerima manfaat hendaklah mampu bekerjasama dengan lebih baik.

#### E. Rekomendasi

1. Penguatan institusi komunitas agar terus dilanjutkan hingga terbangun sebuah radio komunitas yang memenuhi prinsip-prinsip yang ideal.
2. Penguatan kapasitas pelaku lokal yang sustain, melalui berbagai bentuk metoda peningkatan kapasitas agar berbagai proses dan keluaran dari radio komunitas dapat memenuhi kebutuhan komunitas akan informasi, komunikasi, pendidikan dan hiburan.
3. Pengkomunikasian dan kerjasama para pihak tentang keberadaan dan pemanfaatan sistem AERnet agar terus dibangun.
4. Dukungan pihak pemerintah/lembaga yang berwenang untuk mendukung keberadaan media komunitas, salah satunya radio komunitas.

5. Komunikasi yang intensif dari para fasilitator dan pengelola radio komunitas terhadap berbagai perkembangan yang ada, sehingga mampu mencegah munculnya permasalahan atau dapat diselesaikan sejak dini.

#### **E. Lampiran**



**Lampiran 1**

**Matriks ringkasan perjalanan misi khusus AERnet pada 17 April – 8 Mei 2005.**

Hari & Tanggal	Kegiatan	Capaian
Rabu, 27 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan detil kegiatan</li> <li>• Penyelesaian dokumen pendukung</li> <li>• Up dating situs infoaceh.net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda AERnet selama di NAD bersama tim WB.</li> <li>• Surat dan dokumen terkait dengan permohonan ijin kepada para pihak terkait.</li> <li>• Penambahan konten</li> </ul>
Kamis, 28 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dengan Kepala BPDE.</li> <li>• Datang ke kantor Infokom</li> <li>• Kunjungan lapangan ke Jantho (SEHA FM)</li> <li>• Persiapan perihal administrasi.</li> <li>• Up dating situs infoaceh.net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan terhadap AERnet dan membuka pintu ke Kepala Infokom (Humas PDSDP).</li> <li>• Tidak bertemu Kepala Infokom krn beliau mengikuti rapat dengan Bupati.</li> <li>• Updating Updating informasi, situasi &amp; kondisi simpul Jantho dan melakukan perbaikan alat (oleh Bpk. Adi).</li> <li>• Koordinasi tentang surat peringatan I dari Balmon.</li> <li>• Surat surat permohonan kepada para pihak terkait</li> <li>• Penambahan menu pada situs www.infoaceh.net</li> </ul>
Jumat, 29 Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dengan kepala Infokom</li> <li>• Pertemuan dengan Kabid Humas PDSD</li> <li>• Pertemuan dengan ketua Komite Bersama Masyarakat Sipil</li> <li>• Pertemuan dengan LSM Pugar</li> <li>• Up dating situs infoaceh.net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi kasus samalanga, dukungan terhadap AERnet, menghubungkan ke Bupati Bireun dan penjalasan perijinan pada status DS.</li> <li>• Klarifikasi kasus samalanga, dukungan terhadap AERnet, menghubungkan ke Bupati Bireun dan penjalasan perijinan pada status DS</li> <li>• Dukungan dan kerjasama kedepan serta keikutsertaan pada pertemuan komite 11 mei.</li> <li>• Dukungan dan kerjasama pengembangan radio untuk pemberdayaan masyarakat dan monitoring program/bantuan pembangunan.</li> <li>• Penambahan menu dan perbaikan lay out</li> </ul>
Sabtu, 30 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kepala Infokom</li> <li>• Pertemuan di Lambaro</li> <li>• Pertemuan di Dayyah</li> <li>• Ke Lhokseumwe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat rekomendasi dari Infokom untuk AERnet.</li> <li>• Updating informasi, situasi &amp; kondisi simpul Lambaro.</li> <li>• Updating informasi &amp; TRL.</li> <li>• Istirahat</li> </ul>
Minggu, 1 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geudong</li> <li>• Bertemu ketua RPUK</li> <li>• Bertemu Bupati Bireun</li> <li>• Koordinasi di Samalanga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Updating informasi, situasi &amp; kondisi simpul Geudong.</li> <li>• Updating informasi, situasi &amp; kondisi simpul RPUK.</li> <li>• Klarifikasi kasus &amp; dukungan penyelesaian masalah.</li> <li>• Sharing hasil advokasi &amp; updating informasi, situasi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Updating infoaceh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &amp; kondisi simpul Samalanga.</li> <li>• Penambahan menu dan konten situs infoaceh.net.</li> </ul>
Senin, 2 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Polres Bireun</li> <li>• Ke kantor Bupati</li> <li>• Ke samalanga</li> <li>• Updating infoaceh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi kasus (satintel &amp; kapolres), penyerahan surat rekomendasi inforkom &amp; pengambilan alat.</li> <li>• Penyerahan surat-surat sebagai tembusan.</li> <li>• Pengosongan studio (alat semua disimpan oleh Combine).</li> <li>• Penambahan menu dan konten.</li> </ul>
Selasa, 3 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To Meulaboh</li> <li>• Save Aceh (Simpul)</li> <li>• Pertemuan dengan Humas Bupati Nagan Raya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiba di Meulaboh</li> <li>• Updating informasi dan sharing AERnet dengan penyiar.</li> <li>• Updating informasi simpul &amp; klarifikasi kasus/progress &amp; RTL di simpul Nagan Raya.</li> </ul>
Rabu, 4 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dengan Pemda Jeuram.</li> <li>• Koordinasi dengan PMI</li> <li>• Updating infoaceh.net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi progress dengan Ka. PU/Eks As II, Kadis Dephub, Humas Bupati. Melakukan pengambilan alat.</li> <li>• Serah terima pengelolaan perangkat AERnet oleh PMI sebagai simpul Nagan Raya.</li> <li>• Penambahan menu dan konten.</li> </ul>
Kamis, 5 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat report</li> <li>• Membuat Tor rakor Aernet.</li> <li>• Membuat ID card AERnet</li> <li>• Konfirmasi undangan dan acara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Report</li> <li>• ToR pertemuan 7 Mei 2005 dan Aernet next 2 months</li> <li>• List masalah.</li> <li>• Disain ID card Aernet</li> <li>• Daftar peserta pertemuan koordinasi I AERnet.</li> </ul>
Jumat, 5 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan dengan PSDS</li> <li>• Koordinasi dengan KPI D</li> <li>• Persiapan final rakor AERnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurus dan mendapat ijin penggunaan perangkat dan frekuensi dari PSDS.</li> <li>• Up dating informasi, klarifikasi &amp; RTL</li> <li>• Persiapan teknis: konsumsi, alat, lay out tempat, dll.</li> </ul>
Sabtu, 7 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan H-1 simpul AERnet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme operasionalisasi AERnet</li> </ul>
Minggu, 8 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan H-2 simpul AERnet</li> <li>• Kembali ke Jogjakarta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review dan Rumusan RTL (schedule)</li> </ul>

**Lampiran 2**

**Ringkasan Capaian Misi Khusus**

Misi	Capaian
1. Pelatihan	<p>Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wil. Timur : Tanggal 17 – 19 april di UNIMAL pukul 08.00 – 18.00, sebanyak 33/35. Secara teknis berlangsung baik namun beberapa materi dipersingkat karena batasan waktu.</li> <li>b. Wil. Barat : Tanggal 21 – 23 april di Suara Meulaboh, pukul 08.00 – 23.00, sebanyak 19/25. Secara teknis berlangsung baik dan tidak ada materi yang dipersingkat karena waktu relatif panjang.</li> </ul> <p>Hasil (evaluasi peserta) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teknis pelaksanaan : baik</li> <li>b. Pemahaman : baik</li> </ul> <p>Dampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meulaboh &amp; Geudong terjadi peningkatan yang signifikan dari reportase, program acara, kerjasama, dan program acara.</li> <li>b. Sp Mamplam : telah membentuk DPK dan membenahan program acara.</li> <li>c. Jantho : Membangun kerjasama antara simpul dan pihak lainnya.</li> <li>d. Simpul lain : meningkatkan ketertarikan dan rencana pengembangan kerjasama.</li> <li>e. Merasa masih banyak lagi kekurangan dalam pemahaman dan ketrampilan, membutuhkan peningkatan kapasitas lanjutan.</li> </ul> <p>Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pelatihan lanjutan : pengorganisasian (pemb. DPK, BPPK, partisipasi, dll), penulisan berita, program talkshow, liputan investigatif, jurnalistik damai, membangun krejasama, dll.</li> <li>b. Memperkuat <i>supporting system</i> bagi simpul namun jangan sampai terjebak pada cara pandang proyek.</li> <li>c. Mengembangkan program bersama yang dapat memperkuat kerjasama jairngan/antar simpul. Misal : monitoring bantuan dan membantu pencarian anak/ortu hilang.</li> </ul>
2. Penyelesaian kasus di Simpang Mamplam, pengamanan alat oleh Polres Bireun. 27 April – 8 Mei 2005.	<p>Alat yang diamankan oleh Polres Bireun melalui Asisten I bidang Intelijen telah berhasil diambil dan saat ini disimpan di Simpul Dayyah (dimasukkan dalam kotak). Alat diambil setelah mengurus surat rekomendasi ijin dari infokom no 407/418/2005 (sesuai permintaan polres) serta berkomunikasi dengan Kapolres Bireun. Upaya pengambilan alat juga dilakukan melalui pengkomuinkasian kasus dengan : Bupati Bireun, komite bersama masyarakat sipil, badan pelaksana rekonstruksi aceh, BPDE dan PDSD (Humas). AERNet juga telah mendapatkan ijin (tertulis) dari PDSD untuk penggunaan alat &amp; frekuensi, melalui surat no B/22/V/2005/PDSD/As-I.</p>
3. Penguatan komunikasi	<p>Pengkomunikasian dengan KPI D dilakukan pada tanggal 6 Mei 2005 di kantor KPID, Jl. Daud Beureuh, Banda Aceh. Dihadiri oleh</p>

<p>dengan KPI D NAD. 27 April – 8 Mei 2005.</p>	<p>Ketua KPI-D Bpk. Iskandar, dan 2 orang anggota, Bpk. Safir dan Ibu Cut. Dari pertemuan ini diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya KPI D tidak ingin menghalangi rakom/ AERnet ataupun CRI untuk memberdayakan masyarakat dan dunia penyiaran umumnya. Hanya saja komunikasi dan persiapan lain perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Termasuk mempersiapkan rakom-rakom yang menjadi jaringan AERnet, baik kelembagaan maupun persyaratan administrasi lainnya.</p> <p>Perihal "surat pokok-pokok pikiran" ternyata merupakan surat informal yang lebih bersifat perorangan (meskipun diketahui oleh anggota yang lain). Surat tersebut dikeluarkan lebih karena dorongan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak psikologis kelembagaan, KPI D merasa "tidak dianggap/sering dilewat" padahal memiliki kewenangan untuk mengatur perihal penyiaran.</li> <li>2. Kepentingan pribadi (dan conflict of interest) oknum yang ingin dilibatkan dan mendapat benefit dari banyak/besarnya proyek-proyek yang ada di bidang penyiaran.</li> </ol>
<p>4. Up dating : konten, menu &amp; lay out situs AERnet</p>	<p>Penambahan isi dan menu serta perbaikan lay out situs <a href="http://www.infoaceh.net">www.infoaceh.net</a>.</p>
<p>5. Perumusan mekanisme operasionalisasi AERnet</p>	<p>Mengadakan pertemuan koordinasi dengan simpul simpul AERnet dan merumuskan mekanisme dan RTL operasionalisasi AERnet.</p>

### Lampiran 3

#### Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Antar Simpul AERnet

- Peserta. Masing – masing perwakilan dari Simpul : Banda Aceh (3 or), Jantho (1 or), Lambaro (1 or), Sp Mamplam (1 or), RPUK (1or), Universitas Malikussaleh (1 or), Geudong (1 or), Meuloaboh (1 or). Dan panitia (2 or). (Absensi terlampir)
- Sabtu, 7 Mei 2005

Waktu	Acara	Pelaksana	Metoda
16.00 – 17.00	<p>"Wawasan" : KPI D, peran masyarakat dan regulasi lembaga penyiaran komunitas. → Setelah ditunggu hingga pukul 16.45, para pembicara tidak hadir tanpa pemberitahuan.</p>	KPI D. Moderator : CRI	Pemaparan & Diskusi.
17.00 – 17.30	<p>Pentingnya mekanisme operasionalisasi : pemetaan masalah, kekhawatiran &amp; dampak</p>	ASP	Metaplan → hasil pemetaan menjadi kerangka pembahasan.
17.30 – 19.00	<p>Mekanisme operasionalisasi 1 : Konten informasi, mekanisme</p>	ASP	Pemaparan Diskusi

	koordinasi & monitoring internal.		
19.00 – 20.00	Sholat dan makan malam bersama	-	-
20.00 – 00.00	Mekanisme operasionalisasi 2 : Teknik, teknis & kelembagaan.	ASP	Pemaparan Diskusi
00.00 – 02.00	Mekanisme operasionalisasi 3 : Pemetaan, peluang dan membangun kerjasama para pihak.	ASP + RZL	Pemaparan Diskusi

- Minggu, 8 Mei 2005

Waktu	Acara	Fasilitator	Metoda
08.00 – 08.45	Sarapan bersama	-	-
08.45 – 09.45	Review	ASP	Pemaparan & Diskusi
09.45 –13.00	Menyusun RTL 2 bln ke depan & penyerahan hasil koordinasi.	RZL	Action planing
13.00 – 14.00	Sholat dan makan siang bersama	-	-
14.00 – 15.00	Pengenalan internet (Situs infoaceh.net) & penutupan acara	RZL	Simulasi up load berita/tulisan.

Keterangan

ASP : Agustiawan S

RZL : Rizal

#### Lampiran 4

#### Hasil Pembahasan Mekanisme Operasional & RTL AERnet pada 7 – Mei 2005.

- Mekanisme operasionalisasi 1 :
  - o Konten/informasi :
    - Misi/tujuan : Pengelolaan informasi sebagai pendukung berbagai pihak (terutama korban) untuk penanganan kemanusiaan pasca bencana Tsunami di Aceh, baik untuk masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
    - Jenis : sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, hiburan. Non politik, keamanan, pertikaian, kekerasan, non konflik, dan menghindari dampak negatif bagi masyarakat.
    - Bentuk : kontak komunikasi, berita, lagu, request, talkshow, ilm (iklan layanan masyarakat), feature (liputan mendalam), baik live/langsung maupun tunda.
    - Para pihak :
      - Narasumber
      - User/Benefeceries
    - Etika :
      - Etika jurnalis/wartawan
      - UU Pers
      - UU 32
      - SP3/SPS keputusan KPI



- Menggunakan Bahasa : nasional (utama) dan daerah (sesuai situasi dan kondisi)
- Warning (hal – hal yang harus diperhatikan) :
  - Pastikan sumber berita/informasi
  - Dampak bagi masyarakat dan penyiar/operator
  - Selektifitas berita & *script writing* yang baik
  - Dokumentasikan informasi yang disebarluaskan
  - Perhatikan bahasa/pengucapan
- Koordinasi internal dan antar simpul :
  - “Di udara” (menggunakan media komunikasi)
    - Waktu : sesuai situasi dan kondisi dan relatif bisa kapan saja.
    - Jumlah (Person) : Maksimal 5 orang
      - RPUK : Zulkarnaen, Farida Hanum, Munawar, Herliana, dan Nurhayati
      - Sp. Mamplam : Tgk. Hendra dan Tgk. Musdar.
      - Meulaboh : Dedi Iskandar, Yuyun, Khairur Razi, Syafrudin, dan Hari Iskandar (Engkong).
    - Agenda : Sesuai kebutuhan dan sikon
    - Metoda/teknik :
      - Rig → perhatikan jadwal.
      - SMS/HP
      - Tel Sat
  - Tatap muka → Ditetapkan oleh koord. AERnet
    - Waktu :
      - Rutin : bulanan (jika memungkinkan dilakukan secara bergiliran/bergantian diantara lokasi AERnet).
      - Insidental : sesuai kebutuhan
    - Peserta (jumlah & asal) : wakil dari tiap simpul
    - Agenda :
      - Ditetapkan pada pertemuan sebelumnya
      - Disepakati dalam proses persiapan
    - Biaya (jumlah) :
      - Transportasi
      - Komunikasi
      - Konsumsi
      - Penggandaan bahan
      - ATK
    - Sumber pembiayaan
      - Internal/swadaya
      - Proposal program
      - Kerjasama pihak ketiga (non program), dari WB/Ibu Ela sudah mendapatkan komitmen untuk 2 kali pertemuan berikutnya.

**Pertemuan selanjutnya : Rabu, 8 Juni 2005 tentative di UNIMAL.**

**Beberapa agenda pertemuan berikutnya :**

1. **Penetapan pilihan badan hukum bagi rakom**
2. **Surat permohonan perijinan siaran**
3. **Rencana program kerjasama**
4. **Pemutaran VCD : advokasi rakom, pembentukan DPK, kegiatan reportase.**
5. **Progress & sikon dari tiap simpul**

## 6. Masalah yang dihadapi.

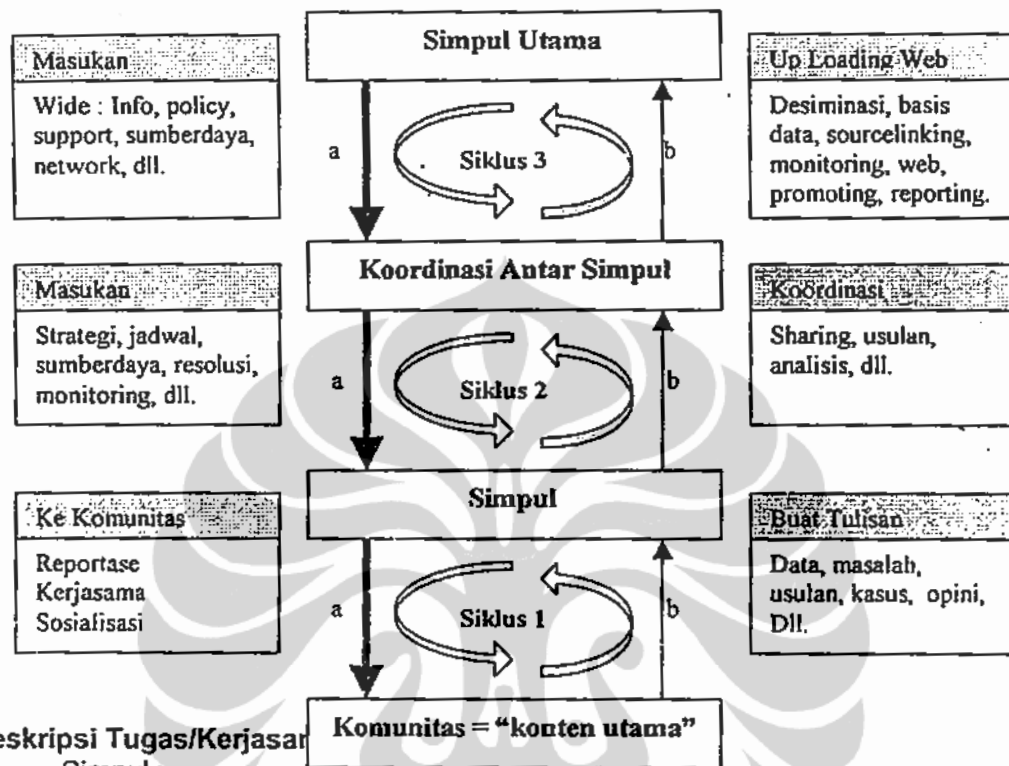
**Catatan : Kembangkan jaringan ke UNSYAH (Banda Aceh) yang memiliki laboratorium teknik/radio/ elektronika.**

- Monitoring :
  - Internal
    - Pelaku : penanggungjawab, DPK, direktur, divisi khusus.
    - Alat kontrol : aturan main AERnet, etika & prinsip.
    - Pengaduan & penyelesaian masalah
      - Pencegahan :
        - Script writing/editor
        - Selektifitas
      - Penyelesaian masalah :
        - Mekanisme pers
        - Mekanisme sanksi
        - Mediasi/dialog
  - Eksternal
    - Pelaku : masyarakat, regulator, beneficiaries.
    - Alat kontrol : perundang-undangan,
    - Pengaduan & penyelesaian masalah
- Mekanisme operasionalisasi 2 :
  - Teknis :
    - Perijinan :
      - PDSO --> Umum untuk FM & Rig
      - Radio FM : KPI – D dan KPI – Pusat (batas untuk mulai penertiban 26 Juni 2005)
        - Syarat pengurusan ijin :
          - DPK
          - Program siaran
          - Kepengurusan
          - Risalah keuangan
          - Badan hukum
          - Surat permohonan perijinan
      - Dephub (Balmon) : Rig (batas untuk mulai penertiban 18 Mei 2005). Untuk sementara lebih baik tidak digunakan, terutama untuk Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Bireun. Kecuali Meulaboh, dimana Rig sangat berperan bagi banyak pihak dan masih mendapat dukungan dari pihak otoritas lokal.
    - Alat :
      - RIG --> 143,480 Mhz. Perhatikan terlebih dahulu siap pihak yang menggunakan frekuensi tersebut. Pastikan kawan bicara adalah tim AERnet.
      - Radio siaran FM --> 107,7 – 107,9 Mhz, sehingga bagi yang masih di luar kanal ini, harus mempersiapkan diri untuk memindahkannya. Menjelang perpindahan, sosialisasikan frekuensi yang akan ditempati.
      - Telepon Satelit --> persiapkan akan ditarik semua, terutama bila :
        - Jaringan telepon lain : telkom & HP
        - Biaya operasional mahal
        - Kualitas suara kurang baik

- Receiver 68H → menerima/relay siaran nasional dari kantor berita radio 68H
- V-Sat → hanya di banda aceh. Untuk desiminasi/penyampaian yang lebih luas.
- Personel
  - Daftar operator maksimal 5 orang
  - Struktur pengurus radio
- Waktu
  - RIG :
    - Untuk sesuai kebutuhan lokal
    - Untuk bersama/serentak : Senin & Rabu (11.00 – 14.00) dan Jumat (14.00 – 16.00).
    - Off : Banda, sp Mamplam, Jantho, Lhoks
    - On : Meulaboh
  - FM :
    - Sesuai program siaran radio
- Perawatan dan penambahan alat :
  - Penangkal petir → mencegah kerusakan karena petir.
  - UPS → mencegah kerusakan karena padamnya listrik
  - Stabilizer → mencegah kerusakan karena ketidakstabilan daya listrik (turun naik daya/tegangan)
  - Kipas /fan untuk exciter → pendingin exciter
  - Penambahan komputer → untuk meningkatkan kualitas siaran, produk radio, arsip/dokumentasi, dll.
- Biaya operasional
  - Sumber daya lokal
    - Dalam komunitas : Event, sumbangan, dll.
    - Event insidententil (sesaat)
  - Program kerjasama
  - Proposal program yang berpeluang
    - Monitoring → simpul aernet siap bekerja.
- Alat verifikasi
  - Daftar petugas/operator
  - Hasil koordinasi 7-8 mei 2005
- Teknik :
  - Reportase (penggalian)
    - Metoda : wawancara, observasi, dll.
    - Etika & Prinsip
    - ID card
  - Penulisan berita (pengolahan)
    - 5W+1H
    - Rapat redaksi hingga melakukan editing
  - Dokumentasi (Pengarsipan) → urgensi dalam pengaduan
    - Manual → pembukuan
    - Digital → basis data → web/internet
  - Desiminasi/penyebaran
    - Teknik/alat/metoda
      - Radio FM
      - Web
      - RIG\*
      - Mekanisme lembaga : relawan lapangan, cetakan-poster,pamflet,buletin-, r dll.
    - Live/langsung atau Tunda

- Kelembagaan dan pengorganisasian
  - Organisasi simpul → organisasi pengelola sementara → fasilitator terbentuknya LPK : DPK & BPPK.
  - DPK Dewan penyiaran komunitas → legislatif
    - Peran dan fungsi : pengawasan, representasi komunitas, membentuk/mengangkat BPPK
    - Proses/tahapan :
      - Pemetaan kelompok/pelaku
      - Menghubungi pihak- pihak
      - Dukupakat (duduk sepakat)
      - Aturan main organisasi
  - BPPK
    - Badan pelaksana penyiaran komunitas → eksekutif
    - Diangkat oleh DPK
  - Manajemen (administrasi)
  - Status hukum (LPK) : perkumpulan atau yayasan
- Mekanisme operasionalisasi 3 :
  - Komunikasi & Koordinasi eksternal :
    - Pemetaan stakeholder (kelompok/elemen komunitas): dapat dengan siapa saja yang relevan asal memperhatikan :
      - Prinsip rakom
      - Etika
      - Mekanisme AERnet
      - Perundang-undangan yang berlaku
    - Kesepakatan kerjasama; dapat dengan menggunakan :
      - Gentlemen agreement (kesepakatan lisan)
      - MoU (surat pernyataan kesepahaman)
      - Kontrak (surat pernyataan kerjasama)

• Alur Kegiatan



• Deskripsi Tugas/Kerjasar

- o Simpul :
  - Melakukan reportase (penggalian) ke komunitas
  - Melakukan penulisan (pengolahan) informasi
  - Mengumpulkan data/informasi yang ada
  - Membangun kerjasama dengan para pihak yang bekerja di tingkat komunitas
  - Mensosialisasikan media AERnet
- o Koordinasi antar simpul :
  - Sharing pengalaman dan masalah
  - Membangun ide – ide kreatif/baru
  - Membantu memecahkan masalah
  - Mmbuat jadwal
  - Analisis.
  - Monitoring
- o Simpul utama :
  - Membangun basis data dan Updating web
  - Mencari informasi relevan (kebijakan, info umum, dll)
  - Networking & Komunikasi
  - Desiminasi
  - Mempromosikan penggunaan sistem
  - Monitoring & memastikan simpul beroperasi
  - Reporting

• **Jadwal Rencana Kegiatan Tindak Lanjut**

No	Kegiatan	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A. Simpul di Lokasi/lapangan</b>									
1	Reportase Lapangan								
2	Rapat koordinasi internal								
3	Membuat Tulisan								
4	Membuat basis data lokal								
<b>B. Koordinasi Antar Simpul</b>									
5	Rapat koordinasi simpul	tgl: 7-8 Juni				tgl: 8-9 Juli			
<b>C. Simpul Utama</b>									
6	Basis data								
7	Networking								
8	Up loading								
9	Monitoring								
10	Desiminasi								
11	Collecting relevan data								
12	Reporting								